

ECOTOURISM
LERENG MERAPI
PASCA KONSOLIDASI TANAH

oleh:
Aristiono Nugroho
Sutaryono

STPN Press, 2015

**ECOTOURISM LERENG MERAPI
PASCA KONSOLIDASI TANAH**
©Aristiono Nugroho dan Sutaryono

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:
STPN Press, Juli 2015
Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman
Yogyakarta, 55293, Tlp. (0274) 587239
Faxes: (0274) 587138
Website: <http://pppm.stpn.ac.id/>

Penulis: Aristiono Nugroho dan Sutaryono
Editor: Dwi Wulan Pujiriyani
Proofread: M. Nazir
Layout/Cover: Nanjar Tri Mukti

sumber foto cover: kalimendong-info.blogspot.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
**ECOTOURISM LERENG MERAPI
PASCA KONSOLIDASI TANAH**
STPN Press, 2015
xii + 240 hlm.: 14 x 21 cm
ISBN: 602-789422-9
ISBN: 9786027894228

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas RahmatNya buku ini dapat diselesaikan. Juga terimakasih kepada semua pihak yang telah berbaik hati membantu proses pengumpulan data, seperti:

1. Kepala Desa Umbulharjo, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman;
2. Kepala Desa Kepuharjo, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman;
3. Kepala Dusun Pangukrejo, Desa Umbulharjo;
4. Kepala Dusun Pelemsari, Desa Umbulharjo;
5. Kepala Dusun Petung, Desa Kepuharjo;
6. Kepala Dusun Kaliadem, Desa Kepuharjo;
7. Kepala Dusun Jambu, Desa Kepuharjo;
8. Kepala Dusun Kopeng, Desa Kepuharjo;
9. Masyarakat Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo

Atas bantuan berbagai pihak buku ini hadir, untuk dipersembahkan sebagai pengingat tentang arti penting *ecotourism* bagi masyarakat di Lereng Merapi, terutama bagi mereka yang berada di: (1) Dusun Pangukrejo, Desa Umbulharjo; (2) Dusun Pelemsari, Desa Umbulharjo; (3)

Dusun Petung, Desa Kepuharjo; (4) Dusun Kaliadem, Desa Kepuharjo; (5) Dusun Jambu, Desa Kepuharjo; dan (6) Dusun Kopeng, Desa Kepuharjo.

Buku ini berawal dari “Laporan Pelaksanaan Profiling Dusun di Lokasi Konsolidasi Tanah Lereng Merapi”. Keinginan untuk memberi nilai tambah, akhirnya melahirkan buku “*Ecotourism* Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah”. Data yang terdapat dalam profiling dusun, setelah diolah diletakkan pada Bab IV buku ini. Sementara itu, sistematika buku ini, sebagai berikut: (1) Bab I berisi uraian tentang bencana Merapi dan respon masyarakat terhadapnya. (2) Bab II berisi uraian tentang konsolidasi tanah. (3) Bab III berisi uraian tentang *ecotourism*. (4) Bab IV berisi uraian tentang potensi Lereng Merapi, yang merupakan hasil olahan data yang terdapat dalam “Laporan Pelaksanaan Profiling Dusun di Lokasi Konsolidasi Tanah Lereng Merapi”. (5) Bab V berisi uraian tentang strategi pengembangan *ecotourism*. (6) Bab VI berisi uraian tentang konsolidasi tanah sebagai respon, dan *ecotourism* sebagai solusi.

Oleh karena itu, ucapan terimakasih juga disampaikan kepada “Tim Profiling Lereng Merapi PPPM-STPN”, yang terdiri dari: (1) Supervisor, yaitu: Sutaryono, Senthot Sudirman, dan Aristiono Nugroho. (2) Tim Survai Dusun Pangukrejo, yaitu: Valentina Arminah, Slamet Wiyono, dan Sudibyanung. (3) Tim Survai Dusun Pelemsari, yaitu: Slamet Muryono, Wisnuntoyo, dan Priyo Katon Prasetyo. (4) Tim Survai Dusun Petung, yaitu: Rochmat Martanto, Tullus Subroto, dan Wahyuni. (5) Tim Survai Dusun Kaliadem, yaitu: Sukayadi, Antonius Sriyono,

dan Dwi Wulan Titik Andari. (6) Tim Survai Dusun Jambu, yaitu: Ig. Indradi, Haryo Budhiawan, dan Arief Syaifullah. (7) Tim Survai Dusun Kopeng, yaitu: Tjahjo Arianto, Rakhmat Riyadi, dan Yahman. (8) Editor Laporan, yaitu: Aristiono Nugroho.

Buku ini juga ingin mengingatkan arti penting konsolidasi tanah, yang merupakan respon atas terjadinya bencana Gunung Merapi, yang pada tanggal 26 Oktober 2010 memasuki tahap erupsi. Letusan terjadi pada pukul 17.02 WIB, yang sedikitnya ada 3 (tiga) kali letusan yang menyemburkan material vulkanik (gunung api) setinggi 1,50 kilometer, serta diiringi keluarnya awan panas. Letusan berlanjut hingga pada tanggal 27 Oktober 2010, dan lava pijar dimuntahkan pada tanggal 28 Oktober 2010 yang diikuti keluarnya awan panas pada pukul 19.54 WIB.

Konsolidasi tanah di Desa Kepuharjo dan Desa Umbulharjo diawali oleh adanya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09/KEP-34.400/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Penunjukan Lokasi Kegiatan Sertifikasi Konsolidasi Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014. Keputusan inilah yang menjadi dasar petugas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam menetapkan Desa Kepuharjo dan Desa Umbulharjo sebagai lokasi konsolidasi tanah.

Setelah melalui proses yang membutuhkan dana dan tenaga (sumberdaya manusia), akhirnya konsolidasi tanah di Lereng Merapi berhasil dilakukan, dengan cakupan: (1)

Dusun Pengukrejo, Desa Umbulharjo, sebanyak 486 bidang.
(2) Dusun Pelemsari, Desa Umbulharjo, sebanyak 167 bidang.
(3) Dusun Petung, Desa Kepuharjo, sebanyak 325 bidang.
(4) Dusun Kaliadem, Desa Kepuharjo, sebanyak 301 bidang.
(5) Dusun Jambu, Desa Kepuharjo, sebanyak 212 bidang. (6)
Dusun Kopeng, Desa Kepuharjo, sebanyak 203 bidang.

Perlu diingat, bahwa letusan Gunung Merapi yang diawali oleh 2 kali gempa vulkanik, menimbulkan kepanikan masyarakat di lereng Merapi, terutama Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Masyarakat berupaya menyelamatkan diri dari bencana Gunung Merapi. Salah satu penyebab bergegasnya masyarakat dari area bencana adalah adanya awan panas Gunung Merapi, yang disebut “Wedhus Gembel”, yang disertai hujan abu dan lumpur.

Bencana Merapi atau bencana alam akibat erupsi Gunung Merapi, telah mengundang simpati banyak pihak, dan menguatkan itikad baik Pemerintah untuk memberdayakan dan membantu masyarakat di Lereng Merapi. BPN RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) menunjukkan itikad baiknya kepada masyarakat di Lereng Merapi melalui jajarannya, yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dengan menyelenggarakan konsolidasi tanah.

Jumat, 6 Maret 2015, akhirnya peserta konsolidasi tanah di Lereng Merapi memperoleh sertipikat hak atas tanah, yang diserahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional di dampingi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Fery Mursidan Baldan, mengungkapkan bahwa konsolidasi tanah di Lereng Merapi dapat menjadi contoh dalam menangani daerah bencana.

Konsolidasi tanah merupakan “titik awal” untuk membangun kawasan, dan sekaligus basis penghidupan bagi masyarakat. Oleh karena sumberdaya yang ada di Lereng Merapi (wilayah konsolidasi tanah) mampu mendukung kegiatan pariwisata, maka hal paling rasional (logis) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, adalah dengan melaksanakan *ecotourism* di Lereng Merapi pasca konsolidasi tanah.

Ecotourism merupakan solusi atas dinamika alam (kondisi fisik), serta dinamika ekonomi, sosial, dan budaya Lereng Merapi. Sebagai bagian dari kegiatan wisata, maka *ecotourism* bermanfaat dalam hal: **Pertama**, meningkatkan pendapatan masyarakat di Lereng Merapi, membuka kesempatan kerja, mendorong munculnya kegiatan-kegiatan penunjang, dan kegiatan sampingan lainnya. **Kedua**, memperkenalkan dan mendayagunakan potensi lingkungan di Lereng Merapi, yang meliputi kondisi alam, sosial, ekonomi, dan budaya.

Yogyakarta, 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Merapi: Antara Pesona dan Ancaman Bahaya	1
B. Bangkit Membangun Masa Depan	11
BAB II : KONSOLIDASI TANAH PARTISIPATIF DI LERENG MERAPI	41
A. Penataan Kawasan Melalui Konsolidasi Tanah	41
B. Kerja Kolaboratif dalam Konsolidasi Tanah	60
BAB III : <i>ECOTOURISM</i> LERENG MERAPI	90
A. <i>Ecotourism</i> : Sebuah Strategi Penghidupan	90
B. Langkah Awal <i>Ecotourism</i>	110
BAB IV : KONSOLIDASI POTENSI LERENG MERAPI	122
A. Pangukrejo: Awal Mula <i>Lava Tour</i>	122
B. Pelemsari: Wilayah Di Antara Dua Sungai	131

C. Petung: Embrio Desa Wisata	149
D. Kaliadem: Dusun Di Tepi Taman Nasional	158
E. Jambu: Mengharmonikan Agrowisata Di Sisi Pertambangan Pasir	172
F. Kopeng: Respon Ketiadaan Sawah	188
BAB V : STRATEGI PENGEMBANGAN ECOTOURISM	195
A. Optimalisasi Hasil Konsolidasi Tanah	195
B. Pengembangan Kelembagaan	198
C. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya	205
BAB VI : PENUTUP	232
A. Konsolidasi Tanah Sebagai Respon	232
B. <i>Ecotourism</i> Sebagai Solusi	234
DAFTAR PUSTAKA	236

BAB I

PENDAHULUAN

A. Merapi: Antara Pesona dan Ancaman Bencana

Eksotisme Gunung Merapi tidak ada yang menyangsikan. Gunung dengan ketinggian mencapai 2.968 m dpl ini, merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ini dikenal dunia karena memiliki keunikan dibanding gunung-gunung api lain di dunia. Keunikan tersebut di antaranya adalah: (1) tipe letusan yang relatif sering (siklusnya empat tahunan), (2) lereng yang dihuni oleh banyak penduduk, (3) kesuburan tanahnya yang tinggi dan (4) masyarakat dengan kearifan lokalnya yang khas (Wikipedia, 2015). Oleh karena itulah, Gunung Merapi mempunyai pesona yang luar biasa, baik bagi para peneliti kegunungapian, maupun para pelancong yang ingin menikmati keindahan dan kesejukannya.

Selain keunikannya yang mempesona, Gunung Merapi menyimpan ancaman bencana yang sangat berbahaya.

Gunung ini mengalami erupsi (puncak keaktifan) setiap dua sampai lima tahun sekali. Hal ini sangat berbahaya mengingat di sekelilingnya terdapat pemukiman yang padat. Gunung Merapi sepanjang sejarah telah mengalami beberapa kali erupsi, baik besar maupun kecil yang berdampak pada kerusakan ekosistem di sekitarnya. Sejak tahun 1900-an tercatat lebih dari 20 kali erupsi besar, seperti pada tahun 1930, 1961, 1969, 1994, 1997, 2001, 2006 dan 2010. Erupsi pada tahun 2010 merupakan erupsi terbesar sejak tahun 1872 (Wahyunto & Wasito, 2013).

Pada tanggal 20 September 2010, status Gunung Merapi dinaikkan dari normal menjadi waspada. Status kemudian berubah menjadi 'siaga' pada tanggal 21 Oktober 2010 pukul 18.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), yang kemudian meningkat menjadi 'awas' pada tanggal 25 Oktober 2010 pukul 06.00 WIB. Akhirnya pada tanggal 26 Oktober 2010, Gunung Merapi memasuki tahap erupsi. Letusan terjadi pada pukul 17.02 WIB, yang sedikitnya terdapat 3 (tiga) kali letusan yang menyemburkan material vulkanik (gunung api) setinggi 1,50 kilometer, serta diiringi keluarnya awan panas. Letusan berlanjut hingga pada tanggal 27 Oktober 2010. Lava pijar dimuntahkan pada tanggal 28 Oktober 2010 yang kemudian diikuti keluarnya awan panas pada pukul 19.54 WIB (Wikipedia, 2015).

Letusan Gunung Merapi yang diawali oleh 2 kali gempa vulkanik, menimbulkan kepanikan masyarakat di lereng Merapi, terutama Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Masyarakat

berupaya menyelamatkan diri dari bencana Gunung Merapi. Salah satu penyebab bergegasnya masyarakat dari area bencana adalah adanya awan panas Gunung Merapi (*wedhus Gembel*) yang disertai hujan abu dan lumpur.

Masyarakat Lereng Merapi bergegas menyelamatkan diri dengan membawa apapun yang mampu diangkutnya. Sebagian masyarakat berlarian menuju tempat pengungsian. Sementara itu, sebagian masyarakat lainnya bergegas berkendara menuju tempat pengungsian, ada yang menggunakan kendaraan sendiri, tetapi ada pula yang menumpang *truck* yang disediakan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI (Polisi Republik Indonesia).

Di lokasi yang relatif aman Pemerintah Daerah telah membangun beberapa posko (tempat pengungsian), yang dilengkapi dengan tenaga medis (dokter, perawat, dan psikolog), tenaga non medis (polisi, tentara, dan tim logistik), serta relawan dari banyak kalangan. Kondisi kesehatan para pengungsi, logistik, sarana dan prasarana, penyaluran bantuan, gizi para pengungsi, dan regulasi relawan merupakan beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku dan pelaksana di posko-posko ini.

“Jangan kecewa” begitu nasehat bijak yang diberikan para sesepuh (orang-orang tua), ketika ada sebagian pengungsi yang nampak bersedih atas terjadinya bencana erupsi Gunung Merapi. Kecewa tidak layak dimunculkan dalam situasi darurat, karena akan mengurangi semangat mengatasi bencana. Sebaliknya optimisme harus terus ditampilkan, karena negara (Republik Indonesia) memiliki mekanisme

penanggulangan bencana. Beberapa pakar hukum menyebut dengan jelas adanya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan undang-undang ini telah ditetapkan bahwa, dalam hal bencana, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertugas untuk melakukan manajemen bencana yang meliputi: **Pertama**, prevensi, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan upaya mengukur dan memperkirakan bencana, serta upaya mengurangi ancaman bencana. Kegiatan ini membangkitkan optimisme, karena para ahli bersinergi memperhitungkan beberapa potensi risiko, dan dampaknya bagi masyarakat. Optimisme muncul karena terbuka “ruang” persiapan bagi masyarakat untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar. Pada level daerah juga telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang diberi otoritas dalam hal penanggulangan bencana di daerah.

Kedua, mitigasi, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan upaya mengurangi risiko bencana, melalui pembangunan fasilitas fisik serta kesadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kegiatan ini membangkitkan optimisme, karena banyak pihak berkesempatan membantu untuk mereduksi risiko bencana. Upaya mereduksi risiko bencana dikemas dalam bentuk penyiapan fasilitas fisik, dan dalam bentuk penyiapan pola pikir (*mindset*) dan pola budaya (*cultural-set*) yang disebut dengan “penyadaran”.

Ketiga, *preparedness* (kesiap-siagaan), yaitu kegiatan yang berkaitan dengan upaya mengantisipasi bencana.

Kegiatan ini membangkitkan optimisme, karena dalam kondisi siap siaga maka keinginan untuk mengurangi risiko bencana dapat mewujudkan. *Preparedness* meliputi kesiap-siagaan fisik, yang berupa berbagai fasilitas fisik menghadapi bencana; maupun yang berupa kesiap-siagaan non fisik, yang berupa pola pikir dan pola budaya yang telah sadar bencana.

Keempat, *response*, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan upaya tanggap darurat saat terjadi bencana, untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana. Kegiatan ini membangkitkan optimisme, karena telah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh sebelum terjadinya bencana. *Response* atas bencana yang terjadi juga semakin menguatkan solidaritas, serta rasa senasib dan sepenanggungan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya para relawan, dan berbagai bantuan dari banyak pihak yang kadangkala lebih memilih menyembunyikan identitasnya.

Kelima, *recovery*, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan upaya rehabilitasi fungsi kelembagaan, prasarana, dan sarana di lokasi bencana, untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup. Kegiatan ini membangkitkan optimisme, karena nampak pemerintah bersungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatunya, agar bencana yang menimpa tidak terlalu parah diderita oleh masyarakat.

Keenam, *development*, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan upaya pengembangan dan modernisasi penanganan bencana. Kegiatan ini membangkitkan optimisme, karena banyaknya para ahli dan perguruan tinggi yang bersedia berkontribusi. Upaya melakukan pengembangan konsep,

strategi, dan operasionalisasi penanggulangan bencana memang menjadi ranah para ahli dan perguruan tinggi, karena mereka memiliki kompetensi untuk kegiatan itu.

Berbagai optimisme dalam penanggulangan bencana muncul setelah mengerti, bahwa sepanjang segala sesuatunya telah disiapkan dengan baik, maka manusia berhak bertawakal (berserah diri) pada Tuhan Yang Maha Melindungi. Bila persiapan tidak optimal, maka Tuhan Yang Maha Melindungi tentu tidak akan “sungguh-sungguh” melindungi. Oleh karena itu, “persiapan” menjadi “kata kunci” (*key word*) dalam penanggulangan bencana. Dalam konteks Indonesia, persiapan dan penanggulangan bencana dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab BNPB, dan pada level daerah menjadi tanggungjawab BPBD.

Hal ini berdasarkan ketentuan undang-undang, yang menunjuk lembaga (instansi) khusus yang menangani bencana, yaitu BNPB dan BPBD, agar bila terjadi bencana dapat ditanggulangi dengan baik. Hanya saja dalam kasus erupsi Gunung Merapi tahun 2010 ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu: **Pertama**, tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana yang masih membutuhkan pembinaan, agar masyarakat semakin sadar bencana, sehingga memudahkan proses pengungsian atau evakuasi sebelum terjadinya bencana. Meskipun begitu optimisme tetap muncul, karena pada kenyataannya terjadi perubahan pola pikir dan pola budaya masyarakat di Lereng Merapi, yang semakin menunjukkan bahwa mereka bertambah paham atas erupsi Gunung Merapi, dampak yang ditimbulkan, dan cara

menanggulangnya.

Kedua, ketegasan pihak pemerintah yang masih perlu ditingkatkan, agar mampu “memaksa” masyarakat mengungsi sebelum bencana terjadi. Meskipun begitu optimisme tetap muncul, karena pada kenyataannya terjadi perubahan pada sikap pemerintah berupa semakin sadarnya mereka tentang arti penting keselamatan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketegasan, kecermatan, dan kehati-hatian pemerintah, khususnya TNI dan POLRI, dalam menjaga daerah bencana.

Ketiga, aktivitas seismik Gunung Merapi yang dimulai pada akhir September 2010 yang berpuncak pada letusan 26 Oktober 2010 telah menewaskan 353 orang, termasuk tokoh adat (jurukunci Gunung Merapi), Mbah Maridjan. Meskipun begitu optimisme tetap muncul, karena masyarakat semakin sadar tentang perlunya mewaspadaai Gunung Merapi, terutama dalam menghadapi erupsinya. Bagi masyarakat Lereng Merapi, Mbah Maridjan merupakan tokoh yang terus dihormati hingga saat ini, yang menginginkan keselamatan bagi masyarakat Lereng Merapi.

Optimisme atas penanggulangan bencana di kemudian hari tidak boleh hanya berada di ranah wacana. Para pelaksana penanggulangan bencana wajib memperhatikan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat; karena semua itu menentukan “kecepatan” penanggulangan bencana. Salah satu aspek yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan relevan dengan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, adalah aspek pertanahan. Aspek pertanahan

merupakan basis berpijak dan modal awal dalam rehabilitasi pasca bencana, dan sekaligus titik masuk (*entry point*) untuk mengembangkan kembali penghidupan masyarakat, yang terkoyak oleh bencana.

Penanganan bencana tidak boleh melupakan aspek pertanahan, karena selain aspek ini penting bagi masyarakat, ia juga berkaitan dengan prospek kehidupan di kemudian hari. David Mitchell (2011:69) mengungkapkan tentang pentingnya manajemen pertanahan selama fase awal pemulihan (*early recovery phase*), terutama pada 6 (enam) minggu pertama. Pada fase ini diperlukan manajemen pertanahan, berupa: **Pertama**, memperhitungkan secara detail *issue* pertanahan yang berkaitan dengan penghidupan (*livelihood*) masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tempat hunian sementara (*shelter*).

Kedua, melakukan pemetaan atas tanah yang bebas bencana dan yang berisiko terkena bencana. Kegiatan ini menimbulkan optimisme dalam penanggulangan bencana, karena para pelaksana penanggulangan bencana (BNPB dan BPBD) dapat mengetahui sejak dini wilayah yang berpotensi mengalami bencana, sehingga memudahkan dalam menyusun dan membangun kesiap-siagaan. Sementara itu, bagi wilayah yang bebas bencana dan letaknya berdekatan dengan wilayah bencana dapat menjadi tujuan pengungsian dan relokasi.

Ketiga, melakukan tindakan nyata dalam menekan atau mengurangi spekulasi dan pengambil-alihan atau perampasan tanah di lokasi yang terkena atau terdampak bencana. Kegiatan ini menimbulkan optimisme dalam penanggulangan bencana, karena menjunjung tinggi prinsip perlindungan

dan pencegahan atas terjadinya “kejahatan pertanahan” yang menimpa para korban bencana. Kejahatan pertanahan perlu diantisipasi melalui kesiapan administrasi pertanahan, yang mampu mendeteksi spekulasi dan pengambil-alihan atau perampasan tanah.

Keempat, melakukan koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah dengan lembaga kemanusiaan, dan antara lembaga pertanahan dengan lembaga yang mengelola manajemen kedaruratan. Kegiatan ini menimbulkan optimisme dalam penanggulangan bencana, karena tidak ada satu instansi pun yang akan mampu bertindak sendiri dalam menanggulangi bencana. Oleh karena itu, kerjasama atau sinergi antar instansi (termasuk instansi pertanahan) merupakan kebutuhan yang nyata. Kerjasama instansi pertanahan, lembaga kemanusiaan, dan instansi pengelola manajemen kedaruratan akan mempercepat proses penanggulangan bencana yang sedang dihadapi masyarakat.

Manajemen pertanahan selama fase awal pemulihan (enam minggu pertama) memberi kesempatan kepada instansi pertanahan untuk berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku tertentu yang relevan dengan semangat penanggulangan bencana. Kesempatan ini dimaknai sebagai pemberian tanggung-jawab kepada instansi pertanahan atas kondisi pertanahan di wilayah bencana. Dalam konteks Indonesia, tanggung-jawab ini ada pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI).

Oleh karena itu, BPN RI wajib melakukan empat hal sebagaimana disarankan oleh David Mitchell, agar aspek

pertanahan mampu memberi kontribusi optimal dalam penanggulangan bencana. Namun demikian setelah pemulihan ini selesai dilakukan, maka giliran instansi lain untuk “menggigit” semangat masyarakat, agar kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat dapat marak kembali. Kurnianto (2008:84) menyarankan dilakukannya pemberdayaan, dengan asumsi bila ada sebagian masyarakat yang tidak (belum) maju, maka hal itu bukan karena mereka bodoh, melainkan boleh jadi karena adanya tekanan struktural. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang bersifat *bottom-up*, holistik, otonom, akomodatif, dan dialogis terhadap berbagai kepentingan, terutama kepentingan masyarakat. Orientasinya diletakkan pada pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berkreasi dan berpartisipasi, dengan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Saat itulah dibutuhkan pelayanan yang baik dari birokrasi kepada masyarakat, agar muncul implikasi berupa lahirnya masyarakat yang kritis dan penuh inisiatif.

BPN RI, BNPB, Pemerintah Daerah dan instansi atau lembaga lainnya perlu terus berikhtiar memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat yang terkena bencana, agar mereka dapat segera pulih, dan mampu memperjuangkan kepentingan alam, ekonomi, sosial, dan budayanya sendiri. Pelayanan ini tidak boleh hanya didasarkan pada prinsip “kalau ingat”, melainkan harus selalu diingat, bahwa BPN RI, BNPB, Pemerintah Daerah dan instansi atau lembaga lainnya wajib memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat yang terkena bencana, mulai saat tanggap darurat hingga tahap rekonstruksi dan rehabilitasi.

B. Bangkit Membangun Masa Depan

Manajemen pertanahan selama fase awal pemulihan (6 minggu pertama) merupakan kegiatan penting, bagi masyarakat di Lereng Merapi. Kegiatan yang bernuansa pengetahuan ini mampu memberikan dorongan dan harapan masyarakat di Lereng Merapi, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan masyarakat tentang urgensi optimalisasi pemanfaatan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengetahuan ini penting, karena berfungsi mendorong masyarakat agar bersedia mewariskan semangatnya dari generasi ke generasi. Selain itu juga perlu diketahui, bahwa pengetahuan bukanlah biaya sosial (*social cost*) yang merupakan pemborosan, tetapi merupakan investasi sosial (*social investment*) yang akan memberikan manfaat untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Berbekal pengetahuan yang memadai, maka masyarakat mampu membangun semangat “Bangkit Membangun Masa Depan”.

Pengetahuan ini memang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat, agar mereka lebih ringan menghadapi bencana erupsi Gunung Merapi dan dampak ikutannya. Ketika memiliki pengetahuan yang memadai, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk membangun kesadarannya. Dengan bekal pengetahuan tentang bencana, masyarakat mengetahui cara mempersiapkan diri dan menghindari serta menanggulangi bencana. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang optimisme di masa depan, atau sering disebut “semangat”, juga bermanfaat mengembalikan kesediaan mereka dalam memulihkan kondisi alam, ekonomi, sosial,

dan budaya. Semangat ini bermanfaat pula, untuk mencegah tiap anggota masyarakat dari marjinalisasi. Sutaryono (2013:246) menggunakan istilah “marjinalisasi individual” untuk menggambarkan anggota masyarakat yang mengalami marjinalisasi.

Ada kalanya sebagian masyarakat tidak menyangka kalau ia telah berada pada posisi marjinal. Ketidak-tahuan atas posisi ini, mengakibatkan mereka sulit melepaskan diri dari posisi marjinal. Oleh karena itu, tanpa disadari marjinalisasi terus berlangsung, dan sulit bagi pihak-pihak yang ingin membantu untuk melakukan demarjinalisasi. Ketika marjinalisasi berlangsung terhadap usaha pertanian yang berhubungan dengan persoalan-persoalan perseorangan, maka ia dikenali sebagai marjinalisasi individual.

Sutaryono (2013:246) menjelaskan, bahwa marjinalisasi individual merupakan kondisi petani yang termarginalkan, yang secara langsung disebabkan oleh adanya tekanan terhadap usaha pertanian, dan berhubungan dengan persoalan-persoalan perseorangan. Sutaryono juga mengungkapkan, hal ini direpresentasikan oleh komponen penguasaan lahan dan produksi lahan pertanian. Kedua komponen ini (penguasaan lahan dan produksi lahan pertanian) cenderung dipengaruhi oleh potensi dan kondisi individual petani yang bervariasi.

Dengan demikian marjinalisasi ditentukan oleh potensi dan kondisi individual petani, yang ketika dibuktikan memperlihatkan lapisan-lapisan sosial di masyarakat Lereng Merapi. Lapisan sosial terbawah diduduki oleh anggota masyarakat yang tidak memiliki tanah pekarangan dan tanah

sawah, yang dalam perspektif pemberdayaan perlu dibantu agar memiliki pendapatan yang memadai. Oleh karena itu, marjinalisasi individual patut “dilawan” dengan semangat, khususnya semangat “Bangkit Membangun Masa Depan”.

Semangat ini tidak ditandai dengan spanduk yang bertuliskan “Bangkit Membangun Masa Depan”, melainkan ditandai oleh segenap ikhtiar, upaya, dan kinerja masyarakat untuk bangkit menanggulangi bencana erupsi Gunung Merapi yang telah terjadi. Masyarakat juga bersungguh-sungguh menyongsong masa depan kehidupan diri, anak, dan keturunannya di masa yang akan datang, dengan menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemanfaatan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih baik. Hal ini relevan dengan upaya untuk melakukan *disaster risk reduction* (pengurangan risiko bencana), agar masyarakat dapat “bersahabat” dengan Gunung Merapi dan kawasannya.

David Mitchell (2011:16) mengungkapkan tentang tahapan dalam *disaster risk reduction*, yang terdiri dari: **Pertama**, tahap *pre-disaster*, terdiri dari: (1) *On going development activities*, yaitu pengembangan beberapa program (kegiatan) yang berkaitan dengan berbagai aspek dalam *disaster risk reduction*; (2) *Risk assessment*, yaitu proses *diagnostic* untuk mengenali atau mengidentifikasi risiko yang akan dijumpai oleh masyarakat; (3) *Prevention*, yaitu aktivitas untuk mencegah akibat yang lebih parah dari suatu bencana; (4) *Mitigation*, yaitu pengukuran terstruktur dan tidak terstruktur yang dibakukan untuk membatasi atau mencegah perluasan dampak bencana; (5) *Preparedness*, yaitu pengukuran dan

aktivitas yang digerakkan untuk mendorong munculnya berbagai respon positif atas bencana.

Tahap *pre-disaster* memberi kesempatan pada BNPB untuk mengembangkan beberapa kegiatan yang mampu menurunkan risiko bencana. Caranya dengan mengenali atau mengidentifikasi risiko yang akan dijumpai oleh masyarakat, dan mencegah akibat yang lebih parah dari suatu bencana. BNPB juga berwenang membatasi atau mencegah perluasan dampak bencana, dan mendorong munculnya berbagai respon positif atas bencana. Berdasarkan konsep yang diajukan David Mitchell, maka BNPB dan BPBD berpeluang memberdayakan masyarakat di wilayah bencana, dan mencegah rasa *nelongso* (sedih) anggota masyarakat yang terkena bencana.

Kedua, tahap *emergency response*, terdiri dari: (1) *Evacuation*, yaitu pemindahan massal dan penampungan sementara bagi masyarakat dan barang berharga milik mereka dari lokasi yang terancam bencana; (2) *Saving people and livelihoods*, yaitu tindakan proteksi bagi manusia (masyarakat) dan penghidupannya selama masa darurat; (3) *Immediate assistance*, yaitu bantuan yang diberikan setelah terjadinya bencana dan selama asistensi; (4) *Early recovery*, yaitu penilaian awal dan pembuatan desain *recovery* atau desain pemulihan.

Tahap *emergency response* akan memberi kesempatan pada BNPB dan BPBD untuk mengembangkan beberapa kegiatan, yang mampu memindahkan dan menampung masyarakat secara massal. Selain itu, BNPB dan BPBD berpeluang melakukan proteksi terhadap masyarakat di

wilayah bencana, dan membantu penghidupan masyarakat selama masa darurat. Konsep yang diajukan David Mitchell, juga memberi peluang pada BNPB dan BPBD untuk memberi bantuan dan asistensi pada masyarakat setelah terjadinya bencana, dan membuat desain pemulihan. Ketika BNPB dan BPBD mampu menjalankan fungsi sebagaimana konsep yang diajukan David Mitchell, maka masyarakat mampu *nyambut gawe* (bekerja) untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.

Ketiga, tahap *post disaster*, terdiri dari: (1) *On going assistance*, yaitu asistensi lanjutan yang diberikan, sampai berhasil ditentukan tingkat pemulihan yang dibutuhkan; (2) *Long term recovery*, yaitu beberapa tindakan yang dilakukan setelah terjadi bencana, termasuk tindakan pemukiman kembali dan relokasi; (3) *Economic and social recovery*, yaitu tindakan yang diambil untuk menormalkan kondisi ekonomi dan sosial; (4) *Reconstruction*, yaitu beberapa program pembangunan yang dilakukan secara terus menerus untuk mengatasi dampak bencana; (5) *Risk assesment*, yaitu proses *diagnostic* untuk mengidentifikasi beberapa risiko baru yang dapat dijumpai oleh masyarakat.

Tahap *post disaster* memberi kesempatan pada BNPB dan BPBD untuk mengembangkan kegiatan, berupa asistensi untuk memulihkan kondisi masyarakat di wilayah bencana. BNPB dan BPBD juga berwenang melakukan tindakan setelah terjadinya bencana, terutama yang berkaitan dengan pemukiman kembali dan relokasi, dengan tujuan untuk menormalkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat

di wilayah bencana. Oleh karena itu, BNPB dan BPBD berwenang mengatasi dampak bencana, dan mendiagnosa risiko baru yang berpeluang terjadi. Akhirnya konsep David Mitchell memberi kesempatan pada BNPB dan BPBD untuk memberdayakan masyarakat, terutama ketika mereka mampu “kongkon” (meminta tolong) pada anggota masyarakat untuk secara sukarela membangun kemandirian.

Berdasarkan elemen *disaster risk reduction* yang diungkapkan oleh David Mitchell diketahui, bahwa masyarakat merupakan unsur penting dalam *disaster risk reduction*. Masyarakat memainkan peran sebagai subyek, terutama dari aspek kesadarannya. Oleh karena itu, upaya untuk terus menerus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam *disaster risk reduction* wajib dilakukan. Kesadaran mendorong masyarakat untuk mengerti, bahwa bencana dapat dikurangi atau ditekan risikonya, bila mereka memiliki ilmu dan pengetahuan yang cukup tentang hal itu.

Berbekal kesadaran yang berbasis ilmu dan pengetahuan yang memadai tentang bencana, maka masyarakat Lereng Merapi akan bersedia *rekoso* (bekerja keras) mengantisipasi dan menanggulangi bencana. Kerja keras diwujudkan dalam bentuk kesediaan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesiapan merespon bencana, dan kesiapan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Namun demikian perlu diketahui, bahwa tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana, membutuhkan pembinaan yang serius. Hal ini perlu dilakukan, agar

masyarakat semakin sadar bencana, sehingga memudahkan proses pengungsian atau evakuasi sebelum terjadinya bencana. Kesadaran ini juga meliputi kesiapan mengatasi dampak erupsi Gunung Merapi, berupa semangat “Bangkit Membangun Masa Depan”. Nugroho, dkk. dalam buku “Tanah Hutan Rakyat: Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong” (2014:146) menjelaskan, bahwa kesadaran muncul melalui proses psiko-sosial, yang berlangsung pada masing-masing anggota masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan tanah hutan rakyat. Proses psiko-sosial yang berlangsung melibatkan aspek sosio-ekonomi dan aspek sosio-ekologi yang mengalami internalisasi.

Dalam konteks Lereng Merapi, berpeluang terjadi proses psiko-sosial pada masing-masing anggota masyarakat, yang terlibat dalam pengelolaan tanah hutan rakyat. Hal ini dikarenakan, hutan rakyat juga “mewarnai” kondisi alam Lereng Merapi, yang memberi manfaat pada anggota masyarakat yang mengelolanya berupa hati yang tenang dan damai. Hati mereka damai, sebab telah berkontribusi dalam melestarikan kondisi alam Lereng Merapi, bahkan mengembangkan dan meningkatkan kualitas ekologi menjadi lebih asri.

Kesadaran tentang kontribusi ekologi ini, selanjutnya mendorong masyarakat, untuk memberdayakan dirinya sendiri. Upaya ini menjadikan mereka mampu berperan sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, karena hidupnya yang mandiri, dan tidak tergantung pada “belas kasih” pihak lain. Melalui semangat kemandirian, masyarakat juga merancang manfaat

atas segenap potensi yang dimilikinya. Terbentuklah masyarakat yang dinamis dan progresif secara berkelanjutan, yang didasari oleh motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam diri mereka.

Semangat “Bangkit Membangun Masa Depan” merupakan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat, caranya dengan membangun pertanian yang lebih baik, usaha (*business*) yang lebih baik, dan akhirnya hidup yang lebih baik. Hal ini dilakukan masyarakat, karena mereka sering sakit hati ketika dipandang sebagai beban. Padahal mereka memiliki potensi yang besar untuk berdaya dan mandiri. Oleh karena itu, berbekal semangat yang dimilikinya masyarakat berupaya “menatap” masa depannya.

Semangat ini pulalah yang menjadikan masyarakat lebih pandai dan lebih ramah dalam menerima dinamika vulkanik Gunung Merapi. Akibatnya masyarakat terbuka bagi segala bentuk pemikiran dan gagasan yang mampu merespon kondisi alam di Lereng Merapi, untuk selanjutnya dijadikan basis dalam membangun kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih baik. Ketika keterbukaan ini muncul, maka program konsolidasi tanah menjadi “buah” atas segenap harapan, bagi hadirnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih baik dan lebih menyejahterakan.

Kini saatnya masyarakat Lereng Merapi berupaya menata penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Konsolidasi tanah Lereng Merapi merupakan bentuk respon yang tepat atas kebutuhan masyarakat tersebut. Ketika konsolidasi tanah dilaksanakan, maka masyarakat dilibatkan

dalam proses penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan atas tanah yang mereka miliki. Saat itulah makna partisipatoris menyeruak masuk dalam kegiatan yang urgen bagi masyarakat Lereng Merapi. Sebagai sebuah kegiatan konsolidasi tanah di wilayah bencana, maka pelaksanaannya layak memperhatikan seruan David Mitchell.

Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa David Mitchell (2011:70) menyerukan tentang perlunya memperhatikan indikasi kegiatan yang berkaitan dengan pertanahan pada fase awal pemulihan, sebagai berikut: **Pertama**, dalam konteks pemulihan penghidupan dan pendapatan, ada beberapa aktivitas yang perlu dilakukan, yaitu: (1) Melakukan penaksiran secara cepat atas kapasitas, kebutuhan, dan dampak akibat bencana terutama atas sumberdaya ekonomi lokal dan peluang penghidupan, yang meliputi analisis dan survai pasar tenaga kerja, termasuk aspek pertanahannya; (2) Menyiapkan peta kondisi pertanian dan situasi lingkungan sebelum terjadinya bencana, mengupayakan peta kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan, dan mengembangkan atau memperbarui peta kadasteral; (3) Memperkirakan dan merancang kapasitas terbangun lembaga pertanahan dalam mengelola kawasan bencana.

Konteks pemulihan penghidupan dan pendapatan memberi kesempatan pada BPN RI untuk mengembangkan kegiatan, yang mampu menaksir (memperkirakan) kapasitas, kebutuhan, dan dampak bencana terhadap sumberdaya ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat setempat, terutama dalam kaitannya dengan pertanahan. Selain itu BPN

RI juga berkesempatan menyiapkan berbagai peta seperti: (1) peta kondisi pertanian dan situasi lingkungan sebelum dan setelah terjadinya bencana; (2) peta kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan; dan (3) peta kadasteral. Sementara itu, untuk mengantisipasi bencana di kemudian hari, BPN RI perlu merancang unsur kelembagaannya yang mampu mengelola pertanahan kawasan bencana.

Kedua, dalam konteks pelayanan sosial (*social services*), ada beberapa aktivitas yang perlu dilakukan, yaitu: (1) Merancang kemampuan dan keberlanjutan akses masyarakat ke kantor pertanahan dan instansi pelayanan lainnya; (2) Membangun kapasitas masyarakat dan komunitas dalam mengakses pelayanan administrasi pertanahan (misal: registrasi tanah), dan berupaya memelihara pelayanan yang telah ada, dengan mengurangi biaya pelayanan dan meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanannya; (3) Mempromosikan edukasi dasar bagi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak atas tanah perorangan, karena berpengaruh pada psiko-sosial masyarakat dan untuk mengurangi konflik pertanahan; (4) Mengakui alat bukti yang dimiliki masyarakat meskipun belum tepat benar, dan mengintegrasikannya dalam sistem tanah nasional.

Konteks pelayanan sosial memberi kesempatan pada BPN RI untuk mengembangkan kegiatan, yang mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam hal akses mereka ke kantor pertanahan. Untuk itu BPN RI perlu membangun kapasitas masyarakat agar mampu mengakses pelayanan administrasi pertanahan. Seiring dengan itu BPN RI berupaya meningkatkan

pelayanan yang telah ada, dan mengurangi biaya pelayanan. Sementara itu, dalam rangka kepentingan jangka panjang, BPN RI perlu melakukan edukasi dasar bagi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak atas tanah. Bersamaan dengan itu, dalam konteks kedaruratan, BPN RI hendaknya dapat mengakui alat bukti yang dimiliki masyarakat, yang boleh jadi belum tepat, sambil terus berupaya sedapat mungkin mengintegrasikannya dalam sistem tanah nasional.

Ketiga, dalam konteks perpindahan, pengembalian dan penggabungan (*displacement, return, and reintegration*), ada beberapa aktivitas yang perlu dilakukan, yaitu: (1) Mendukung kewenangan pemerintah dalam merencanakan pengembalian dan pengintegrasian penduduk (masyarakat), serta memprioritaskan penetapan areal bagi penempatan penduduk, yang diprakarsai oleh para aktor pembangunan dan kemanusiaan pada fase pengembalian, di mana para ahli pertanahan wajib memberi masukan bagi *issue* pertanahan; (2) Memberi dukungan bagi diselenggarakannya *profiling*, survai, dan sensus penduduk; (3) Membantu masyarakat yang berada di tempat lain, menyiapkan areal tempat tinggal, dan merencanakan pengembaliannya agar dapat diterima masyarakat setempat; (4) Mendukung proses pengembalian dan reintegrasi, mempromosikan penghidupan, membangun kapasitas dan kemampuan merespon yang berbasis masyarakat; (5) Memprakirakan dimensi lingkungan pada pelaksanaan pengembalian dan reintegrasi penduduk, serta mengidentifikasi tindakan pencegahan dan respon atas pandangan masyarakat dan penguasa.

Konteks perpindahan, pengembalian dan penggabungan bidang-bidang tanah memberi kesempatan pada BPN RI untuk mengembangkan kegiatan, yang berupa rencana pengembalian dan pengintegrasian masyarakat, dalam suatu areal penempatan. Hal ini layak dilakukan karena menjadi kewajiban BPN RI untuk mengatasi *issue* pertanahan dalam kondisi darurat bencana. Selain itu, BPN RI juga wajib menyiapkan kegiatan yang mampu membantu masyarakat yang berada di tempat lain, dengan menyiapkan areal tempat tinggal, dan merencanakan pengembaliannya agar dapat diterima masyarakat setempat. Seiring dengan itu, BPN RI perlu melakukan kegiatan yang mampu memprakirakan dimensi pertanahan pada pelaksanaan pengembalian dan reintegrasi penduduk.

Keempat, dalam konteks tanah dan properti, ada beberapa aktivitas yang perlu dilakukan, yaitu: (1) Melakukan analisis atas situasi tanah dan properti; (2) Melindungi register tanah dan properti saat terjadi keadaan darurat; (3) Melakukan indentifikasi atas hukum dan regulasi pokok yang berkaitan dengan tanah dan properti; (4) Mendefinisikan ketentuan adat, untuk kemudian dijadikan hukum formal, sehingga bila terjadi sengketa dapat diproses di pengadilan; (5) Membangun kemampuan agar dapat merancang mekanisme restitusi; (6) Memberi bantuan hukum dan dokumentasi atas hak-hak masyarakat; (7) Mengenali kebutuhan masyarakat bagi pengelolaan properti melalui mekanisme resolusi, serta mendukung respon bagi kewenangan masyarakat di tingkat lokal, penguasa lokal, dan tingkat nasional.

Konteks tanah dan properti, memberi kesempatan pada BPN RI untuk mengembangkan kegiatan, yang mampu menganalisis situasi tanah dan properti di wilayah bencana, dengan melindungi register tanah dan properti saat terjadi keadaan darurat. Selain itu, BPN RI juga berkesempatan mengidentifikasi kondisi hukum yang berkaitan dengan tanah dan properti, termasuk memperhatikan ketentuan adat yang dapat dijadikan hukum formal agar dapat diproses di pengadilan. Seiring dengan itu, BPN RI perlu mempertimbangkan mekanisme restitusi, serta memberi bantuan hukum bagi masyarakat.

Untuk itu masyarakat sangat berharap atas kinerja BPN RI yang responsif bencana. Saat hal ini terjadi, maka masyarakat dapat bersungguh-sungguh mengadopsi beberapa teknik produksi dan pemasaran, agar mampu menggapai peningkatan pendapatan. Masyarakat juga perlu memperbaiki posisi tawar, terutama dalam pengambilan keputusan dan konsistensi implementasi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Dengan demikian melalui semangat yang ada, masyarakat mampu mempercepat perbaikan kondisi alam, sosial, ekonomi, dan budaya agar lebih ramah terhadap dinamika alam (wilayah gunung api).

Semangat yang dimiliki masyarakat berdampak pada perilaku dan kesediaan mereka untuk meningkatkan interaksi dengan para aktor (*stakeholders*), agar mampu mengoptimalkan aksesibilitas terhadap informasi. Hal ini penting, karena dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan

sosialnya. Inilah kemandirian otentik, yang tidak “memusuhi” bantuan dari luar, yaitu kemandirian yang membuka diri terhadap “bantuan” pihak luar sepanjang bermanfaat.

Berebel semangat yang kuat untuk merespon bencana, masyarakat Lereng Merapi fokus pada upaya memberdayakan diri. Ada satu hal penting yang mereka perjuangkan, yaitu hidup sejahtera, yang membutuhkan kerja keras, cerdas, dan ikhlas. Ketika ada kesempatan mendapat fasilitas pemberdayaan dari berbagai pihak, masyarakat Lereng Merapi menerima dengan senang hati, dengan tetap mempersiapkan diri agar tidak mengalami ketergantungan. Kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya merupakan potensi yang terus dijajaki peluang pemanfaatan optimalnya. Kata kuncinya adalah semangat yang responsif terhadap bencana dalam bingkai kemandirian.

Kemandirian masyarakat Lereng Merapi yang lekat dengan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya, memiliki nuansa sosio-ekonomi dan sosio-ekologi. Aristiono Nugroho, dkk. (2014:166) menjelaskan, bahwa gairah sosio-ekonomi dan sosio-ekologi yang dijalani masyarakat melalui berbagai strategi *livelihood*, membutuhkan inisiatif masyarakat yang tepat ukuran (tidak berlebihan dan tidak berkekurangan). Inisiatif yang berlebihan akan mengakibatkan terjadinya mal-adaptasi (adaptasi keliru), sebaliknya inisiatif yang berkekurangan menghasilkan situasi *ruthlessness* (tidak peduli). Sementara itu, sikap inisiatif masyarakat yang tepat ukurannya, akan memperlihatkan ketegaran masyarakat, terutama ketika menghadapi tantangan dan hambatan yang menghalangi kesejahteraannya.

Inisiatif yang tepat telah diupayakan oleh masyarakat Lereng Merapi, mereka berupaya merespon bencana secara proporsional, tanpa menyalahkan pihak manapun. Inisiatif ini diperlihatkan oleh masyarakat Lereng Merapi dalam bentuk yang memang nyata, yaitu ketegaran mereka ketika menghadapi tantangan dan hambatan yang menghalangi kesejahteraannya. Ketegaran yang diperlihatkan oleh masyarakat, merupakan bukti atas keberdayaan yang ada pada dirinya, serta adanya kemandirian yang menjadi bingkainya.

Dengan demikian kemandirian masyarakat di Lereng Merapi beriringan dengan keberdayaan, terutama hasil pemberdayaan (*empowerment*) yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Pemberdayaan ini pada salah satu sisinya juga menysasar kemiskinan, melalui berbagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, ikhtiar ini juga dikenali sebagai upaya pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*). Masyarakat Lereng Merapi dapat terbebas dari kemiskinan, dan hidup layak sesuai dengan kebutuhan hidupnya, karena adanya pemberdayaan dan keberdayaan. Hal ini disebabkan beberapa tokoh masyarakat telah menggalakkan peluang (*promoting opportunity*), dan memfasilitasi pemberdayaan (*facilitating empowerment*), serta meningkatkan jaminan sosial (*enhancing security*). Upaya-upaya semacam ini dalam perspektif *World Bank* (2001) disebut Strategi Trisula (*Three-pronged Strategy*).

Strategi Trisula diterapkan secara lambat laun (perlahan-lahan) di Lereng Merapi, sehingga tidak menimbulkan gear budaya (*shock culture*) di masyarakat. Ketiadaan fenomena

orang bodoh mengaku sebagai orang yang pandai di kalangan masyarakat, semakin memudahkan pemberdayaan masyarakat Lereng Merapi. Proses semakin lancar, ketika masyarakat bersedia terlibat dan berperan aktif dalam setiap peluang yang dibuka, serta fasilitasi yang diberikan, serta jaminan sosial yang terus meningkat.

Keberdayaan yang diikhtiarkan masyarakat di Lereng Merapi akhirnya dapat tercapai, ketika mereka melakukan proses memberikan daya (*empowerment*) atau kekuatan (*strengthening*) kepada diri mereka sendiri (masyarakat). Dengan proses ini dapat diperoleh kemampuan masyarakat dalam membangun dan memperbaiki kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya pasca erupsi Gunung Merapi. Hal ini terwujud, saat masyarakat sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, serta memiliki nilai-nilai intrinsik yang menjadi sumber keberdayaan, seperti sifat-sifat: (1) kekeluargaan; (2) kegotong-royongan; dan (3) keragaman atau kebhinekaan.

Masyarakat Lereng Merapi yang sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, serta memiliki nilai-nilai intrinsik yang menjadi sumber keberdayaan merupakan harapan seluruh anggota masyarakat, termasuk pemerintah dusun dan pemerintah desa di wilayah tersebut. Oleh karena itu, masyarakat, pemerintah dusun dan pemerintah desa membuat segala upaya bagi tercapainya kondisi ideal tersebut. Upaya diwujudkan dalam bentuk pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang berdaya, terutama berdaya dalam mengoptimalkan manfaat kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya setempat.

Kemampuan mengotimalkan manfaat kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya setempat, telah memberi nuansa keberdayaan yang khas masyarakat Lereng Merapi. Hal ini memungkinkan mereka mampu bertahan (*survive*), dan mampu mengembangkan diri untuk mencapai kesejahteraan. Masyarakat memperlihatkan upaya yang terus menerus untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, agar mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Kemiskinan dan keterbelakangan direduksi oleh masyarakat, dengan berbekal tradisi yang bernuansa etos kerja. Tradisi seperti mandi bersih kemudian pergi mencangkul, merupakan tradisi lokal yang wajib dipertahankan dari generasi ke generasi. Berbekal tradisi ini, maka kondisi sosial akan lebih meriah (*semarak*), karena mandi bersih mengundang datangnya kondisi sehat. Sementara itu, pergi mencangkul memperagakan semangat dan etos yang tinggi dalam mengelola tanah pertanian.

Etos kerja untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan, menempatkan masyarakat pada jalan yang “benar”, terutama ketika mereka berupaya meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian. Konsekuensinya, anggota masyarakat yang tergolong miskin tidak boleh ditinggalkan dalam segenap proses menuju keberdayaan dan kemandirian. Golongan ini justru harus didorong untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan proses secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Golongan miskin merupakan golongan paling penting, yang berada dalam perhatian program pemberdayaan masyarakat. Sejak dahulu telah dikatakan, bahwa golongan ini bukanlah golongan yang tidak memiliki etos kerja. Sebaliknya golongan ini memiliki etos kerja yang tinggi, tetapi mengalami kesulitan dalam mengekspresikannya. Oleh karena itu, untuk memberdayakan golongan ini diperlukan kesediaan memberi peluang dan fasilitasi.

Saat masyarakat berikhtiar membantu golongan miskin, maka ikhtiar ini harus berada pada jalur yang selalu memberi kesempatan, dan kemampuan. Hal ini perlu diperhatikan, agar mereka mampu dan berani bersuara (*voice*), serta mampu dan berani memilih (*choice*) beberapa alternatif solusi. Untuk itu, masyarakat di Lereng Merapi melakukan proses terencana guna meningkatkan kemanfaatan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budayanya. Hal ini didasarkan pada pemahaman, bahwa keempat kondisi tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan dalam pemanfaatan, sehingga membutuhkan optimalisasi pemanfaatan, yang pada akhirnya memberi peluang berdaya bagi golongan miskin.

Peluang berdaya bagi golongan miskin jangan sampai menjadi urusan yang membebani pihak lain. Sebaliknya, peluang ini justru membantu banyak pihak dalam mengembangkan diri, terutama ketika golongan miskin menjadi pihak yang siap bekerjasama membangun kemajuan bersama. Sasaran utamanya adalah kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya Lereng Merapi, yang dapat dikelola dan dikembangkan dalam kemasan *ecotourism*.

Pengelolaan dan pengembangan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi tergolong sebagai upaya fasilitasi pemberdayaan (*facilitating empowerment*), yang tindakan konkretnya antara lain berupa: **Pertama**, adanya ruang gerak yang lebih luas bagi segenap elemen di masyarakat, terutama dalam turut serta mengambil keputusan penting, dan mengawasi pelaksanaan optimalisasi manfaat kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi. Implementasinya di masyarakat diawali dengan pemberian pemahaman, yang kemudian dilanjutkan dengan memberi kesempatan bagi munculnya inisiatif masyarakat, hingga dipilihnya beberapa inisiatif terbaik yang layak dilaksanakan.

Kedua, optimalisasi manfaat kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi dilaksanakan secara bertanggung-gugat (*accountability*) dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Kesiadaan dan kesiapan pelaksana kegiatan untuk bertanggung-gugat atas hasil dan pencapaian, didasari oleh kesiadaan dan kesiapan mereka bertanggung-jawab, yang “diwarnai” oleh etos kerja yang tinggi. Meskipun demikian, kesiadaan dan kesiapan ini masih membutuhkan kemampuan pelaksana kegiatan dalam merespon dinamika kebutuhan masyarakat, agar tidak ada kebutuhan penting yang terabaikan.

Ketiga, memberi kesempatan kepada anggota masyarakat yang tergolong miskin untuk melakukan kontrol terhadap upaya optimalisasi manfaat kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi. Kontrol diperlukan agar tidak ada proses yang terlewat, dan tidak ada proses yang bertentangan

dengan prosedur yang seharusnya. Selain itu, kontrol juga berperan menjaga kualitas dan kuantitas kegiatan yang terkait dengan optimalisasi manfaat kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi.

Fasilitasi pemberdayaan bagi golongan miskin di Lereng Merapi, tidaklah mengabaikan pemberdayaan bagi berbagai strata kesejahteraan di masyarakat. Golongan miskin memang mendapat porsi perhatian yang lebih besar, karena saat dilakukan pemberdayaan, mereka merupakan golongan yang paling tidak berdaya. Oleh karena itu, jangan dilaksanakan bila ada pihak menolak fasilitasi ini, karena menganggap fasilitasi diberikan secara diskriminatif.

Sesungguhnya upaya pemberdayaan masyarakat atau penguatan masyarakat (*strengthening community*) sangat beragam, sehingga dibutuhkan peran multi-pihak untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, upaya optimalisasi manfaat kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi tidak dapat dilakukan secara *instant* (segera dapat dilihat hasilnya). Sebaliknya, upaya ini sangat membutuhkan kesabaran, dan konsistensi *stakeholders*.

Kesabaran dan konsistensi diterapkan agar tidak ada kendala yang menghalangi optimalisasi manfaat kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi. Meskipun diketahui, bahwa bila mengatakan kesabaran dan konsistensi, maka justru tantangannya akan berat. Hal ini disebabkan, kesabaran berkaitan dengan pengendalian diri, sedangkan konsistensi berkaitan dengan kesabaran. Tepatnya, bila masyarakat ingin berdaya, maka ia membutuhkan kesabaran

yang berbasis konsistensi, yang sekaligus merupakan sumber bagi munculnya pengendalian diri.

Ada beberapa kendala yang berpotensi menghalangi upaya optimalisasi manfaat kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi, yaitu: **Pertama**, lemahnya komitmen *stakeholders*, yang kemudian diikuti oleh rendahnya kepedulian terhadap fenomena kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga gagal memahami urgensi optimalisasi manfaat kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi. Sementara itu, kegagalan memahami urgensi merupakan malapetaka, karena ia menjadi penyebab tidak dilakukannya suatu kegiatan yang diperlukan.

Kedua, cara pandang masyarakat yang meremehkan kondisi alam yang dimilikinya, yang bersumber dari kultur yang mudah menyerah, sehingga bermuara pada keengganan melakukan optimalisasi manfaat kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi. Kultur semacam ini tidak ditemui pada masyarakat Lereng Merapi, sebaliknya mereka memiliki keinginan yang kuat untuk berdaya dan mandiri. Etos kerja yang tinggi merupakan karakter masyarakat ini, yang masih dilengkapi dengan sikap yang tidak mudah menyerah

Ketiga, tidak adanya pemahaman yang utuh tentang urgensi optimalisasi manfaat kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi, sehingga terjebak pada “kacamata kuda” untuk hanya melakukan pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) atau penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*), yang

muaranya hanya berupa peningkatan pendapatan (*income generating*). Kondisi ini tidak terjadi pada masyarakat Lereng Merapi, karena mereka berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memanfaatkan secara optimal kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan kata lain, masyarakat Lereng Merapi telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan (sosio-ekonomi) dengan memperhatikan aspek sosio-ekologi.

Kendala yang berpeluang muncul dapat diatasi oleh masyarakat Lereng Merapi, dengan cara: **Pertama**, melakukan inventarisasi kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi; **Kedua**, meningkatkan penguasaan dan kemampuan dalam memanfaatkan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi; **Ketiga**, meningkatkan sikap dan kemampuan kewirausahaan dan keterampilan manajerial-sederhana agar dapat mengelola kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi; **Keempat**, berupaya sekuat-tenaga untuk melakukan penyesuaian antara pengelolaan komersial kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi dengan kearifan tradisional yang diwariskan serta dilestarikan secara turun-temurun.

Semangat dan ikhtiar yang dilakukan masyarakat Lereng Merapi ketika melawan kendala boleh jadi isinya tidak bernilai tinggi, tetapi ketika dilakukan terus menerus dan masif (melibatkan masyarakat secara luas), maka peluang keberhasilan sangat menjanjikan. Kondisi ini disebabkan ikhtiar yang dilakukan akhirnya mendorong masyarakat untuk mengetahui indikator keberhasilan, sebagai berikut: **Pertama**, peningkatan kualitas kepemilikan tanah dan

kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan tanah yang dimilikinya, dalam konteks optimalisasi pemanfaatan kondisi alam; **Kedua**, peningkatan relasi sosial antar anggota masyarakat dan antara masyarakat di Lereng Merapi dengan masyarakat luas, dalam konteks optimalisasi pemanfaatan kondisi sosial; **Ketiga**, peningkatan kemampuan masyarakat secara kolektif, terutama dalam membangun jejaring dan kemitraan yang mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, dalam konteks optimalisasi pemanfaatan kondisi ekonomi; **Keempat**, peningkatan etos, semangat, dan motivasi kerja yang kuat dalam melestarikan tradisi dan kesenian yang telah diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, dalam konteks optimalisasi pemanfaatan kondisi budaya.

Hanya saja perlu diperhatikan, bahwa beberapa indikator ini barulah akan muncul, bila ada beberapa unsur penting yang dimiliki oleh masyarakat di Lereng Merapi, yaitu: **Pertama**, aksesibilitas informasi, sebagai unsur penting dalam memperbarui pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan peluang, dan efektivitas kerja; **Kedua**, partisipasi, sebagai unsur penting dalam pembagian peran para pihak, terutama masyarakat lokal (setempat) sebagai subyek dan pelaku utama keberdayaan dan kemandirian di Lereng Merapi; **Ketiga**, akuntabilitas, sebagai unsur penting dalam pertanggung-jawaban publik, yang menjadi pendorong utama bagi berlangsungnya kegiatan secara efisien dan transparan; **Keempat**, kapasitas organisasi lokal, sebagai unsur penting dalam kemampuan masyarakat mengorganisir diri,

memobilisir sumberdaya, bekerja sama, dan menyelesaikan berbagai masalah lokal.

Keberdayaan dan kemandirian masyarakat di Lereng Merapi semakin mudah terwujud bila aksesibilitas informasi, partisipasi, akuntabilitas, dan kapasitas organisasi lokal dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melaksanakan tiga strategi utama, yaitu: **Pertama**, keberpihakan kepada masyarakat di Lereng Merapi; **Kedua**, pendelegasian wewenang yang lebih luas pada masyarakat di Lereng Merapi, untuk mengelola kegiatan yang sesuai kapasitasnya; **Ketiga**, penguatan fokus kegiatan pada optimalisasi pemanfaatan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya.

Khusus mengenai partisipasi, telah diketahui bahwa partisipasi merupakan unsur penting dalam pembagian peran para pihak, terutama masyarakat lokal sebagai subyek dan pelaku utama keberdayaan dan kemandirian di Lereng Merapi. Oleh karena itu, partisipasi selayaknya difahami sebagai: **Pertama**, keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan, dan mengambil manfaat dari kegiatan tersebut; **Kedua**, keikutsertaan anggota masyarakat dalam kegiatan masyarakatnya, baik yang terkait dengan profesinya maupun yang tidak terkait dengan profesinya; **Ketiga**, keikutsertaan yang dilakukan, setelah terjadinya interaksi antar anggota masyarakat di Lereng Merapi; **Keempat**, keikutsertaan yang terjadi karena adanya stimulus (rangsangan) dari luar masyarakat Lereng Merapi, sebagai upaya *exogenous change* bagi optimalisasi pemanfaatan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi.

Sebagai modal sosial (*social capital*), partisipasi memiliki *positioning* yang penting, karena ia mampu membangun sinergi *stakeholders* di Lereng Merapi, dalam suatu "jejaring komunitas" (*community network*) yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam konteks Lereng Merapi dibutuhkan: **Pertama**, partisipasi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, agar kegiatan yang dirancang mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat; **Kedua**, partisipasi anggota masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, agar terwujud kontribusi yang proporsional dari *stakeholders* yang setara dengan manfaat yang akan dirasakan oleh masing-masing *stakeholders*; **Ketiga**, partisipasi anggota masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan, agar tujuan dapat tercapai, dan memperoleh umpan balik atas masalah dan kendala yang dihadapi; **Keempat**, partisipasi anggota masyarakat dalam pemanfaatan hasil kegiatan, sebagai konsekuensi atas tercapainya tujuan yang ingin memperbaiki mutu hidup masyarakat setempat.

Dalam *frame* semangat, juga terbuka peluang bagi hadirnya partisipasi anggota masyarakat di Lereng Merapi, dalam format yang beraneka-ragam, seperti: **Pertama**, partisipasi spontan, yaitu peran serta anggota masyarakat di Lereng Merapi yang tumbuh karena motivasi intrinsik (dari diri sendiri), yang disebabkan adanya pemahaman tertentu atas kegiatan yang ditawarkan; **Kedua**, partisipasi induktif, yaitu peran serta anggota masyarakat di Lereng Merapi yang tumbuh karena terinduksi oleh motivasi ekstrinsik (dari luar dirinya), yang berupa pengaruh, dorongan, atau bujukan untuk

mengikuti kegiatan tertentu; **Ketiga**, partisipasi terpaksa, yaitu peran serta anggota masyarakat di Lereng Merapi yang tumbuh karena adanya tekanan hukum, sosial, ekonomi, dan politik.

Partisipasi spontan dan induktif masyarakat terhadap upaya pemulihan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi perlu dibangun karena kegiatan yang ditawarkan (yaitu: konsolidasi tanah dan *ecotourism*) sangat membutuhkannya. Konsolidasi tanah tidak akan dapat terlaksana tanpa partisipasi masyarakat, demikian pula dengan kegiatan *ecotourism* yang justru menjadikan masyarakat setempat sebagai aktor utama. Pada *ecotourism*, masyarakat setempatlah yang diharapkan dapat menikmati nilai ekonomi kegiatan ini.

Sebagaimana diketahui nilai ekonomi suatu obyek wisata, akan ditentukan oleh: **Pertama**, nilai penggunaannya, yang meliputi: (1) nilai penggunaan secara langsung, seperti untuk rekreasi, pendidikan, penelitian, dan pengamatan; dan (2) nilai penggunaan secara tidak langsung, seperti untuk fungsi ekologi, konservasi, habitat, dan iklim mikro; **Kedua**, nilai non penggunaannya, yang meliputi: (1) nilai pilihan, yaitu jaminan bagi adanya pilihan tentang rencana penggunaan kawasan di masa depan; (2) nilai keberadaan, yaitu keuntungan yang diperoleh ketika mengetahui; dan (3) nilai warisan, yaitu ketika segenap kondisi yang dimiliki dapat memberi keuntungan bagi generasi yang akan datang (lihat Kurnianto, 2008:89).

Agar masyarakat di Lereng Merapi dapat berpartisipasi secara spontan dan induktif, serta seminimal mungkin

berpartisipasi secara terpaksa, maka diperlukan edukasi untuk membangun *mindset* dan *culturalset* yang relevan. Edukasi mendorong masyarakat agar faham, bahwa erupsi Gunung Merapi tidak boleh lagi hanya dipandang sebagai musibah, melainkan dikenali juga sebagai berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, edukasi diberikan secara berkelanjutan agar tercipta bentuk tanggapan atau *responses* yang berkesinambungan atas stimulus alam (Gunung Merapi) yang juga berkesinambungan.

Untuk itu masyarakat di Lereng Merapi perlu diajak berpartisipasi dalam merespon kondisi alam, dengan membangun dan menciptakan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang relevan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencapainya, yaitu: **Pertama**, memberi kesempatan secara luas kepada seluruh anggota masyarakat di Lereng Merapi untuk ikutserta dalam berbagai kegiatan, caranya dengan: (1) melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang relevan; (2) memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang terkait dengan masa depan diri dan wilayahnya; (3) memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan teknologi yang tepat guna bagi dirinya di wilayahnya; (4) memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berorganisasi dan mengorganisir diri dalam organisasi yang mereka bentuk dan kelola sendiri; dan (5) memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan gaya kepemimpinan yang cocok dengan kultur mereka.

Kedua, membangun kemauan dan kemampuan masyarakat di Lereng Merapi untuk ikut serta dalam berbagai

kegiatan, caranya dengan: (1) mendorong masyarakat agar mampu menemukan dan memahami kesempatan untuk memperbaiki mutu hidupnya; (2) mendorong masyarakat agar mampu melaksanakan kegiatan yang terkait dengan optimalisasi pemanfaatan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi; (3) mendorong masyarakat agar mampu memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya dan kesempatan yang tersedia secara optimal.

Dengan demikian *ecotourism* yang pada dasarnya berupa optimalisasi pemanfaatan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi untuk kegiatan pariwisata, memang memiliki prasyarat utama, yaitu partisipasi masyarakat. Berbekal semangat dan kesiapan berikhtiar, partisipasi masyarakat perlu didengungkan dan didorong secara terus menerus dengan memanfaatkan beberapa disiplin ilmu, seperti: **Pertama**, psikologi, yang menjelaskan bahwa tumbuh-kembangnya partisipasi masyarakat ditentukan oleh motivasi yang melatar-belakanginya, sehingga partisipasi juga ditentukan oleh persepsi masyarakat; **Kedua**, sosiologi, yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan fungsi dari dorongan, tekanan, kebutuhan, keinginan, dan harapan-harapan yang dirasakan oleh masyarakat; **Ketiga**, ekonomi, yang menjelaskan bahwa respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap stimulus yang diterima merupakan fungsi *reward* yang diharapkan, di mana besarnya harapan ditentukan oleh besarnya peluang dan “harga” dari manfaat yang akan diperoleh; **Keempat**, geografi dan lingkungan yang

memberikan bekal pemahaman terhadap dinamika wilayah, hubungan manusia dan alam serta perlunya keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, sebagai kegiatan yang mengoptimalkan pemanfaatan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi, *ecotourism* merupakan bagian dari pariwisata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan, bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata, yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah merupakan *stake holders* dalam pelaksanaan *ecotourism* di Lereng Merapi, sehingga merekalah yang bertanggung-jawab atas keberhasilan pelaksanaan *ecotourism* di Lereng Merapi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pengusaha di Lereng Merapi, serta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memperhatikan beberapa komponen pendukung pariwisata, yaitu: **Pertama**, obyek dan daya tarik wisata, yang biasa disebut “atraksi wisata”, yang mencakup atraksi wisata alam dan atraksi wisata budaya; **Kedua**, transportasi dan infrastruktur yang dibutuhkan wisatawan, seperti: transportasi darat, laut, dan udara, serta infrastruktur pendukung berupa ketersediaan air bersih, jalan, listrik, pelabuhan, bandara, pengolahan limbah, dan pengolahan sampah; **Ketiga**, akomodasi atau tempat menginap wisatawan, seperti: hotel, *guest house*, *homestay*, losmen, dan villa; **Keempat**, usaha makanan dan minuman yang

diperuntukkan bagi wisatawan, seperti: restoran, warung, dan *cafe*; **Kelima**, jasa pendukung bagi keberhasilan pelaksanaan *ecotourism*, seperti: biro perjalanan, penjualan cinderamata, pelayanan informasi, pemandu wisata, bank, dan lain-lain (lihat UNESCO, 2009:4-9).

BAB II

KONSOLIDASI TANAH PARTISIPATIF DI LERENG MERAPI

A. Penataan Kawasan Melalui Konsolidasi Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 telah merumuskan, bahwa konsolidasi tanah merupakan kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah sesuai Rencana Tata Ruang, serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, guna peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, ada 2 (dua) kegiatan yang dilakukan secara simultan dalam kegiatan konsolidasi tanah, yaitu: (a) penataan pertanahan yang meliputi penataan kembali penguasaan (terhadap ketidaktertiban penguasaan tanah) dan penggunaan tanah (terhadap ketidak-teraturan penggunaan tanah); serta (b) usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan di lokasi pelaksanaan konsolidasi tanah (Oloan Sitorus, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa

konsolidasi tanah membutuhkan partisipasi masyarakat, baik pada proses penataan bidang tanah maupun pengadaan tanah untuk berbagai kepentingan masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, konsolidasi tanah tidak hanya sekedar sebagai penataan bidang tanah saja, tetapi juga merupakan instrumen penataan wilayah, baik wilayah perkotaan, perdesaan maupun wilayah bencana. Dengan demikian penataan tanah dan wilayah dapat dilakukan melalui model *land consolidation* dan *land readjustment* (Sutaryono, 2007), yang memiliki karakteristik: (1) pembangunan wilayah secara komprehensif dengan cakupan penggunaan lebih luas (ekstensif); (2) distribusi manfaat dan biaya pembangunan lebih adil; (3) adanya perlindungan terhadap hak-hak atas tanah; (4) adanya partisipasi pemilik tanah dan yang menguasai tanah; (5) adanya perlakuan yang sama dan tidak membedakan prosedur terhadap peserta proyek; (6) bidang-bidang tanah tertentu disediakan untuk bangunan tertentu; (7) pembiayaan proyek berasal dari penjualan tanah kelebihan peserta proyek; (8) penghitungan keuangan bagi setiap peserta proyek dilakukan setelah proyek berakhir (Katsuaki Takai, 2005:1-2).

Gambar berikut mengilustrasikan kondisi sebelum dilakukan konsolidasi tanah dan setelah dilakukan konsolidasi tanah:

Gambar .1. Kondisi Sebelum Dilakukan Konsolidasi Tanah dan Setelah Dilakukan Konsolidasi Tanah



Sebelum Konsolidasi Tanah

Sesudah Konsolidasi Tanah



Sumber: Kanwil BPN DIY, 2014.

Ketika konsolidasi tanah diterapkan pada kawasan rawan bencana Gunung Merapi, maka ia merupakan upaya untuk mengembalikan kawasan ini agar dapat dibudidayakan oleh masyarakat sebagai sumber penghidupan. Tanah di Lereng Merapi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib disyukuri oleh masyarakat, pemerintah desa, dan Pemerintah Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, tanah harus dimanfaatkan

sebesar-besarnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, atau kesejahteraan masyarakat (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945). Dengan kata lain konsolidasi tanah merupakan respon yang tepat untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, agar tanah mampu memberikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi masyarakat setempat.

Respon ini merupakan bentuk hubungan antara BPN RI, Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan masyarakat Lereng Merapi, khususnya masyarakat: (1) Dusun Pangukrejo, Desa Umbulharjo; (2) Dusun Pelemsari, Desa Umbulharjo; (3) Dusun Petung, Desa Kepuharjo; (4) Dusun Kaliadem, Desa Kepuharjo; (5) Dusun Jambu, Desa Kepuharjo; dan (6) Dusun Kopeng, Desa Kapuharjo.

Hubungan yang terjalin ini dipenuhi oleh upaya untuk saling memberi manfaat sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan saling menyesuaikan diri agar hubungan dapat berjalan lancar. Untuk itu karakter masing-masing pihak menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan atas hubungan yang dibangun. Sebagai contoh, BPN RI, Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman memiliki karakter sebagai institusi pemerintah, yang berkewajiban mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan harmoni sosial berbasis tanah. Sementara itu, masyarakat memiliki karakter sebagai pihak yang siap menerima kontribusi dari berbagai pihak yang berkeinginan membantu, memberdayakan, dan

memandirikan mereka. Karakter-karakter ini akhirnya bertemu pada satu “titik”, yaitu memberdayakan masyarakat melalui konsolidasi tanah.

Secara implisit, konsolidasi tanah telah dikonstatir dalam Pasal 14 UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) yang memberi amanat, sebagai berikut: **Pertama**, kepada Pemerintah Pusat, agar menyusun rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; **Kedua**, kepada Pemerintah Daerah, agar mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Pengaturan oleh Pemerintah Daerah harus mengacu pada rencana umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Bachtiar, 2014:6).

Amanat UUPA relevan dengan kondisi kekinian, ketika konsolidasi tanah dipraktikkan sebagai salah satu bentuk penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Meskipun demikian, kegiatan ini tidak dapat dilakukan sepihak, karena dibutuhkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan tentang konsolidasi tanah memiliki peran penting dalam mempertemukan kepentingan para pihak. Berdasarkan pengaturan tersebut kesadaran bersama (*collective consciousness*) dapat dibangun, yang isinya berupa kesadaran tentang urgensi penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Kepentingan bersama yang dilakukan secara bersama menjadi filosofi sederhana yang mendasari konsolidasi tanah, yang

secara sadar memperlihatkan *reification* terhadap *collective consciousness*.

Kesadaran dan kepentingan bersama ini layak diperjuangkan, karena konsolidasi tanah memiliki relevansi dengan pengelolaan pertanahan yang memiliki nuansa kebencanaan. David Mitchell (2011:43) mengungkapkan, bahwa ada aktivitas yang diperlukan dalam menurunkan *issue* pertanahan setelah terjadinya bencana, yaitu: **Pertama**, pada tahap *prevention*, maka aktivitas yang perlu dilakukan antara lain memukimkan kembali masyarakat secara sukarela, agar (bila memungkinkan) berada tidak jauh dari lokasi semula (wilayah bencana). Pada tahap ini konsolidasi tanah sudah layak dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif, yang memungkinkan penataan pemukiman kembali bagi masyarakat.

Kedua, pada tahap *mitigation*, maka aktivitas yang perlu dilakukan antara lain: (1) memetakan bencana dan perhitungan resikonya, (2) mendidik masyarakat agar dalam konteks hak atas tanah mampu tinggal di lokasi yang tidak jauh dari lokasi bencana, (3) menyimpan data pertanahan secara aman agar tidak terkena dampak bencana. Pada tahap ini konsolidasi tanah sudah dapat diperkenalkan lebih intens kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penataan penguasaan dan pemilikan tanah.

Ketiga, pada tahap *preparedness*, maka aktivitas yang perlu dilakukan antara lain: (1) membangun kebijakan pertanahan dan kerangka pengakuan legal yang didasari pada proses konsultatif dan partisipatori, (2) membangun *master*

plan tata guna tanah yang didasari pada proses konsultatif dan partisipatori, (3) menetapkan lokasi pemukiman transisional, (4) memperbaiki jaminan penguasaan tanah menuju hak atas tanah yang paling memungkinkan, dan (5) memperbaiki kemampuan lembaga administrasi pertanahan. Pada tahap ini konsolidasi tanah sudah saatnya “diluncurkan”, meskipun masih dalam taraf persiapan dan pelaksanaan awal.

Berdasarkan tahapan tersebut, konsolidasi tanah berpeluang dilaksanakan di wilayah pasca bencana, karena ia membangun keterkaitan antar elemen pertanahan. Keterkaitan ini bermanfaat dalam menyejahterakan atau memakmurkan masyarakat, terutama karena dalam prosesnya memperlihatkan adanya peran penatagunaan tanah, yang mampu menyelaraskan kepentingan individu dengan masyarakat secara luas. Selain itu, penatagunaan tanah juga memperlihatkan peran serta atau partisipasi pemilik tanah dalam bingkai keteraturan bentuk dan letak bidang-bidang tanah, untuk mencapai hasil atau produksi yang tinggi melalui efisiensi penggarapan tanah.

Keteraturan bentuk dan letak bidang-bidang tanah, yang berhubungan dengan hasil atau produksi yang tinggi melalui efisiensi penggarapan, sesungguhnya juga mencerminkan *image of human beings*. Citra ini terlihat pada adanya pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang mampu memperlihatkan kebersamaan dalam masyarakat. Selain itu, *image of human beings* juga nampak pada keberhasilan konsolidasi tanah “menekan” kecenderungan individualis yang bersemayam

pada diri anggota masyarakat (peserta konsolidasi tanah), dan mendorong setiap anggota masyarakat agar mampu beradaptasi dengan cepat.

Sementara itu, Oleg Horjan (2011: 87) menjelaskan, bahwa konsolidasi tanah merupakan program jangka panjang terus menerus, yang diwujudkan dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat, dalam bingkai proses menuju masyarakat yang dewasa (*maturing*). Setelah tahap pertama konsolidasi tanah selesai (perencanaan konsolidasi tanah), segera diketahui adanya kebutuhan masyarakat, yang menuntut segera dilakukan tahap selanjutnya (pelaksanaan konsolidasi tanah). Inilah kondisi baru yang dialami masyarakat, yang membutuhkan pemenuhan. Di sini dapat muncul kecenderungan yang saling bertentangan. Pada satu sisi, sebagian masyarakat ingin agar konsolidasi tanah segera dilaksanakan, sehingga mereka dapat memiliki tanah dengan formasi teratur, tetapi pada sisi lain, sebagian masyarakat belum sepakat mengenai pendanaan konsolidasi tanah. Pada akhirnya diketahui, bahwa konsolidasi tanah bersifat partisipatoris, dilakukan secara sukarela dengan dana yang ditanggung bersama secara proporsional.

Dalam konteks konsolidasi tanah Lereng Merapi, makna partisipatoris menjangkau kesukarelaan dalam penataan penguasaan dan pemilikan tanah, tetapi tidak menempatkan pendanaan sebagai elemen yang harus ditanggung bersama secara proporsional oleh masyarakat. Konsolidasi tanah Lereng Merapi dibiayai sepenuhnya oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sehingga masyarakat

dapat berkonsentrasi mensukseskan kegiatan ini pada ranah penataan bentuk dan letak bidang-bidang tanah, khususnya yang berhubungan dengan efisiensi penggarapan bagi perolehan hasil atau produksi yang tinggi.

Kekhasan konsolidasi tanah Lereng Merapi semakin menguatkan pentingnya kegiatan ini bagi masyarakat, terutama ketika kebutuhan mereka menjadi dasar utama pertimbangan. Selain itu, kebutuhan masyarakat juga menjadi pertimbangan utama saat perundang-undangan yang berlaku diterapkan dan menjadi pedoman pelaksanaan. Situasi ini mencerminkan adanya *image of society*, ketika peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat berbagai kepentingan secara kuat, sehingga mampu menimbulkan harmoni dalam pelaksanaan konsolidasi tanah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pihak-pihak yang terkait mendapat perannya masing-masing. Pihak-pihak ini dikategorikan berdasarkan lapisan-lapisan sosial yang ada di masyarakat, yang terbentuk berdasarkan penguasaan dan pemilikan tanah. Lapisan-lapisan sosial ini menentukan peran (kewajiban) yang berbeda antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Perbedaan yang biasa disebut dengan istilah “*societal differentiation*” ini disikapi secara adil melalui kontribusi proporsional peserta konsolidasi tanah.

Norma konsolidasi tanah yang dibangun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sesungguhnya memiliki kekuatan berlaku, kekuatan mengikat, dan kekuatan memaksa. Namun dalam prakteknya para pelaksana

cenderung memilih pendekatan persuasif, sehingga meskipun yang “dibawa” adalah norma hukum, ia “disajikan” sebagai norma sosial. Walaupun nampak perlahan-lahan, atau “relatif evolusioner”, tetapi perubahan yang terjadi tidak akan mengganggu solidaritas sosial yang telah ada sejak lama di masyarakat. Pendekatan persuasif juga memperlancar pencapaian konsensus (kesepakatan), yang merupakan “ruh” pelaksanaan konsolidasi tanah. Konsensus inilah yang melegitimasi penataan penguasaan dan pemilikan tanah, terutama perubahan yang terjadi sesudahnya.

Selain latar belakang kekinian, konsolidasi tanah juga memiliki latar belakang histori-filosofis. Sebagaimana diketahui secara implisit, konsolidasi tanah telah dikonstatir dalam Pasal 14 UUPA, yang secara historis berada pada ranah *landreform*. Historisitas mengalir, ketika diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, yang merupakan objek *landreform*. Pada awalnya (histori-filosofis), objek *landreform* yang berupa tanah pertanian inilah, yang akan dijadikan objek konsolidasi tanah perdesaan (*rural land consolidation*), sedangkan tanah non pertanian akan dijadikan objek konsolidasi tanah perkotaan (*urban land consolidation*). Namun dalam perkembangan saat ini, objek konsolidasi tanah tidak hanya tanah objek *landreform*, melainkan juga meliputi tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat (Bachtiar, 2014:7).

Oleh karena objek konsolidasi tanah semakin meluas, hingga meliputi tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat, maka konsensus menjadi unsur penting. Berdasarkan

perspektif konvensional, hal ini merupakan perkembangan yang baik, karena pada dasarnya masyarakat memiliki kecenderungan dan kemampuan untuk bernegosiasi. Para konvensionalis percaya, bahwa negosiasi yang dibangun akan menghasilkan konsensus yang mampu merekatkan kepentingan masing-masing anggota masyarakat (peserta) dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. Dengan demikian selain pendekatan persuasif, negosiasi dan konsensus mampu “mewarnai” pelaksanaan konsolidasi tanah, yang sekaligus memperlihatkan sisi egalitariannya.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah menjelaskan, bahwa: **Pertama**, konsolidasi tanah, adalah kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk peningkatan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat; **Kedua**, peserta konsolidasi tanah, adalah pemegang hak atas tanah atau penggarap tanah negara objek konsolidasi tanah; **Ketiga**, tanah objek konsolidasi tanah adalah tanah negara non pertanian dan/atau tanah hak di wilayah perkotaan atau perdesaan yang ditegaskan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk dikonsolidasi; **Keempat**, sumbangan tanah untuk pembangunan adalah bagian dari objek konsolidasi tanah yang disediakan untuk pengganti biaya pelaksanaan; **Kelima**, tanah pengganti biaya pelaksanaan adalah bagian dari sumbangan tanah untuk pembangunan yang diserahkan kepada pihak ke tiga dengan pembayaran

biaya kompensasi berupa uang, yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pelaksanaan konsolidasi tanah sesuai dengan Daftar Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah (DRKK); **Keenam**, Surat Izin Menggunakan Tanah (SIMT), adalah surat izin untuk menggunakan tanah pengganti biaya pelaksanaan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Bagi para pelaksana konsolidasi tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah merupakan acuan yang wajib dipatuhi. Pelanggaran atas peraturan ini selain akan mengancam keberhasilan pelaksanaan konsolidasi tanah dan mengancam para pelaksananya, karena adanya implikasi hukum atas pelanggarannya. Namun demikian tetap terbuka ruang improvisasi dan kreasi dalam melaksanakan peraturan ini, sepanjang hal-hal prinsip telah dilaksanakan.

Improvisasi dan kreasi dalam pelaksanaan konsolidasi tanah diperlukan sebagai respon atas dinamika sosial kekinian. Masyarakat tidak dapat lagi diprediksi secara linier, hanya berdasarkan grafik yang naik-turun. Keadaan kini telah berubah, karena realitas dapat “jungkir-balik”, perubahan terjadi semakin cepat, dan ketidak-pastian tampil dalam “garis” yang lebih tegas. Oleh karena itu, para pelaksana konsolidasi tanah perlu memiliki kemampuan berpikir yang imajinatif (*socio-imagination*), yang pergerakannya dapat melompat-lompat dan tidak beraturan. Satu hal yang harus “dipegang” oleh pelaksana konsolidasi tanah adalah, “hal-hal prinsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah harus dilaksanakan”.

Pelaksanaan konsolidasi tanah merupakan kegiatan yang penting dalam proses mewujudkan kemakmuran rakyat (kesejahteraan masyarakat), karena: **Pertama**, program ini bertujuan untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah. **Kedua**, program ini memiliki sasaran berupa terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur.

Peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah, serta penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur barulah tercapai, bila anggota masyarakat yang menjadi peserta menyetujui konsepsi konsolidasi tanah. Oleh karena itu, pada tahap awal para pelaksana harus berupaya, agar mayoritas peserta menyetujui konsepsi konsolidasi tanah. Bila kondisi ini tercapai, maka selanjutnya akan berlangsung proses psiko-sosial pada diri masyarakat (peserta konsolidasi tanah). Proses ini akan mempertemukan kepentingan antara peserta yang telah setuju (yang mayoritas) dengan peserta yang belum setuju (yang minoritas). Negosiasi merupakan cara yang dapat ditempuh untuk “melarutkan” kepentingan peserta yang belum setuju ke dalam kepentingan peserta yang telah setuju, sehingga akhirnya dicapai konsensus (seluruh peserta setuju). Proses ini memang tidak mudah, dan membutuhkan kesabaran dan kepiawaian para pelaksana konsolidasi tanah, tetapi bila berhasil akan menghasilkan kegiatan yang mendapat dukungan sangat kuat dari

masyarakat. Keberhasilan konsolidasi tanah ditentukan oleh besarnya dukungan masyarakat atas kegiatan ini, yang diperoleh karena adanya prinsip preservasi hak, serta pemihakan terhadap kaum ekonomi lemah.

Sitorus (2012:5) telah menjelaskan, bahwa konsolidasi tanah akan menyelesaikan masalah ketidaktertiban penguasaan tanah dengan prinsip preservasi hak, serta pemihakan terhadap kaum ekonomi lemah. Kondisi penguasaan tanah sebelum konsolidasi tanah akan dihargai sepenuhnya. Dalam pada itu, adanya istilah pelepasan hak dalam pelaksanaan konsolidasi tanah hanya dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada pelaksana konsolidasi tanah dalam melakukan penataan sesuai dengan ide dasar dan tujuan konsolidasi tanah. Artinya, pelepasan itu hanya bersifat sementara sampai penataan selesai dilakukan. Setelah dilakukan penataan, hak atas tanah peserta konsolidasi tanah akan kembali kepada pemegang hak atas tanah itu, paling tidak dengan status hukum penguasaan yang sama. Bahkan dimungkinkan status penguasaan atas tanah setelah konsolidasi tanah akan lebih kuat, misalnya sebelumnya hanya status penggarapan fisik menjadi hak atas tanah, atau yang semula tanah adat individual yang belum bersertipikat menjadi hak atas tanah yang bersertipikat. Pemihakan terhadap golongan ekonomi lemah tampak dari beberapa kebijakan pelaksanaan konsolidasi tanah yang memberi kemudahan bagi para pemilik tanah kecil yang tidak harus menyerahkan STUP (Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan) dalam bentuk tanah, tapi boleh dalam bentuk uang atau tenaga yang diberikan.

Penjelasan Sitorus (2012) ini mengingatkan para pelaksana konsolidasi tanah, untuk bersikap cermat, dan berkenan memperhatikan kepentingan masyarakat, terutama para pemilik tanah kecil. Harus diupayakan untuk menutup celah antara norma yang diharapkan (*ideal norms*) dan norma yang direalisasikan (*real norms*). Oleh karena itu, para pelaksana konsolidasi tanah wajib mengetahui perbedaan antara kedua norma tersebut, dan berupaya mewujudkan *ideal norms* dalam *real norms*. Bila kondisi ini dapat diwujudkan, maka konsolidasi tanah di Lereng Merapi (Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo) mendapat alasan untuk dilaksanakan.

Konsolidasi tanah di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo perlu atau penting untuk dilaksanakan, karena: **Pertama**, pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah dalam bentuk konsolidasi tanah dilakukan di perdesaan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan dan sekaligus menyediakan tanah untuk pembangunan prasarana dan fasilitas umum; **Kedua**, kegiatan konsolidasi tanah meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah, termasuk hak atas tanah dan/atau penggunaan tanahnya, dengan dilengkapi prasarana jalan, fasilitas lingkungan dan/atau fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan, dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah dan/atau penggarap tanah; **Ketiga**, lokasi konsolidasi tanah telah ditetapkan oleh Bupati Sleman dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah; **Keempat**, secara fungsional konsolidasi tanah dilaksanakan oleh BPN RI, yang meliputi: (1) Kepala BPN RI; (2) Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah

Istimewa Yogyakarta; dan (3) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman; **Kelima**, secara operasional konsolidasi tanah dilaksanakan oleh instansi-instansi lain yang terkait dan masyarakat di bawah koordinasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati Sleman.

Urgensi konsolidasi tanah di Lereng Merapi (Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo) demikian kuat, sehingga tidak memberi ruang bagi hadirnya prasangka (*prejudice*) yang mengganggu kegiatan tersebut tidak tepat atau tidak beralasan. Para pelaksana telah bersabar dan tidak emosional, ketika ada pihak yang menampilkan prasangka atas pelaksanaan konsolidasi tanah. Prasangka justru menjadi penyemangat para pelaksana untuk bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan sosialisasi konsolidasi tanah. Pendekatan persuasif terus dilakukan, dan negosiasi untuk mencapai konsensus juga wajib dilaksanakan, hingga akhirnya prasangka yang ditampilkan pihak tertentu kehilangan kemampuan pembuktiannya.

Oleh karena urgensi yang kuat, maka Bupati Sleman menyetujui kegiatan konsolidasi tanah, karena kegiatan ini dapat diarahkan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan rasionalitas itulah, maka Bupati Sleman menetapkan lokasi konsolidasi tanah di wilayahnya. Sesungguhnya berbekal Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo yang menjadi lokasi konsolidasi tanah layak menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.

Sutaryono (2007:115) mengungkapkan, bahwa secara yuridis administratif rencana tata ruang wilayah desa dapat diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes), yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Alternatif ini memberikan peluang yang lebih besar, dan relatif lebih mudah diimplementasikan, mengingat kewenangan penetapannya ada pada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Rencana tata ruang wilayah desa yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesungguhnya dapat dimaknai sebagai fasilitasi sosial (*social facilitation*), yang berguna untuk menundukkan kepentingan individual. Fasilitasi sosial layak dimanfaatkan, karena ia akan merangsang atau menstimulasi anggota masyarakat untuk memperhatikan kepentingan kolektif. Ketika seorang anggota masyarakat “bersentuhan” dengan fasilitasi sosial, maka ia akan bergabung dengan ketentuan, norma atau semangat yang dimuat di dalamnya, sehingga kepentingan dirinya tertundukkan oleh kepentingan bersama.

Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Desa yang relevan dengan Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman perlu didorong perwujudannya. Rencana ini harus tetap memperhatikan aspirasi masyarakat desa, sehingga bersama-sama dengan pelaksanaan konsolidasi tanah akan berperan penting dalam pembangunan pertanian dan perdesaan. Oleg Horjan (2011:89) menjelaskan, bahwa konsolidasi tanah merupakan instrumen penting bagi pembangunan pertanian dan

perdesaan di tiap negara (termasuk di Moldova). Pelaksanaan konsolidasi tanah merupakan *event* penting, karena ia memperlihatkan reformasi politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini pulalah yang menjadikan konsolidasi tanah sangat penting dalam pembangunan nasional, yang strateginya didasari pada pendekatan multidisiplin dan komprehensif, yang merupakan fusi (peleburan) berbagai elemen yang terkait dengan pembangunan pertanian dan perdesaan.

Penjelasan Oleg Horjan relevan dengan presentasi Zvi Lerman dan Dragos Cimpoies dalam Seminar “*Causes and Impacts of Agricultural Structures*,” pada 11 Januari 2006 di Tanikon, Switzerland. Pada kesempatan itu Zvi Lerman dan Dragos Cimpoies menyampaikan kajiannya yang berjudul “*Land Consolidation as a Factor for Successful Development of Agriculture in Moldova*.” Zvi Lerman dan Dragos Cimpoies (2006:6) menjelaskan, bahwa konsolidasi tanah di Moldova tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas pertanian, melainkan juga mampu meningkatkan standar hidup keluarga perdesaan.

Peningkatan standar hidup keluarga perdesaan memang diperlukan, karena konstitusi telah mengamanatkan hal itu. Meskipun diketahui bila standar hidup keluarga perdesaan identik dengan kesejahteraan, maka ada empat kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu: (1) kebutuhan yang bersifat dasar; (2) kebutuhan yang bersifat sosial psikologis; (3) kebutuhan yang bersifat pengembangan; dan (4) kebutuhan untuk mampu memberi bantuan secara nyata dan berkelanjutan (Nugroho, 2014:6).

Pemenuhan kebutuhan ini perlu diperjuangkan tanpa harus merusak kohesivitas (*cohesivity*) yang telah ada di masyarakat. Secara teoritik diketahui, bahwa kesejahteraan seringkali menjadi faktor yang merusak kohesivitas, karena ada kecenderungan pihak yang lebih sejahtera, merasa lebih terhormat, lebih mengetahui, sehingga lebih berkuasa. Oleh karena itu, saat pelaksanaan konsolidasi tanah, harus diupayakan harmonisasi antara tujuan meningkatkan kesejahteraan dengan menjaga kohesivitas yang telah ada.

Selain itu, para pelaksana memperhatikan penjelasan Sitorus (2014:6) yang menjelaskan, bahwa proses penataan penguasaan tanah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. **Pertama**, para peserta konsolidasi tanah melakukan pelepasan hak atas tanahnya atau penggarapannya dengan menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Dalam Rangka Konsolidasi Tanah. Dengan pernyataan pelepasan hak ini, maka untuk sementara waktu sampai selesainya sertipikasi, secara hukum status tanah menjadi Tanah Negara. Pelepasan hak dalam hal ini memiliki rasionalitas yang berbeda dengan pelepasan hak dalam tindakan pengadaan tanah. Pelepasan hak dalam konsolidasi tanah hanya bersifat sementara, agar pelaksana konsolidasi tanah (dalam hal ini otoritas pertanahan) dapat secara leluasa menata status penguasaan tanah. Sementara itu, pelepasan hak dalam pengadaan tanah merupakan tindakan hukum untuk mengakhiri hak atas tanah. Dengan adanya pelepasan hak dalam konsolidasi tanah, maka pihak pelaksana konsolidasi tanah diberikan kewenangan yang memadai untuk menata bidang-bidang tanah tersebut sesuai

dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, serta ide dasar dan prinsip-prinsip konsolidasi tanah itu sendiri; **Kedua**, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi akan menerima tindakan pelepasan hak oleh para peserta konsolidasi tanah itu, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Tanah Negara objek konsolidasi tanah. Dalam penegasan sebagai Tanah Negara objek konsolidasi tanah itu juga sekaligus diperintahkan instansi yang berwenang untuk menindaklanjutinya dengan pemberian hak atas tanah kepada peserta konsolidasi tanah; **Ketiga**, Kepala Kantor Pertanahan akan menerbitkan keputusan pemberian hak atas tanah secara kolektif dan selanjutnya diterbitkan sertipikat hak atas tanah kepada masing-masing peserta konsolidasi tanah.

Dengan demikian konsolidasi tanah yang merupakan tindakan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; selalu disertai legalisasi *asset* atau pendaftaran tanah, yang oleh masyarakat dikenal sebagai kegiatan “sertipikasi hak atas tanah”. Setelah penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah ditata dengan baik, serta sertipikat hak atas tanah berada di tangan pemilik tanah; maka langkah penting selanjutnya adalah dukungan dari satuan kerja pemerintah daerah (Pemerintah Kabupaten Sleman) dalam membangun infrastruktur (termasuk jalan serta fasilitas sosial dan umum).

B. Kerja Kolaboratif dalam Konsolidasi Tanah

Bencana Merapi atau bencana alam akibat erupsi Gunung Merapi, telah mengundang simpati banyak pihak, dan

menguatkan itikad baik Pemerintah untuk memberdayakan dan membantu masyarakat di Lereng Merapi. BPN RI menunjukkan itikad baiknya kepada masyarakat di Lereng Merapi melalui jajarannya di daerah, yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, yang menyelenggarakan konsolidasi tanah.

Itikad baik yang diperlihatkan BPN RI merupakan bentuk penjabaran amanat peraturan perundang-undangan, agar BPN RI berkontribusi bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan pertanahan yang memberi jaminan kepastian hukum. Proses internalisasi atas kesadaran ini telah lama berlangsung di jajaran BPN RI, yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat ketika berlangsung sosialisasi pertanahan. Oleh karena itu, konsolidasi tanah merupakan ajang ekspresi segenap jajaran BPN RI atas kesadaran sosial yang dimilikinya.

Konsolidasi tanah di Desa Kepuharjo dan Desa Umbulharjo diawali oleh adanya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09/KEP-34.400/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Penunjukan Lokasi Kegiatan Sertifikasi Konsolidasi Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014. Keputusan inilah yang menjadi dasar tugas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam menetapkan Desa Kepuharjo dan Desa Umbulharjo sebagai lokasi konsolidasi tanah. Ada 6 (enam) dusun yang masuk

dalam program konsolidasi tanah, yaitu: (1) Dusun Pangukrejo, Desa Umbulharjo; (2) Dusun Pelemsari, Desa Umbulharjo; (3) Dusun Petung, Desa Kepuharjo; (4) Dusun Kaliadem, Desa Kepuharjo; (5) Dusun Jambu, Desa Kepuharjo; dan (6) Dusun Kopeng, Desa Kapuharjo.

Dusun-Dusun ini berada di wilayah KRB (Kawasan Rawan Bencana), tepatnya KRB III, yang memiliki ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi. Peraturan tersebut menyatakan, bahwa wilayah tersebut hanya boleh digunakan untuk: (a) pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumberdaya air, hutan, pertanian lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam; (b) tidak untuk hunian; dan (c) *land coverage ratio* paling banyak sebesar 5% (Sumber: Pemerintah Kabupaten Sleman, 2013).

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi, maka Dusun Pangukrejo, Dusun Pelemsari, Dusun Petung, Dusun Kaliadem, Dusun Jambu, dan Dusun Kopeng hanya dapat digunakan bagi pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumberdaya air, hutan, pertanian lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam. Ketentuan ini menjadi dasar perhatian dalam pelaksanaan konsolidasi tanah, sehingga pasca kegiatan ini maka penggunaan tanah yang ada akan sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011.

Ikhtiar mewujudkan amanat Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 pasca konsolidasi tanah, harus dirintis sejak awal kegiatan. Untuk tujuan itu dapat dimanfaatkan kondisi *social interplay* (hubungan sosial) yang ada di masyarakat, melalui penerapan strategi pendekatan yang sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Selain itu juga perlu dipertimbangkan *social resilience* (daya lenting sosial) yang berpeluang terjadi di masyarakat, karena ia berperan sebagai elemen kunci dalam perubahan sosial. Sebagaimana diketahui, calon penerima perubahan memerlukan waktu dan kelenturan mental sebelum menerima perubahan.

Kesempatan melakukan perubahan, menjadi “karpet merah” (membuka jalan) bagi penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, melalui konsolidasi tanah. Dengan kata lain penggunaan tanah di dusun-dusun (lokasi konsolidasi tanah) ini dimungkinkan untuk ditata- ulang, agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui kegiatan konsolidasi tanah. Kegiatan ini sangat bermanfaat, karena memungkinkan dilakukannya perbaikan atas ketidakteraturan penggunaan tanah, yang terlihat dalam bentuk penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Oleh karena itu, Oloan Sitorus (2014:7) menjelaskan, bahwa ketidakteraturan penggunaan tanah dapat ditata berdasarkan prinsip *replotting*, dengan bentuk kegiatan tukar-menukar letak, penggabungan bidang tanah, ataupun dengan perubahan bentuk bidang tanah. Namun demikian, penataan kembali letak bidang tanah (*replotting*) harus semaksimal

mungkin diupayakan, agar letak bidang tanah setelah konsolidasi tanah tidak berubah, dan walaupun berubah tidak berada jauh dari letak bidang tanah semula.

Penjelasan Oloan Sitorus tersebut dapat dimaknai sebagai nasehat agar para pelaksana bersikap cermat, hati-hati, cerdas, dan kreatif dalam menata penggunaan tanah melalui konsolidasi tanah. Letak bidang tanah setelah konsolidasi tanah diupayakan untuk tidak berubah, dan walaupun berubah maka tidak berada jauh dari letak bidang tanah semula. Meskipun begitu masyarakat perlu diberi kesiapan mental, bila karena satu dan lain hal ternyata perubahan letak tanahnya relatif besar. Untuk itu ada upaya yang perlu dilakukan oleh pelaksana konsolidasi tanah, yaitu: **Pertama**, melakukan diagnosa, dengan melakukan identifikasi tata letak bidang tanah yang paling memungkinkan. **Kedua**, melakukan rancang bangun, dengan menetapkan rencana tata letak bidang tanah, termasuk upaya mengkomunikasikannya. **Ketiga**, melaksanakan tata letak bidang tanah yang telah ditetapkan.

Kegiatan konsolidasi tanah di Lereng Merapi (Desa Kepuharjo dan Desa Umbulharjo) akhirnya semakin kuat dasar hukumnya, ketika Bupati Sleman berkenan menerbitkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 35/Kep.KDH/A /2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Lokasi Konsolidasi Tanah Pasca Erupsi Gunung Api Merapi Tahun 2010 di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan seluas 517,09 Ha. Berdasarkan keputusan Bupati Sleman ini, maka dilaksanakanlah Rapat Koordinasi dalam rangka Identifikasi Subjek dan Objek Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan

Kabupaten Sleman tanggal 29 April 2014, yang membahas beberapa proses penerbitan sertipikasi konsolidasi tanah, misalnya karena hibah, jual beli, dan waris.

Rapat koordinasi merupakan kegiatan penting sebelum konsolidasi tanah dilaksanakan, yang berfungsi mencegah terjadinya deviasi (*deviation*). Perspektif *socio-management* berpandangan, bahwa bila terjadi deviasi perlu diamati kesesuaian struktur organisasi yang ada yang boleh jadi tidak lagi memadai. Selain itu, saat terjadi deviasi perlu dikenali adanya penyimpang (*deviant*) dan penyimpangan (*deviance*). Bentuk penyimpangan yang paling parah adalah *rebellion*, yaitu sikap dan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pimpinan pelaksana perlu sejak awal mewaspadaai terjadinya *rebellion* dalam pelaksanaan konsolidasi tanah.

Pada Rapat Koordinasi dalam rangka Identifikasi Subjek dan Objek Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 29 April 2014, PPPM-STPN (Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat – Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional) mulai terlibat dengan mengirimkan utusannya, terutama untuk membahas kontribusi yang dapat diberikan PPPM-STPN dalam kegiatan tersebut. Dalam rapat tersebut disepakati, bahwa PPPM-STPN akan berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya membangun kesadaran pertanahan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat.

PPPM-STPN bersyukur dapat terlibat dalam kegiatan penyuluhan dan kegiatan lain, yang berkaitan dengan

upaya membangun kesadaran pertanahan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat. Kegiatan ini penting, karena merupakan *entry point* bagi kelancaran pelaksanaan konsolidasi tanah. Penyuluhan merupakan ikhtiar yang perlu dilakukan, karena adanya *differential association* (pergaulan yang berbeda) pada diri anggota masyarakat (peserta konsolidasi tanah).

Pada saat penyuluhan, PPPM-STPN mengirimkan 15 orang dosen STPN, untuk membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam menjelaskan konsolidasi tanah kepada masyarakat, dan melakukan penggalangan partisipasi masyarakat. Tim Penyuluh PPPM-STPN berpartisipasi pada kegiatan penyuluhan di Desa Kepuharjo dan Desa Umbulharjo, yaitu: **Pertama**, di Balai Desa Kepuharjo pada Hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 jam 09.00 – 11.30 WIB; **Kedua**, di Balai Desa Umbulharjo pada Hari Jum'at tanggal 7 Februari 2014 jam 19.00 – 22.00 WIB; **Ketiga**, di Balai Desa Kepuharjo pada Hari Senin tanggal 10 Februari 2014 jam 09.00 – 11.30 WIB.

Penyuluhan konsolidasi tanah memberi kesempatan pada pelaksana, untuk menjelaskan latar belakang, tujuan, dan tata cara pelaksanaan. Selain itu, PPPM-STPN dapat “memetakan” respon masyarakat terhadap konsolidasi tanah. Ada peluang hasil pemetaan, sebagai berikut: **Pertama**, konformitas (*conformity*), yaitu suatu keadaan ketika beberapa anggota masyarakat menerima konsolidasi tanah, karena adanya “tekanan” moral yang melingkupinya, yaitu tujuan konsolidasi tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; **Kedua**, inovasi (*inovation*), yaitu suatu keadaan

ketika beberapa anggota masyarakat menerima konsolidasi tanah, tetapi dengan meminta terlebih dahulu dilakukan perubahan pada tata cara pelaksanaannya; **Ketiga**, ritualisme (*ritualism*), yaitu suatu keadaan ketika beberapa anggota masyarakat tidak sepakat dengan tujuan konsolidasi tanah, tetapi dapat menerima tata cara pelaksanaannya; **Keempat**, retreatisme (*retreatism*), yaitu suatu keadaan ketika beberapa anggota masyarakat tidak sepakat dengan tujuan konsolidasi tanah, dan menolak tata cara pelaksanaannya.

Berdasarkan pengamatan ketika penyuluhan, diketahui bahwa pada umumnya respon masyarakat berada pada tataran konformitas. Sementara itu, karena adanya situasi dan kondisi alam yang khas Lereng Merapi, maka ada beberapa anggota masyarakat yang mengekspresikan tataran inovasi dan ritualisme. Khusus mengenai tataran retreatisme tidak dijumpai dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Lereng Merapi. Hasil pemetaan ini berguna sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan kegiatan pada tahapan selanjutnya, yang pada dasarnya memuat “pesan” tentang pentingnya komunikasi dalam penyelesaian masalah.

Setelah terlibat dalam kegiatan penyuluhan pada beberapa dusun di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo, PPPM STPN berpartisipasi dalam kegiatan Supervisi dan Monitoring Konsolidasi Tanah: “Pembinaan Pengumpulan Data Identifikasi Subjek dan Objek Konsolidasi Tanah”, pada tanggal 6 Mei 2014, yang dilaksanakan di Hotel Griya Persada, Sleman. Pada kegiatan ini para tokoh masyarakat setempat, ketua dan anggota Pokmasdartibnah (Kelompok Masyarakat

Sadar dan Tertib Pertanahan), petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, dan utusan PPPM-STPN, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berupaya sedapat mungkin memecahkan masalah yang timbul di lapangan.

Sebagaimana hasil pemetaan atas respon masyarakat, maka cara yang ditempuh oleh pelaksana konsolidasi tanah berada pada “jalur yang tepat”. Hal ini sesuai dengan “pesan” tentang pentingnya komunikasi dalam penyelesaian masalah. Upaya membangun komunikasi nampak ketika para peserta dan pelaksana konsolidasi tanah terhubung (terkoneksi) dalam suasana diskusi yang egaliter. Suasana ini memberi kesempatan bagi mereka untuk bersama-sama memikirkan solusi atas masalah yang dihadapi.

Hasil Supervisi dan Monitoring Konsolidasi Tanah menunjukkan, bahwa masalah yang harus segera diatasi adalah keterbatasan tenaga (sumberdaya manusia) yang mampu menghubungkan peserta konsolidasi tanah dengan para petugas kantor pertanahan. Hal ini semakin terasa penting, karena akhirnya akan berkaitan dengan pemberkasan. Oleh karena itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta menghubungi Ketua STPN, melalui Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0818/400-34/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 perihal Permintaan Bantuan Tenaga Mahasiswa STPN. Melalui surat ini Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta meminta bantuan 12 orang mahasiswa STPN untuk membantu masyarakat menyiapkan kelengkapan berkas sebagai peserta konsolidasi tanah pada tanggal 21 hingga 31 Mei 2014.

Permintaan bantuan ini merupakan bentuk sinergi yang kuat antara Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta dengan STPN. Secara terminologis, sinergi bermakna kerjasama, solusi, dan sekaligus kreasi yang dapat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan konsolidasi tanah. Keterlibatan 12 orang mahasiswa STPN dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo merupakan bentuk kerjasama yang kuat antara STPN dengan Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sekaligus menjadi solusi atas masalah yang dihadapi, melalui kreasi pemanfaatan sumberdaya manusia.

Berdasarkan permintaan tersebut, Ketua STPN menugaskan 12 (dua belas) orang mahasiswa STPN, untuk membantu masyarakat menyiapkan kelengkapan berkas sebagai peserta konsolidasi tanah, pada tanggal 21 hingga 31 Mei 2014 di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo. Para mahasiswa yang dikoordinir oleh Fajar Kemal Gustaman (mahasiswa Tingkat IV) ini melaksanakan tugas berdasarkan Surat Tugas dari Ketua STPN Nomor 388/ST-800.35/V/2014. Setelah bekerja keras, akhirnya para mahasiswa berhasil membantu penyelesaian berkas sebanyak 60% dari target pemberkasan saat itu (1.824 berkas).

Kesungguhan hati para mahasiswa dalam menjalankan misi “sinergi” demi kelancaran pelaksanaan konsolidasi tanah layak diapresiasi, karena mereka berhasil menjadi “duta” STPN dalam kehidupan nyata. Secara sosiologis ada empat hal yang mendorong para mahasiswa bersungguh hati menjalankan misinya, yaitu: **Pertama**, *attachment*, ketika

para mahasiswa telah dilatih melalui beberapa PKL (Praktik Kuliah Lapangan), untuk bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat, sehingga memiliki kepekaan terhadap pikiran, perasaan dan kehendak masyarakat; **Kedua**, *commitment*, ketika para mahasiswa telah dilatih melalui kuliah, praktik, praktikum, dan PKL untuk memiliki keterikatan dengan BPN RI, sehingga memiliki semangat yang kuat, untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas BPN RI, termasuk konsolidasi tanah; **Ketiga**, *involvement*, ketika para mahasiswa telah dilatih melalui kuliah, praktik, praktikum, dan PKL, untuk memiliki kesadaran terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat; **Keempat**, *beliefs*, yaitu ketika para mahasiswa telah dilatih melalui interaksi sosialnya dengan sivitas akademika, untuk memiliki keyakinan tentang keutamaan nilai-nilai kebajikan, yang diwujudkan dalam bentuk hidup yang bermanfaat bagi masyarakat.

Oleh karena urgensi konsolidasi tanah bagi masyarakat, Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menghubungi Ketua STPN melalui Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0886/400-34/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014 perihal Perpanjangan Waktu Bantuan Tenaga Mahasiswa STPN. Selanjutnya Ketua STPN merespon dengan mengeluarkan Surat Tugas dari Ketua STPN Nomor 440/ST-800.35/VI/2014 yang menugaskan mahasiswa STPN atas nama Fajar Kemal Gustaman dan kawan-kawan, sebanyak 12 orang, untuk membantu masyarakat menyiapkan kelengkapan berkas sebagai peserta konsolidasi tanah pada tanggal 1 hingga 11 Juni 2014.

Respon cepat Ketua STPN untuk membantu kelancaran pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo, layak “dibaca” sebagai bentuk dukungan STPN bagi terjadinya perubahan (ke arah lebih teratur dan lebih tertib) penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Para sosiolog berbeda pendapat ketika membahas perubahan (*change*), sehingga ada yang berpandangan: **Pertama**, perubahan hanya dimungkinkan bila terjadi perubahan teknologi dan perubahan benda-benda yang ada di masyarakat. Kelompok ini disebut kelompok materialistik, yang dimotori oleh Karl Marx, yang menyatakan: (1) kincir angin menimbulkan masyarakat feodal, dan (2) mesin uap menimbulkan masyarakat kapitalis; **Kedua**, perubahan hanya dimungkinkan bila terjadi perubahan ide, ideologi dan nilai (*value*) di masyarakat. Kelompok ini disebut kelompok idealistik, yang dalam konteks kekinian menempatkan konsolidasi tanah sebagai salah satu bukti pendorong perubahan.

Sebagai pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugasnya, para mahasiswa STPN menyampaikan laporan kegiatannya, yang ditandatangani oleh Koordinator Kegiatan, Fajar Kemal Gustaman. Laporan tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan tugas membantu masyarakat, untuk menyiapkan kelengkapan berkas sebagai peserta konsolidasi tanah pada tanggal 21 hingga 31 Mei 2014 yang kemudian diperpanjang pada tanggal 1 hingga 11 Juni 2014. Lebih jauh laporan tersebut menyatakan, bahwa mahasiswa telah membantu masyarakat menyiapkan kelengkapan berkas sebagai peserta konsolidasi

tanah, yang volumenya mencapai 1.619 berkas atau 88,76% dari target pemberkasan konsolidasi tanah yang mencapai 1.824 berkas.

Kesediaan mahasiswa STPN membantu masyarakat dalam pelaksanaan konsolidasi tanah, dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan para mahasiswa bagi berlangsungnya perubahan tradisi pertanahan di masyarakat. Perubahan ini identik dengan perubahan budaya, yaitu dari kebiasaan mengabaikan alat bukti kepemilikan atas tanah, menuju kebiasaan baru yang lebih memperhatikan alat bukti kepemilikan atas tanah. Selain itu, terjadi perubahan dari tradisi lisan dalam transaksi pertanahan, menjadi tradisi tertulis dalam transaksi pertanahan. Dengan demikian mahasiswa STPN turut mendorong terjadinya perubahan di masyarakat, melalui penerimaan cara-cara baru dalam memenuhi kebutuhan mereka (masyarakat) di bidang pertanahan.

Selanjutnya, pada hari Jum'at, 5 September 2014, PPPM-STPN kembali berpartisipasi dalam kegiatan "Pembinaan Pengumpulan Data Identifikasi Subjek dan Objek serta Penyusunan Rencana Pra Desain Konsolidasi Tanah Desa Umbulharjo dan Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman", yang dilaksanakan di Hotel Griya Persada (Ruang Ayodya 1), Jalan Boyong 99, Kaliurang Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh: (1) Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kanwil BPN DIY; (2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman; (3) Camat Cangkringan; (4) Kepala Seksi Konsolidasi Tanah; (5) Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantah Kabupaten Sleman; (6) Kepala Seksi Hak

Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantah Kabupaten Sleman; (7) Manajer Pemberdayaan Masyarakat PPPM – STPN; (8) Kepala Desa Umbulharjo; (9) Kepala Desa Kepuharjo; (10) Kepala Bagian Pemerintahan Desa Umbulharjo; (11) Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kepuharjo; dan (12) para peserta konsolidasi tanah.

Kehadiran PPPM-STPN merupakan bentuk dukungan bagi terselenggaranya pengumpulan data hasil identifikasi subjek dan objek konsolidasi tanah, serta penyusunan rencana pra desain. Kegiatan penyusunan rencana pra desain merupakan tahapan penting dalam konsolidasi tanah, yang melibatkan pelaksana dan masyarakat. Selain memperhatikan bentuk, posisi, penguasaan dan pemilikan tanah, rencana pra desain hendaknya memperhatikan kondisi saat ini, yang diwarnai oleh adanya status di masyarakat yang tersusun secara baru. Saat ini status tidak lagi tersusun sebagai bentuk bawaan sejak lahir atau “status yang diperoleh” (*ascribed status*), melainkan tersusun berdasarkan pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan lain-lain atau “status yang diraih” (*achieved status*). Perubahan ini muncul karena terjadinya perubahan moda produksi agraris menjadi industri (kapitalis) di masyarakat.

Pengumpulan data hasil identifikasi subjek dan objek konsolidasi tanah, serta penyusunan rencana pra desain di Hotel Griya Persada diselenggarakan dengan format rapat. Kegiatan ini difasilitasi oleh moderator, dengan narasumber para pejabat Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Rapat ini memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para peserta konsolidasi

tanah dan kepala desa serta kepala bagian pemerintahan desa, untuk menyampaikan gagasan dan pemikirannya.

Kesempatan seluas-luasnya kepada para peserta untuk menyampaikan ide, gagasan, masukan, saran dan pemikirannya, memperlihatkan semangat partisipatoris dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. Semangat ini berguna untuk mengatasi ketidak-setaraan sosial (*social inequality*) di masyarakat, yang terbentuk karena adanya perbedaan anggota masyarakat dalam hal kelas (kesejahteraan), status dan kekuasaan. Ketidak-setaraan sosial perlu direduksi, sebab kelas, status, dan kekuasaan apapun yang ada pada diri seorang anggota masyarakat tidak dapat melepaskannya dari sifat saling membutuhkan.

Semangat kesetaraan dan partisipatoris, akhirnya “mencairkan” suasana rapat, sehingga menghasilkan tiga keputusan penting, sebagai berikut: **Pertama**, oleh karena pemberkasan bidang tanah bagi peserta konsolidasi tanah hanya mencapai 1.668 bidang atau 87,79% dari target 1.900 bidang, maka keputusan untuk menambah atau tidak menambah capaian tersebut, diserahkan pada Kepala Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, yang untuk menambah pencapaian telah tersedia tanah kas desa; **Kedua**, peserta konsolidasi tanah menyepakati Rencana Pra Desain Konsolidasi Tanah, termasuk pelebaran jalur evakuasi dan jalan desa sebagai bentuk STUP (Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan); **Ketiga**, Rencana Pra Desain Konsolidasi Tanah dibawa pada Rapat Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah, yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2014.

Berdasarkan hasil kegiatan “Pembinaan Pengumpulan Data Identifikasi Subjek dan Objek serta Penyusunan Rencana Pra Desain Konsolidasi Tanah Desa Umbulharjo dan Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman” di Hotel Griya Persada diketahui, bahwa: **Pertama**, telah terjadi peningkatan target, dari 1.824 bidang sampai dengan 11 Juni 2014, menjadi 1.900 bidang sampai dengan 5 September 2014. **Kedua**, telah terjadi peningkatan jumlah berkas yang ditangani, dari 1.619 berkas sampai dengan 11 Juni 2014, menjadi 1.668 berkas sampai dengan 5 September 2014.

Peningkatan target dan jumlah berkas yang berhasil ditangani oleh pelaksana konsolidasi tanah memperlihatkan, bahwa telah terjalin kerjasama yang baik antar semua pihak yang terkait dan terlibat dalam kegiatan ini. Kerjasama timbul ketika semua pihak menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama, yaitu mendukung pelaksanaan konsolidasi tanah di Lereng Merapi. Pada saat yang sama, mereka telah menyumbangkan kemampuan dan kompetensinya masing-masing untuk memenuhi kepentingan bersama tersebut.

Selain peningkatan target dan jumlah berkas yang berhasil ditangani, kegiatan “Pembinaan Pengumpulan Data Identifikasi Subjek dan Objek serta Penyusunan Rencana Pra Desain Konsolidasi Tanah Desa Umbulharjo dan Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman”, yang dilaksanakan di Hotel Griya Persada juga menghasilkan pernyataan, bahwa peserta konsolidasi tanah menyepakati Rencana Pra Desain Konsolidasi Tanah, termasuk pelebaran

jalur evakuasi dan jalan desa sebagai bentuk STUP.

Pernyataan kesepakatan ini menunjukkan kuatnya relasi pelaksana dengan masyarakat, dan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan konsolidasi tanah. Relasi yang kuat dan kepercayaan yang besar dalam konsolidasi tanah, memperlihatkan adanya hubungan yang saling menguntungkan, yaitu terciptanya hubungan yang secara subjektif mampu memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Hubungan ini dapat terwujud karena adanya kemampuan komunikasi yang baik pada pelaksana konsolidasi tanah, yaitu berupa kemampuan menyampaikan pesan dari komunikator (pelaksana konsolidasi tanah) kepada komunikan (masyarakat), melalui media (penyuluhan, rapat, dan diskusi), sehingga diperoleh *feedback* (masukan) bagi perbaikan pelaksanaan konsolidasi tanah.

Kegiatan “Pembinaan Pengumpulan Data Identifikasi Subjek dan Objek serta Penyusunan Rencana Pra Desain Konsolidasi Tanah Desa Umbulharjodan Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman”, yang dilaksanakan di Hotel Griya Persada juga menghasilkan rekomendasi, bahwa Rencana Pra Desain Konsolidasi Tanah yang telah disepakati akan dibawa pada Rapat Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah, yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2014.

Rekomendasi yang dihasilkan ini merupakan wujud kepercayaan masyarakat kepada pelaksana konsolidasi tanah, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang tercermin dalam Rencana Pra Desain Konsolidasi Tanah. Kepercayaan ini muncul, karena: **Pertama**, adanya

kepercayaan yang juga diberikan oleh pelaksana konsolidasi tanah kepada masyarakat, terutama dalam membangun beberapa kesepakatan; **Kedua**, adanya sistem nilai yang dibangun oleh pelaksana konsolidasi tanah bersama-sama dengan masyarakat, seperti: keadilan, kerjasama, harmoni, dan kesejahteraan; **Ketiga**, adanya kerjasama yang terus menerus dibangun dan dikembangkan oleh pelaksana konsolidasi tanah dan masyarakat.

Akhirnya Rapat Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah, yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2014 berhasil menyetujui Rencana Pra Desain Konsolidasi Tanah, yang kemudian menjadi acuan pelaksanaan konsolidasi tanah. Tim Konsolidasi Tanah Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman selanjutnya bekerja menyelesaikan program ini, dengan dukungan yang kuat dari masyarakat (peserta konsolidasi tanah) dan Pemerintah Desa Umbulharjo serta Pemerintah Desa Kepuharjo.

Dukungan yang kuat dari masyarakat dan pemerintah desa atas pelaksanaan konsolidasi tanah, layak disebut “dukungan sosial”, yaitu sumberdaya sosial yang dapat dimanfaatkan dalam konteks emosional dan informasional bagi terselenggaranya suatu kegiatan, termasuk alternatif solusi atas masalah yang dihadapi. Ketika dukungan sosial dimiliki oleh pelaksana konsolidasi tanah, maka mereka dapat memperoleh: **Pertama**, bantuan informasi, berupa keterangan yang dibutuhkan bagi kelancaran pelaksanaan konsolidasi tanah; **Kedua**, bantuan verbal, berupa ucapan

yang mencerminkan sikap dukungan dan kesiapan membela pelaksanaan konsolidasi tanah; **Ketiga**, bantuan tindakan, berupa keterlibatan masyarakat dalam beberapa tahapan pelaksanaan konsolidasi tanah.

Dukungan sosial inilah yang berhasil mendorong keberhasilan dalam menyusun Rencana Pra Desain Konsolidasi Tanah, setelah disepakatinya STUP (Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan), yang sekaligus merupakan salah satu ciri konsolidasi tanah. Dalam pelaksanaannya disepakati, bahwa STUP di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo adalah, sebagai berikut: **Pertama**, besarnya (luasnya) sumbangan tanah untuk pembangunan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama peserta konsolidasi tanah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Daerah; **Kedua**, tidak ada peserta yang mengganti sumbangan tersebut dengan uang atau bentuk lainnya, meskipun hal ini dimungkinkan bila persil atau luas tanahnya terlalu kecil, yang tidak memungkinkan bagi yang bersangkutan menyerahkan sebagian tanahnya sebagai sumbangan tanah untuk pembangunan.

STUP yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama telah membuktikan, bahwa masyarakat memiliki kemampuan merumuskan kepentingan dan kebutuhannya. Kemampuan ini sekaligus menunjukkan: **Pertama**, keberdayaan masyarakat, ketika berbekal segenap potensi (pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku) yang ada pada dirinya, mereka berhasil menentukan dan memperjuangkan kepentingannya; **Kedua**, kolektivitas masyarakat, ketika berbekal semangat individual masing-masing anggota masyarakat, ternyata

mereka berhasil menyepakati adanya kepentingan bersama yang harus diperjuangkan; **Ketiga**, eksistensi masyarakat, ketika mereka berhasil memperlihatkan dirinya sendiri dalam bentuk keberdayaan dan kolektivitas.

Tidak boleh ada pihak yang mengabaikan STUP sebagai ciri khas konsolidasi tanah, karena STUP merupakan unsur eksistensial yang menunjukkan bahwa konsolidasi tanah adalah model pembangunan partisipatif. STUP atau *Land Contribution/Sharing* adalah bagian dari objek konsolidasi tanah yang disediakan untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya, serta TPBP (Tanah Pengganti Biaya Pembangunan). TPBP atau CEL (*Cost Equivalent Land*) adalah bagian dari STUP yang diserahkan kepada pihak ketiga dengan pembayaran kompensasi berupa uang, yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pelaksanaan konsolidasi tanah.

Sesuai dengan asas pembiayaan konsolidasi tanah yang ditanggung oleh para peserta konsolidasi tanah itu sendiri, maka sesungguhnya setiap pelaksanaan konsolidasi tanah dapat dibiayai dari hasil penjualan TPBP atau CEL itu kepada pihak ketiga. Dengan demikian pembiayaan konsolidasi tanah akan terutama diperoleh dari dana penatagunaan tanah-tanah yang dikonsolidasi itu sendiri. Namun ternyata dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Indonesia pada umumnya, TPBP (CEL) belum dapat diwujudkan. STUP yang ada baru pada tahap dialokasikan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum atau sosial (Sitorus, 2014:7-8).

Pembiayaan mandiri merupakan konsep utama yang diemban oleh terminologi “TPBP” (CEL) dalam konsolidasi

tanah, tetapi konsep ini belum sempat masuk dalam kesadaran subjektif masyarakat. Kegagalan ini disebabkan masyarakat tidak memandang “pembiayaan mandiri dalam konsolidasi tanah” sebagai sesuatu yang mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu perasaan, ide, gagasan dan keinginan yang berkembang di masyarakat mengarahkan mereka untuk memperhatikan hal lain, sehingga mengabaikan konsep pembiayaan mandiri dalam konsolidasi tanah.

Adanya pengabaian konsep pembiayaan mandiri terjadi dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo, sehingga tidak diperoleh TPBP. Kondisi ini terjadi, karena STUP baru sebatas untuk pengadaan tanah bagi pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum atau sosial. Terbaikannya konsep pembiayaan mandiri, juga dikarenakan sejak awal diketahui bahwa konsolidasi tanah di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Hal ini sesuai dengan pandangan Sitorus (2014:8), yang menjelaskan bahwa untuk konteks Indonesia, pada umumnya TPBP belum dapat diwujudkan.

Namun demikian pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo tidak melupakan penyelesaian hak atas tanah, yang prosesnya sebagai berikut: **Pertama**, penetapan objek konsolidasi tanah, di mana para peserta konsolidasi tanah harus terlebih dahulu melepaskan hak atas tanahnya. Penetapan objek konsolidasi tanah dilakukan oleh Kepala BPN-RI atas usul Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman melalui Kepala Kanwil BPN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; **Kedua**, hak atas tanah objek konsolidasi tanah diberikan kepada peserta konsolidasi tanah sesuai dengan rencana penataan kapling yang disetujui para peserta konsolidasi tanah. **Ketiga**, pemberian hak atas tanah dilaksanakan secara kolektif, agar lebih praktis dan mendorong terbentuknya kebersamaan di kalangan peserta konsolidasi tanah.

Penyelesaian hak atas tanah ex konsolidasi menjadi babakan paling ditunggu oleh masyarakat, karena berkaitan dengan sumber penghidupan dan harta yang paling berharga. Beberapa hal penting yang menjadi dampak penyelesaian hak atas tanah, meliputi: **Pertama**, *enabling*, ketika berhasil diciptakan kondisi yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menggunakan dan mengembangkan pemanfaatan tanahnya. **Kedua**, *empowering*, ketika berhasil diciptakan kondisi yang memungkinkan bagi masyarakat untuk memperoleh dorongan atau tambahan semangat dalam menggarap tanah yang dikuasainya. **Ketiga**, *protecting*, ketika berhasil diciptakan kondisi yang memungkinkan bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum atas kepemilikan tanahnya.

Dengan demikian konsolidasi tanah di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo merupakan suatu kebijakan pemerintah, yang memiliki nuansa pemberdayaan masyarakat (*enabling*, *empowering*, dan *protecting*), yang berisi penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Kebijakan ini relevan dengan upaya masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan

sumber daya alam, sehingga terwujud pemanfaatan tanah yang optimal melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah.

Kebijakan ini (konsolidasi tanah) dapat terlaksana, sebab didukung oleh komunikasi yang baik antara para pelaksana dengan masyarakat. Langkah yang telah ditempuh dalam membangun komunikasi demi kelancaran pelaksanaan konsolidasi tanah, meliputi: **Pertama**, membangun interaksi sebaik mungkin antara pelaksana konsolidasi tanah dengan masyarakat (peserta). **Kedua**, melibatkan masyarakat (peserta) secara aktif-proporsional dalam seluruh tahapan kegiatan sehingga mampu berkontribusi bagi kelancaran pelaksanaan konsolidasi tanah. **Ketiga**, menggalang kemitraan strategis dengan berbagai pihak demi keberhasilan pelaksanaan konsolidasi tanah.

Dalam rangka membangun komunikasi dan mengambil keputusan penting, pada hari Selasa, 14 Oktober 2014, diselenggarakan kegiatan “Supervisi dan Monitoring: Pembinaan Pengukuran Pemindahan Desain Konsolidasi Tanah” di Hotel Griya Persada (Ruang Ayodya 1), Jalan Boyong 99, Kaliurang Barat. PPPM-STPN turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, dengan memperhatikan, mendorong dan mendukung diskusi antara pelaksana konsolidasi tanah dengan peserta. Hasil yang diperoleh dari acara ini berupa pemahaman, bahwa seluruh kegiatan konsolidasi tanah di lereng Merapi dibiayai oleh anggaran Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, yang untuk 1.694 bidang tanah akan menghabiskan dana sebesar Rp. 1.355.200.000,- dengan HSBK

(Harga Satuan Biaya Keluaran) sebesar Rp. 800.000,- per bidang.

Besarnya biaya APBN yang dikeluarkan untuk konsolidasi tanah di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo telah “memaksa” para pelaksana untuk bersikap lebih hati-hati. Para pelaksana mengerti bahwa biaya yang dikeluarkan dimaksudkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat, berupa hak atas tanah yang memiliki jaminan kepastian hukum, dengan bentuk dan letak bidang tanah yang teratur. Kebutuhan lainnya yang dapat terpenuhi, meliputi: **Pertama**, pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*), berupa adanya bidang tanah yang dapat menjadi sumber penghidupan; **Kedua**, pemenuhan mekanisme yang tepat, melalui pelaksanaan seluruh tahapan konsolidasi tanah; **Ketiga**, pemenuhan peningkatan pendapatan, saat bidang tanah yang dimiliki dapat dikelola dengan lebih baik; **Keempat**, pemenuhan perhatian, ketika pelaksana konsolidasi tanah berhasil memposisikan masyarakat sebagai subjek kegiatan.

Kegiatan “Supervisi dan Monitoring: Pembinaan Pengukuran Pemandangan Desain Konsolidasi Tanah” di Hotel Griya Persada dihadiri oleh: (1) Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kanwil BPN DIY; (2) Kepala Seksi Konsolidasi Tanah; (3) Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantah Kabupaten Sleman; (4) Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantah Kabupaten Sleman; (5) Manajer Eksekutif PPPM – STPN; (6) Manajer Pemberdayaan Masyarakat PPPM – STPN; (7) Kepala Desa Umbulharjo;

(8) Kepala Desa Kepuharjo; (9) Pejabat Pembuat Komitmen (Rudi, S.H., M.Hum.); dan para peserta konsolidasi tanah.

Kesediaan banyak pihak untuk terlibat dalam kegiatan “Supervisi dan Monitoring: Pembinaan Pengukuran Pemindahan Desain Konsolidasi Tanah” di Hotel Griya Persada menunjukkan keberhasilan pelaksana dalam mendekati masyarakat. Dengan menggunakan perspektif “ACTOR” (Eko Dermawan dalam Nugroho, 2013:124), maka keberhasilan pelaksana dalam mendekati masyarakat, dapat terwujud karena adanya hal-hal berikut ini: **Pertama**, *authority*, ketika pelaksana memberi wewenang pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan konsolidasi tanah; **Kedua**, *confidence and competence*, ketika pelaksana berhasil membangun rasa percaya diri dan kesanggupan masyarakat, untuk berpartisipasi dalam kegiatan konsolidasi tanah; **Ketiga**, *truth*, ketika pelaksana berhasil menanamkan keyakinan pada masyarakat, bahwa mereka mampu berpartisipasi dalam kegiatan konsolidasi tanah; **Keempat**, *opportunity*, ketika pelaksana memberi kesempatan pada masyarakat, untuk berpartisipasi dalam kegiatan konsolidasi tanah; **Kelima**, *responsibility*, ketika pelaksana memberi tanggungjawab pada masyarakat saat berpartisipasi dalam kegiatan konsolidasi tanah; **Keenam**, *support*, ketika pelaksana memberi dukungan sepenuhnya atas kemanfaatan konsolidasi tanah bagi masyarakat.

Kegiatan yang menunjukkan keberhasilan pelaksana dalam mendekati masyarakat (di Hotel Griya Persada) ini diformat dalam bentuk “rapat”, yang difasilitasi oleh moderator,

dengan narasumber para pejabat Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Sementara itu, peserta konsolidasi tanah dan kepala desa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan gagasan dan pemikirannya. Pada “rapat” ini petugas ukur juga diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya, termasuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, hambatan, permasalahan, dan solusi dalam pengukuran bidang-bidang tanah peserta konsolidasi tanah.

Kesempatan yang diberikan kepada para petugas ukur untuk “bicara”, telah menambah energi sosial dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. Secara faktual kesempatan ini telah menciptakan: **Pertama**, penghormatan terhadap gagasan (*ideas*) yang dimiliki oleh para petugas ukur, berupa “terobosan” atas masalah pengukuran yang sedang dihadapi dalam pelaksanaan konsolidasi tanah; **Kedua**, penghormatan terhadap harapan (*ideals*) yang dimiliki oleh para petugas ukur, berupa keinginan untuk menyelesaikan pengukuran tepat waktu, sehingga memperlancar pelaksanaan konsolidasi tanah; **Ketiga**, penghormatan terhadap persaudaraan (*friendship*) yang dibangun petugas ukur, berupa solidaritas untuk saling membantu penyelesaian kegiatan pengukuran dalam pelaksanaan konsolidasi tanah.

Sebagai hasil atas adanya kesempatan bicara yang diberikan pada petugas ukur dan usulan peserta “rapat” lainnya, maka disepakati bahwa oleh karena jumlah bidang tanah yang telah dilakukan identifikasi atas subjek dan objeknya mencapai 1.694 bidang, sehingga pengukuran hanya

boleh dilakukan atas bidang-bidang tanah ini. Demikian pula halnya dengan proses pemberkasan, hanya boleh dilakukan atas bidang-bidang tanah ini. Dengan kata lain, bidang-bidang tanah ini (1.694 bidang) merupakan target pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo.

Penetapan target sebesar 1.694 bidang bagi pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo relevan dengan kondisi teknis dan yuridis bidang-bidang tanah yang terdapat di lokasi. Selain itu, penetapan target ini juga dapat dimaknai sebagai bentuk: **Pertama**, strategi kedaruratan, ketika penyelesaian konsolidasi tanah dipandang sebagai sesuatu yang mendesak pasca erupsi Gunung Merapi, yang muaranya berupa penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penerbitan sertipikat hak atas tanah; **Kedua**, strategi kesementaraan, ketika dikeluarkan beberapa keputusan yang meringankan (misal: pemasangan patok batas sementara) untuk mendukung kecepatan pekerjaan (misal: pengukuran), yang kemudian akan diperbaiki (misal: pemasangan patok batas sesuai ketentuan) seiring dengan pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan; **Ketiga**, strategi pemberdayaan, ketika seluruh kegiatan dirancang untuk memberi kesempatan pada segenap unsur, untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan konsolidasi tanah.

Berdasarkan laporan dari petugas ukur diketahui, bahwa telah dilakukan pengukuran atas 1.040 bidang tanah peserta konsolidasi tanah dari target sebanyak 1.694 bidang, atau sebanyak 61,39%, yang rinciannya sebagai berikut: (1) Dusun

Pangukrejo, Desa Umbulharjo telah diukur 250 bidang dari target sebanyak 486 bidang; (2) Dusun Pelemsari, Desa Umbulharjo telah diukur 110 bidang dari target sebanyak 167 bidang; (3) Dusun Petung, Desa Kepuharjo telah diukur 130 bidang dari target sebanyak 325 bidang; (4) Dusun Kaliadem, Desa Kepuharjo telah diukur 250 bidang dari target sebanyak 301 bidang; (5) Dusun Jambu, Desa Kepuharjo telah diukur 200 bidang dari target sebanyak 212 bidang; (6) Dusun Kopeng, Desa Kepuharjo telah diukur 100 bidang dari target sebanyak 203 bidang.

Selain itu para petugas ukur juga melaporkan adanya kendala, yang antara lain berupa keterbatasan alat, beratnya medan (lokasi bidang tanah), dan belum terpasangnya patok batas; dengan rincian, sebagai berikut: (1) Dusun Pangukrejo, Desa Umbulharjo, mengalami kendala berupa medan yang berat; (2) Dusun Pelemsari, Desa Umbulharjo tidak mengalami kendala; (3) Dusun Petung, Desa Kepuharjo mengalami kendala berupa adanya patok yang belum dipasang oleh peserta konsolidasi tanah; (4) Dusun Kaliadem, Desa Kepuharjo tidak mengalami kendala; (5) Dusun Jambu, Desa Kepuharjo mengalami kendala berupa medan yang berat; (6) Dusun Kopeng, Desa Kepuharjo mengalami kendala berupa keterbatasan alat.

Meskipun memiliki beberapa kendala, pada umumnya para petugas ukur mampu mengukur sebanyak 10 – 20 bidang tanah dalam satu hari. Oleh karena itu, para petugas ukur menyepakati, bahwa dalam waktu satu minggu ke depan pelaksanaan pengukuran akan dapat diselesaikan. Untuk itu

akan dilakukan saling bantu antara petugas ukur di satu dusun dengan petugas di dusun lain. Apabila petugas ukur di satu dusun telah selesai, maka ia akan membantu petugas ukur di dusun yang lain. Hal ini tidak akan merugikan pengupahan para petugas ukur, karena upah akan dibayarkan secara proporsional.

Berbekal kepiawaian para narasumber (para pejabat Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman) dalam mengarahkan dan memotivasi peserta “rapat”, maka berhasil disepakati, bahwa: (1) Pengukuran bidang tanah peserta konsolidasi tanah di lereng Merapi akan selesai dalam satu minggu; (2) Kendala yang ada diatasi secara bersama-sama oleh jajaran Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, serta petugas ukur dan peserta konsolidasi tanah.

Akhirnya konsolidasi tanah di Lereng Merapi berhasil dilakukan, dengan cakupan: (1) Dusun Pengukrejo, Desa Umbulharjo, sebanyak 486 bidang; (2) Dusun Pelemsari, Desa Umbulharjo, sebanyak 167 bidang; (3) Dusun Petung, Desa Kepuharjo, sebanyak 325 bidang; (4) Dusun Kaliadem, Desa Kepuharjo, sebanyak 301 bidang; (5) Dusun Jambu, Desa Kepuharjo, sebanyak 212 bidang; (6) Dusun Kopeng, Desa Kepuharjo, sebanyak 203 bidang.

Konsolidasi tanah di Lereng Merapi yang merupakan kegiatan pemerintah, akhirnya berujung pada penerbitan sertipikat hak atas tanah, dan “dirayakan” dengan Kegiatan Penyerahan Sertipikat Konsolidasi Tanah di Lereng Merapi,

oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Fery Mursidan Baldan, pada Hari Jum'at, tanggal 6 Maret 2015. Meskipun kegiatan konsolidasi tanah telah sampai di ujung, tetapi sesungguhnya hal ini masih tahap permulaan bagi masyarakat, dalam upaya mereka mewujudkan *ecotourism* sebagai sebuah strategi penghidupan.

Oleh karena yang dilakukan di Lereng Merapi adalah konsolidasi tanah (penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah), maka ikhtiar ini sudah selayaknya menutup kekhawatiran akan terjadinya konsolidasi modal para investor (dari luar wilayah Lereng Merapi). Sebagaimana semangat konsolidasi tanah yang ingin meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat (peserta konsolidasi tanah), kegiatan berikutnya (*ecotourism*) tidak boleh menjadi "lokomotif" penarik gerbong investor dari luar wilayah. *Ecotourism* tidaklah dimaksudkan mentransformasi masyarakat tani menjadi masyarakat wisata, melainkan mengupayakan agar masyarakat tani yang ada memiliki kemampuan mengemas kegiatan tani dan ikutannya sebagai objek wisata.

BAB III

ECOTOURISM LERENG MERAPI

A. *Ecotourism*: Sebuah Strategi Penghidupan

Setelah dilakukannya konsolidasi tanah, maka Dusun Pangukrejo, Dusun Pelemsari, Dusun Petung, Dusun Kaliadem, Dusun Jambu, dan Dusun Kopeng membutuhkan tindaklanjut berupa perbaikan infra struktur, dan pemberdayaan masyarakat. Potensi dusun-dusun di Lereng Merapi layak dimanfaatkan dalam ikhtiar pemberdayaan masyarakat, dengan memperhatikan ketentuan atas wilayah KRB III, yang antara lain diperkenankan bagi: (1) pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana; dan (2) pemanfaatan sumberdaya air, hutan, pertanian lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam. Oleh karena itu, pada wilayah ini dapat dikembangkan *ecotourism*, agar masyarakat dapat sejahtera dengan tetap melestarikan kemampuan lingkungan.

Pelaksanaan (penerapan) dan pengembangan *ecotourism* di Lereng Merapi memberi kesempatan pada masyarakat

setempat, untuk meningkatkan kemampuannya dalam memanfaatkan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya. *Ecotourism* juga memberi kesempatan pada masyarakat setempat, untuk belajar dari kondisi lingkungannya, sehingga pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku mereka menjadi lebih ramah terhadap lingkungannya.

UNESCO *Office* di Jakarta (UNESCO, 2009:15) menjelaskan, bahwa *ecotourism* (ekowisata) merupakan pariwisata bertanggung-jawab yang dilakukan pada tempat-tempat alami, serta memberi kontribusi terhadap kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pandangan UNESCO yang memadukan kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ini diadopsi dari pandangan TIES (*The International Ecotourism Society*).

Berbasis prinsip belajar terus menerus, masyarakat di Lereng Merapi berpeluang membangun dan mengembangkan pariwisata bertanggung-jawab, dengan memanfaatkan secara lestari kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada. Situasi ini dikonstruksi melalui penalaran, perencanaan, interpretasi, dan perbandingan kondisi Lereng Merapi dengan wilayah lain yang berhasil memajukan *ecotourism*. Masyarakat setempat juga mampu mengatur dirinya sendiri, sehingga mereka dapat mendukung berbagai upaya pelestarian kondisi alam, sosial, dan budaya.

Relevan dengan dinamika masyarakat setempat, dan pandangan UNESCO tentang *ecotourism*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia (2009) memiliki pandangan yang “senada”, bahwa *ecotourism*

merupakan konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya, sehingga kegiatan ini dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat.

Ketika Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia (2009) menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan *ecotourism*, maka hal ini barulah memungkinkan, bila ditempuh upaya untuk menciptakan interaksi timbal-balik yang berkesinambungan antara faktor kognitif (pemikiran), faktor perilaku, dan faktor lingkungan. Dalam proses determinasi timbal-balik itulah terletak kesempatan bagi masyarakat, untuk memperbaiki kemampuannya. Masyarakat tidak menempatkan diri semata-mata sebagai objek tak berdaya, melainkan subjek yang mampu berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku, yang dapat memanfaatkan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian antara masyarakat dengan lingkungan merupakan pihak yang saling mempengaruhi atau berelasi timbal balik.

Relasi timbal balik antara masyarakat dengan lingkungannya inilah, yang sedikit banyak “mewarnai” beberapa prinsip dalam *ecotourism*, seperti: **Pertama**, memiliki komitmen pelestarian lingkungan dan ekonomi berkelanjutan; **Kedua**, mengikuti kaidah-kaidah ekologis dan permusyawaratan masyarakat setempat; **Ketiga**, memberikan manfaat kepada masyarakat setempat; **Keempat**, peka

dan hormat terhadap nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat; **Kelima**, memperhatikan perjanjian, peraturan, perundang-undangan baik ditingkat nasional maupun internasional (Sitorus, 2014:10).

Beberapa prinsip *ecotourism* ini, dapat diterapkan di wilayah Lereng Merapi oleh masyarakat setempat, dengan memanfaatkan konsep “imitasi” (meniru), yaitu proses meniru atau mencontoh kegiatan *ecotourism* yang telah sukses di wilayah lain. Imitasi juga meliputi proses belajar masyarakat Lereng Merapi, yang memanfaatkan tokoh lokal atau tokoh-tokoh regional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman *ecotourism*. Sementara itu, masyarakat juga dapat menjadikan tokoh-tokoh regional yang bergerak di sektor *ecotourism*, sebagai model yang dapat ditiru kemampuannya mengelola *ecotourism*.

Berkaitan dengan posisi *ecotourism* dalam pasar wisata, Stradas (2001) dalam salah satu publikasi WTO (*World Trade Organization*) menjelaskan, bahwa pasar wisata terdiri dari 4 (empat) elemen, yaitu: wisata budaya, wisata rural (perdesaan), wisata alam, dan wisata kesehatan. Sementara itu, wisata alam terdiri dari: *ecotourism* dan wisata petualangan (*adventure*). Stradas juga menjelaskan, bahwa *ecotourism* merupakan bagian dari wisata alam, yang memiliki keterkaitan dengan wisata budaya dan wisata rural.

Keterkaitan antara *ecotourism* (bagian dari wisata alam) dengan wisata budaya dan wisata rural, menjadi basis teoritik (konseptual) bagi optimisme masyarakat Lereng Merapi, yang ingin melakukan optimalisasi pemanfaatan kondisi

alam, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian terjadi penguatan optimisme masyarakat Lereng Merapi, yang memicu semangat individual dan kolektif mereka. Atribut-atribut seperti usia, status sosial, jenis kelamin, dan lain-lain tidak mampu menghalangi optimisme yang muncul. Bahkan masyarakat mampu memperbaiki karakter individualnya yang mengarah pada sifat “hangat” dan kompeten, sehingga lebih kompatibel terhadap kegiatan *ecotourism*.

Karakter individual yang hangat dan kompeten memudahkan penerapan 5 (lima) prinsip dasar pengembangan *ecotourism* di Indonesia (lihat UNESCO, 2009:18-20), yaitu: **Pertama**, prinsip pelestarian, yang memberi arahan agar kegiatan *ecotourism* yang dilakukan tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dan budaya setempat. Salah satu cara menerapkan prinsip ini adalah dengan menggunakan sumberdaya lokal yang hemat energi dan dikelola oleh masyarakat setempat. Selain itu, wisatawan juga harus menghormati dan turut serta dalam pelestarian alam dan budaya pada daerah yang dikunjunginya. Lebih baik lagi, bila sebagian pendapatan dari kegiatan *ecotourism* digunakan untuk kegiatan pelestarian di tingkat lokal. Misalnya sekian persen dari pendapatan dikontribusikan untuk membeli tempat sampah, dan membayar orang yang akan mengelola sampah dan kebersihan.

Kedua, prinsip pendidikan, yang memberi arahan agar kegiatan *ecotourism* yang dilakukan berkontribusi dan mampu memberi pendidikan pada masyarakat setempat, para wisatawan, dan masyarakat secara luas. Salah satu cara

menerapkan prinsip ini adalah dengan memberikan informasi menarik tentang nama dan manfaat tumbuhan, hewan, dan bentang alam yang ada di lokasi wisata. Termasuk dedaunan yang digunakan untuk obat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, serta kepercayaan dan adat istiadat masyarakat setempat. Pendidikan (edukasi) yang diterima oleh masyarakat setempat dan para wisatawan, akan mendorong mereka untuk melestarikan alam dan budaya di daerah wisata. Kegiatan ini membutuhkan alat bantu berupa leaflet, brosur, buklet dan papan informasi.

Ketiga, prinsip pariwisata, yang memberi arahan agar kegiatan *ecotourism* yang dilakukan memiliki unsur kesenangan yang mampu membuat wisatawan nyaman dan nikmat atas menu wisata yang disajikan. Unsur kesenangan merupakan hal penting dalam *ecotourism*, terutama bagi produk dan jasa yang ditawarkan pada wisatawan di lokasi wisata. Produk dan jasa wisata harus dikemas secara menarik dan layak jual, agar dapat diterima oleh “pasar”, yaitu para wisatawan yang berkunjung di lokasi wisata dan masyarakat luas.

Keempat, prinsip perekonomian, yang memberi arahan agar kegiatan *ecotourism* yang dilakukan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat dan masyarakat secara luas. Kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat setempat akan semakin tinggi bila perjalanan wisata yang dilakukan menggunakan sumberdaya lokal, seperti dalam hal transportasi, akomodasi, dan pemandu wisata lokal. Dengan kata lain *ecotourism* yang dilaksanakan juga harus

memberikan pendapatan serta keuntungan (*profit*) bagi masyarakat setempat, agar kegiatan ini dapat berlanjut dari generasi ke generasi. Untuk itu masyarakat setempat perlu didorong, untuk memberikan jasa dan produk wisata yang berkualitas. Keuntungan yang diperoleh dari *ecotourism* hendaknya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan wisata masyarakat setempat, misalnya melalui pelatihan produk dan jasa wisata tingkat desa.

Kelima, prinsip partisipasi masyarakat setempat, yang memberi arahan agar kegiatan *ecotourism* yang dilakukan melibatkan masyarakat setempat. Sebagaimana diketahui kesediaan masyarakat setempat, untuk terlibat dalam *ecotourism* barulah akan muncul, bila kondisi alam dan budaya yang ada di daerahnya memberi keuntungan bagi mereka. Sebaliknya, agar kondisi alam dan budaya yang ada di daerah wisata memberi keuntungan bagi masyarakat setempat, maka ia harus dikelola dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, edukasi dan penyadaran perlu diberikan kepada masyarakat, agar mereka bersedia berpartisipasi dalam mengelola kondisi alam dan budaya yang ada di daerahnya.

Lima prinsip dasar pengembangan *ecotourism* di Indonesia berpeluang berhasil di Lereng Merapi, karena masyarakat setempat memiliki kemampuan untuk mengekspresikan respon instrumental, yang merupakan hasil belajar terus menerus atas segenap pengalaman hidup dan situasi Lereng Merapi. Pada umumnya respon ini dimiliki secara individual, karena ia berbasis pengamatan individu atas individu lainnya

dalam konteks pengalaman hidup dan situasi Lereng Merapi. Individu yang berperan sebagai model (contoh) atau tokoh memberi stimulus yang relevan, sehingga individu lainnya terpengaruh dan memberi respon yang bersesuaian dengan penerapan *ecotourism*.

Ecotourism di lereng Merapi sangat memungkinkan untuk diorientasikan sebagai sebuah strategi penghidupan. Dalam konteks ini, penghidupan (*livelihood*) dimaknai sebagai kemampuan, aset, dan kegiatan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan. Hal ini mencakup pengertian yang lebih luas dari sekedar pendapatan dan kesempatan kerja, karena meliputi hubungan yang kompleks antara kemampuan, aset, kegiatan ekonomi dan dinamika masyarakat terkait dengan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi lingkungannya (Baiquni, 2007).

Sebagai strategi penghidupan, maka *ecotourism* juga memungkinkan untuk dikembangkan pada wilayah yang mempunyai keunikan pesona alam, dan kondisi sosial budaya yang khas, baik pada kawasan budidaya dan kawasan lindung, maupun pada kawasan rawan bencana. *Ecotourism* layak dikembangkan di Lereng Merapi khususnya di Dusun Pangukrejo, Dusun Pelemsari, Dusun Petung, Dusun Kaliadem, Dusun Jambu, dan Dusun Kopeng. Masyarakat di dusun-dusun ini mempunyai kemampuan untuk menerapkan *ecotourism*, dan secara regulatif wilayahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031.

Peraturan ini (khususnya pada Pasal 79) antara lain menyatakan, bahwa: (a) tidak diperbolehkan kegiatan pengembangan hunian hidup di area terdampak langsung letusan Merapi 2010; (b) tidak diperbolehkan kegiatan penambahan prasarana dan sarana baru di area terdampak langsung letusan Merapi 2010; (c) diperbolehkan kegiatan pemanfaatan untuk wisata minat khusus, pertanian, perkebunan, dan penghutanan kembali di area terdampak langsung letusan Merapi 2010; (d) Tidak diperbolehkan kegiatan pengembangan permukiman baru di Kawasan Rawan Bencana III.

Berdasarkan peraturan tersebut diketahui, bahwa larangan adanya pengembangan hunian hidup dan larangan menambah prasarana dan sarana baru di area terdampak langsung letusan Merapi 2010, serta pengembangan permukiman baru di Kawasan Rawan Bencana III; mendapat “kompensasi” berupa diperbolehkannya pemanfaatan untuk wisata minat khusus, pertanian, perkebunan, dan penghutanan kembali. Oleh karena itu, masyarakat Lereng Merapi hendaknya dapat memanfaatkan “kompensasi” yang tersedia, terutama untuk wisata minat khusus, yaitu *ecotourism*.

Ketika *ecotourism* diterapkan, dilaksanakan, dan dikembangkan di Lereng Merapi, ia bersesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031. Hal ini menguntungkan bagi masyarakat dan Pemerintah Dusun Pangukrejo, Dusun Pelemsari, Dusun Petung, Dusun Kaliadem, Dusun Jambu, dan Dusun Kopeng,

karena: Pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, mendorong munculnya kegiatan-kegiatan penunjang, dan kegiatan sampingan lainnya. Kedua, memperkenalkan dan mendayagunakan potensi lingkungan di dusun-dusun tersebut, yang meliputi: kondisi alam, sosial, ekonomi, dan budaya.

Keuntungan yang diperoleh masyarakat dan pemerintah dusun, sebagai akibat dilaksanakannya *ecotourism*, merupakan bentuk pertukaran sosial yang dapat terjadi di Lereng Merapi. Homans (dalam Ritzer, 2009:458) menjelaskan, bahwa perilaku sosial adalah hasil pertukaran aktivitas dan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing individu, karena adanya pilihan rasional pada diri mereka yang pertimbangannya, antara lain: (1) individu memberi apa? (2) individu mendapatkan apa? dan (3) apakah hal itu menguntungkan, atau tidak menguntungkan bagi individu?

Pilihan rasional yang menjadi pertimbangan individu sebagaimana dimaksud oleh Homans, secara faktual mewujudkan dalam diri anggota masyarakat (individu) di Lereng Merapi. Selain itu juga telah diketahui, bahwa pariwisata di Lereng Merapi merupakan fenomena kekinian yang dibangun atas dasar kebutuhan wisatawan (penikmat lingkungan), yang gemar meningkatkan kesehatan melalui udara pegunungan yang sejuk dan menyegarkan. Para wisatawan ini juga gemar membangun kesadaran dan kecintaannya pada kondisi alam, sosial, ekonomi, dan budaya di Lereng Merapi. Kesadaran dan kecintaan inilah yang kemudian membuka peluang bagi dikembangkannya pariwisata berkelanjutan di Lereng

Merapi. M.P. Gunawan, dkk (2000) menegaskan, bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan bentuk pariwisata yang mengintegrasikan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan (kondisi alam).

Pariwisata berkelanjutan (dalam hal ini, *ecotourism*) yang dilaksanakan di Lereng Merapi mampu mengkonstruksi interaksi antar individu yang melakukan pertukaran kepentingan. “Hukum” dasarnya adalah imbalan dan keuntungan yang akan didapat oleh individu yang melakukan pertukaran. Sebagaimana telah diketahui, pertukaran sosial yang terjadi antar individu tidak berjalan statis, karena tidak selamanya individu mendapatkan keuntungan dari proses pertukaran sosial. Oleh karena itu, menurut Homans (dalam Ritzer, 2009:458) ada beberapa proposisi (alasan argumentatif) yang perlu mendapat perhatian dalam pertukaran sosial, yaitu: (1) proposisi sukses; (2) proposisi stimulus; (3) proposisi nilai; (4) proposisi kelebihan dan kekurangan; (5) proposisi agresi-pujian; dan (6) proposisi rasionalitas.

Ketika *ecotourism* di Lereng Merapi dikembangkan, maka proposisi dalam pertukaran sosial harus mendapat perhatian yang memadai. Sebagai contoh: **Pertama**, perlu ada jaminan, bahwa *ecotourism* akan memberi kesuksesan pada masyarakat dan pemerintah dusun setempat; **Kedua**, perlu ada jaminan, bahwa stimulus akan diberikan oleh pemerintah daerah, agar *ecotourism* di Lereng Merapi dapat berkembang; **Ketiga**, perlu ada jaminan, bahwa *ecotourism* memuat nilai-nilai yang membawa kebaikan bagi kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi; **Keempat**, perlu ada

jaminan, bahwa meskipun *ecotourism* memiliki kelebihan dan kekurangan, namun diketahui bahwa kelebihannya lebih banyak, dan kekurangannya tidak “membahayakan” bagi kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi; **Kelima**, perlu ada jaminan, bahwa para pengelola *ecotourism* mampu menghadapi agresi (kritik pedas) dan tidak terlena oleh pujian atas kinerjanya; **Keenam**, perlu ada jaminan, bahwa *ecotourism* yang diselenggarakan di Lereng Merapi memiliki kadar rasionalitas yang tinggi.

Dengan demikian *ecotourism* akan berhasil diselenggarakan di Lereng Merapi bila memperhatikan proposisi pertukaran sosial. Inilah potensi yang perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama karena *ecotourism* identik dengan pariwisata berkelanjutan. *Ecotourism* layak diselenggarakan karena merupakan salah satu bentuk atau jenis pariwisata yang ditandai oleh aktivitas wisatawan, yang mengadakan perjalanan pada waktu tertentu untuk menikmati kondisi alam, sosial, ekonomi, dan budaya. Perjalanan ini bukanlah perjalanan bisnis (mencari nafkah di tempat yang dikunjungi), melainkan semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna memenuhi kebutuhan rekreasi.

Aktivitas rekreasi di Lereng Merapi hendaknya didukung oleh berbagai jaminan, yang merupakan jawaban atas proposisi pertukaran sosial. Bila itu terjadi, maka rekreasi akan sering dilakukan oleh para wisatawan dari berbagai daerah dan mancanegara. Tepatnya, semakin sering para wisatawan memperoleh pengalaman menarik atas kondisi

alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi; maka akan semakin sering pula para wisatawan berkunjung ke Lereng Merapi. Sebaliknya, semakin sering para wisatawan memperoleh pengalaman buruk atas kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Lereng Merapi; maka akan semakin jarang pula para wisatawan berkunjung ke Lereng Merapi.

Bila jawaban atas proposisi pertukaran sosial telah memadai, maka aktivitas rekreasi mendorong munculnya produk barang dan jasa di Lereng Merapi, karena para wisatawan membutuhkan pelayanan transportasi, akomodasi, *catering*, hiburan, dan pelayanan lainnya. Oleh sebab itu, industri wisata berpeluang besar untuk dikembangkan di Lereng Merapi. Istilah “industri wisata” muncul, karena dalam pariwisata terdapat berbagai aktivitas yang bisa menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Makna “industri” dalam pariwisata berbeda dengan makna “industri” pada umumnya. Industri wisata tidak terdiri dari pabrik-pabrik atau mesin-mesin yang besar atau kecil yang penuh dengan asap. Industri wisata seringkali disebut sebagai “industri tanpa asap”.

Industri wisata di Lereng Merapi berkembang pesat bila pemerintah pusat dan daerah berkenan memberikan stimulus. Ketika satu atau sejumlah stimulus diberikan sebagai pendorong berkembangnya industri wisata, maka masyarakat setempat akan meresponnya dengan semangat dan optimisme yang tinggi, sehingga pada akhirnya mereka dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam industri wisata yang berbasis *ecotourism*. Selanjutnya, keberhasilan masyarakat setempat dalam mengelola *ecotourism* akan mengantarkan

mereka pada beberapa aktivitas lainnya yang relevan dengan *ecotourism*.

Ecotourism memiliki “roh” yang menjadi penggerak seluruh kegiatan wisata, yaitu keunggulan atas objek lokal yang dimiliki suatu daerah tertentu. Dalam konteks Lereng Merapi, maka keunggulan atas objek lokal yang dimiliki berupa kondisi alam, sosial, ekonomi, dan budaya. Seiring dengan kondisi alam yang indah, budaya Lereng Merapi merupakan objek lokal yang menarik, yang seringkali diikuti oleh keunikan kondisi sosial dan ekonomi Lereng Merapi.

Keunikan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di Lereng Merapi wajib dikelola dengan sebaik-baiknya, agar mampu memberi nilai yang tinggi dan indah kepada para wisatawan. Pengalaman tentang keindahan dan ketinggian nilai budaya, sosial, ekonomi dan alam yang ada di Lereng Merapi, akan menjadi kenangan positif bagi para wisatawan. Semakin positif kenangan yang diperoleh para wisatawan, maka akan semakin besar kemungkinan mereka kembali lagi berwisata ke Lereng Merapi, dan semakin besar kemungkinan mereka “mempromosikan” (secara gratis) *ecotourism* Lereng Merapi.

Budaya atau kebudayaan Lereng Merapi merupakan objek lokal yang menarik, karena ia adalah keseluruhan sistem komunikasi yang mengikat dan memungkinkan hidup dan bekerjanya masyarakat Lereng Merapi. Dengan kata lain kebudayaan Lereng Merapi merupakan sistem aturan komunikasi dan interaksi yang memungkinkan terbentuk, terpelihara, dan terlestariannya masyarakat Lereng Merapi.

Oleh karena itu, antara manusia atau individu Lereng Merapi dan kebudayaan Lereng Merapi tidak dapat dipisahkan. Demikian juga antara masyarakat Lereng Merapi dengan kebudayaan dan wilayah Lereng Merapi. Hal ini disebabkan individu Lereng Merapi di samping hidup dalam satu kesatuan masyarakat Lereng Merapi, juga hidup dalam satu kesatuan wilayah Lereng Merapi. Koentjaraningrat (1985) menyebutkan ada tujuh unsur kebudayaan, yaitu: (1) bahasa; (2) sistem pengetahuan; (3) organisasi sosial; (4) sistem peralatan dan teknologi; (5) sistem mata pencaharian, (6) sistem religi; dan (7) kesenian.

Unsur-unsur kebudayaan sebagaimana dimaksud Koentjaraningrat ada di Lereng Merapi, dan layak dimanfaatkan sebagai basis pelaksanaan *ecotourism*. Masyarakat Lereng Merapi memiliki: (1) bahasa yang unik, yaitu Bahasa Jawa, yang memiliki strata, rasa, dan seni; (2) sistem pengetahuan yang berlaku, yang berorientasi pada kearifan dan kedekatan dengan alam; (3) organisasi sosial, yang seringkali tidak formal tetapi mampu membangun kerekatan atau kohesi sosial; (4) sistem peralatan dan teknologi, yang berorientasi pada kesederhanaan dan ketepatan-gunaan; (5) sistem mata pencaharian, yang berorientasi pada pertanian hingga muncul strategi *livelihood on-farm, off-farm, dan non-farm*; (6) sistem religi, yang memadukan hubungan manusia-Tuhan (manusia dengan Tuhan) dengan manusia-alam (manusia dengan alam); dan (7) kesenian, yang berorientasi pada rasa syukur pada Tuhan dan kecintaan kepada lingkungan.

Dalam rangka melestarikan dan meningkatkan nilai tambah unsur-unsur kebudayaan, serta meningkatkan kondisi

alam, sosial dan ekonomi, maka *ecotourism* dapat dijadikan solusi. Hanya saja dalam mewujudkan kegiatan yang berbasis *ecotourism*, wajib dirancang dan dikuatkan aspek keunggulan yang akan ditawarkan kepada wisatawan. Sebagai contoh, bila terkait dengan kondisi alam, maka harus dirancang dan dikuatkan upaya peningkatan dan pengelolaan sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup, yang mampu menjadi landas pijak kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya Lereng Merapi.

Tata ruang dan lingkungan hidup di Lereng Merapi perlu mendapat perhatian serius, karena berkaitan dengan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Ketika masyarakat mendapat “ganjaran” (manfaat) atas segenap aktivitas yang relevan dengan peningkatan kualitas tata ruang dan lingkungan hidup, maka besar kemungkinan mereka akan mempertahankan aktivitasnya, bahkan bersedia membujuk orang atau pihak lain untuk turut melakukan aktivitas tersebut.

Khusus berkaitan dengan pemanfaatan kondisi alam di Lereng Merapi, yang merupakan salah satu obyek dalam *ecotourism*, terbuka peluang pelestarian dan pengembangan kapasitas pertanian. Hal ini semakin berpeluang, ketika pertanian dipadukan dengan kehutanan dan peternakan. Ikhtiar inilah yang berpotensi untuk memberi kontribusi memadai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan sekaligus mereduksi potensi kemiskinannya.

Sutaryono (2013:51) pernah mengingatkan, bahwa kemiskinan dan pengangguran di wilayah perdesaan adalah

kemiskinan dan pengangguran bagi penduduk dan tenaga kerja di sektor pertanian. Kemiskinan dan pengangguran di sini berhubungan dengan penguasaan dan pemilikan atas lahan (tanah) pertaniannya. Ketika lahan pertanian sudah diorientasikan untuk kepentingan non pertanian pada skala yang lebih luas melalui kebijakan makro, maka meningkatnya jumlah petani miskin menjadi sebuah keniscayaan.

Peringatan Sutaryono tersebut merupakan dukungan bagi pelestarian usaha pertanian, yang secara faktual relevan dengan kegiatan *ecotourism*. Sebagaimana diketahui *ecotourism* bersungguh-sungguh mengupayakan pelestarian kondisi alam di Lereng Merapi, yang berbasis pada kegiatan kehutanan, pertanian, dan peternakan. Dengan demikian *ecotourism* semakin kuat kelayakannya di Lereng Merapi, karena berupaya melestarikan kondisi alam (kehutanan, pertanian, dan peternakan), ekonomi, sosial, serta budaya.

Pelestarian kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya merupakan tindakan rasional yang dipilih oleh masyarakat Lereng Merapi. Tindakan ini didahului oleh pertimbangan, yang membandingkan *reward* (keuntungan atau ganjaran) yang akan diperoleh bila masyarakat melestarikan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya; dengan *punishment* (kerugian atau “hukuman”) yang akan diperoleh bila masyarakat tidak melestarikan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pengelolaan kondisi alam, sosial, ekonomi, dan budaya Lereng Merapi yang berlatar-belakang *ecotourism* berguna dalam menopang pendapatan masyarakat, pendapatan desa

dan pendapatan daerah, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. Pelibatan sumberdaya manusia yang handal juga akan memudahkan penjabaran semangat *ecotourism* dalam seluruh kegiatan yang terkait dengan pengelolaan kondisi alam, sosial, ekonomi, dan budaya Lereng Merapi, sehingga membuka kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang muncul akibat diselenggarakannya *ecotourism*, didukung oleh: **Pertama**, adanya berbagai kelompok (komunitas) di Lereng Merapi yang gigih mengembangkan *ecotourism*, meskipun masih banyak menghadapi tantangan; **Kedua**, adanya pertukaran sosial antar individu di masyarakat lokal (setempat), yang akhirnya menciptakan sinergi di antara mereka, saat melaksanakan dan mengembangkan *ecotourism*; **Ketiga**, adanya nilai atau norma yang berlaku, mengikat, dan “memaksa” di kalangan masyarakat Lereng Merapi, yang mendukung pelaksanaan dan pengembangan *ecotourism*.

Pengelolaan *ecotourism* Lereng Merapi oleh masyarakat, pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten Sleman tidak bisa terpisah-pisah dan berdiri sendiri-sendiri, melainkan harus sinergis atau saling terkait antara satu dengan yang lain. Kualitas sumber daya manusia di tingkat masyarakat, pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten Sleman harus berkualitas, sehingga perlu ditunjang dengan pendidikan dan pelatihan keterampilan di bidang pariwisata. Hal ini diperlukan agar *ecotourism* mampu memainkan perannya, sebagai kegiatan yang secara langsung memberi, menyentuh

dan melibatkan masyarakat, serta membawa dampak bagi masyarakat. Sesungguhnya *ecotourism* mampu menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti: sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Selain itu, *ecotourism* juga terkait dengan perhotelan, restoran, angkutan, dan produk-produk industri.

Pengelolaan *ecotourism* Lereng Merapi yang mengandalkan kondisi alam dan budaya, harus memberi keuntungan bagi peningkatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, *ecotourism* menuntut dilakukannya optimalisasi pendayagunaan pariwisata Lereng Merapi, peningkatan daya saingnya, dan menempatkannya sebagai tujuan wisata utama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mewujudkan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menentukan langkah-langkah yang terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana di Lereng Merapi.

Solidaritas sosial juga diperlukan, ketika masyarakat ingin menerapkan, melaksanakan, dan mengembangkan *ecotourism*. Pada awalnya masyarakat Lereng Merapi yang hidup dalam kondisi sederhana memiliki solidaritas mekanis, di mana masing-masing anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Seiring bergeraknya waktu, solidaritas mekanik yang ada di masyarakat berubah menjadi solidaritas organik, yang ditandai oleh adanya saling ketergantungan antar anggota masyarakat.

Ketergantungan ini akhirnya membentuk bagian-bagian dalam masyarakat, yang uniknya bagian-bagian inipun saling tergantung satu sama lain. Perlu dipahami, bahwa

ketergantungan ini tidak berpotensi meruntuhkan struktur masyarakat, melainkan justru memperkuat struktur yang ada di masyarakat. Dalam konteks *ecotourism*, solidaritas organik dan ketergantungan yang ada di masyarakat, semakin memperkuat eksistensi jenis wisata ini. Pembagian tugas yang ada di masyarakat sebagai konsekuensi adanya bagian-bagian, telah membangun sinergi antar anggota masyarakat untuk melaksanakan dan mengembangkan *ecotourism*.

Berbekal semangat untuk melaksanakan dan mengembangkan *ecotourism*, masyarakat berikhtiar dengan memanfaatkan secara optimal kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya. Keseluruhan kondisi ini merupakan sesuatu yang vital bagi masyarakat, karena berfungsi sebagai instrumen yang memudahkan aktivitas masyarakat. Sebagai contoh, ketika masyarakat berternak sapi perah, kegiatan ini didukung oleh: **Pertama**, kondisi alam, yang iklimnya cocok untuk berternak sapi perah, adanya ketersediaan rumput, dan tanah untuk menanam rumput. **Kedua**, kondisi ekonomi, yang mendukung aktivitas pemasaran susu sapi, karena adanya daya beli masyarakat dan pihak lain di luar wilayah Lereng Merapi. **Ketiga**, kondisi sosial, yang tatanannya bercirikan “guyub”, sehingga ada semangat saling dukung antar peternak sapi perah, dan saling dukung dengan masyarakat setempat. **Keempat**, kondisi budaya, yang memperlihatkan keseimbangan konseptual antara berbakti kepada Tuhan, dan bekerjasama memakmurkan bumi (dalam hal ini berternak sapi perah).

Kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya dapat dimanfaatkan secara optimal, bila dapat diarahkan dan

disesuaikan dengan pendayagunaan dan pemantapan perencanaan pembangunan pariwisata Kabupaten Sleman. Hal ini akan meningkatkan promosi pariwisata ke lingkup regional (Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah), nasional (Indonesia) dan internasional (Asia Tenggara, Asia, Eropa dan Amerika). Selain itu, juga perlu dilakukan: **Pertama**, upaya untuk meningkatkan pendayagunaan potensi pariwisata alam, sosial, ekonomi, dan budaya Lereng Merapi ke arah yang lebih profesional. **Kedua**, meningkatkan daya tarik pariwisata di Lereng Merapi, khususnya kawasan Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo, dengan menjaga dan melestarikan budaya yang terpelihara sejak dahulu di Lereng Merapi.

B. Langkah Awal *Ecotourism*

Setelah pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo berhasil menata kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, maka langkah berikut yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sitorus (2014:10) mengingatkan, bahwa sesuai arahan tata ruang dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman pada KRB III, wilayah ini diperuntukkan bagi pengembangan ekoturisme, ekowisata, atau wisata alam. Alasan utamanya adalah arahan Peraturan Bupati Sleman No. 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi, yang menyatakan bahwa: (1) lokasi rencana konsolidasi tanah merupakan Kawasan Rawan Bencana Merapi III atau KRB III; (2) lokasi ini merupakan

kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya, sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat.

Pasca erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010, dan sebelum adanya kegiatan konsolidasi tanah, sebagian anggota masyarakat telah melakukan berbagai upaya kreatif untuk mendapatkan sumber penghidupan. Usaha sektor pertanian dan peternakan yang “lenyap” terkena erupsi dan munculnya hamparan “pasir” di lereng Merapi telah menjadi objek wisata baru yang dikenal dengan *lava tour*. Objek wisata baru ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka tempat parkir, menjadi tukang ojek, berjualan, dan menjadi pemandu wisata. Seiring dengan perkembangan wisata *lava tour*, maka layanan wisata bertambah menjadi layanan motor *trail* dan *jeep* wisata.

Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat telah melakukan inisiasi untuk mengembangkan *ecotourism* Lereng Merapi pasca erupsi. Inisiatif ini juga didorong oleh adanya kondisi dan potensi dusun-dusun di Lereng Merapi, yakni: **Pertama**, kondisi alam yang beragam dan mempunyai eksotisme tersendiri pada masing-masing dusun, seperti: (1) Dusun Pangukrejo, yang berada di lereng tengah bagian atas dari Gunung Merapi, yang ditanami berbagai tumbuhan. Salah satu tanaman yang sedang dikhtiarkan oleh masyarakat adalah klengkeng, dengan pola tanam *mixed cropping* (pola tanam campuran). Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan tanaman klengkeng. Situasi bertambah menarik,

karena para wisatawan berada di wilayah dengan iklim yang khas lereng pegunungan;

(2) Dusun Pelemsari, yang dua kampungnya dilalui sungai, yaitu Kampung Kinahrejo dilalui Kali Opak, dan Kampung Pelemsari dilalui Kali Kuning. Penggunaan tanah pertanian yang ada di dusun ini berupa kebun campuran, yang sebagian besar bukan merupakan kebun yang dibudidayakan, melainkan kebun yang tumbuh dengan sendirinya karena suburnya tanah pasca erupsi. Jenis tanaman yang ada dalam kebun campuran yang tidak dibudidayakan (tanaman alam), antara lain: sengon, bambu, dan rumput kalanjana. Sementara itu, tanaman yang ada di sela-sela tanaman alami ini, antara lain: angka, melinjo, pisang, dan papaya. Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan tanaman sengon, bambu, dan rumput kalanjana. Situasi bertambah menarik, karena para wisatawan berada di wilayah yang dilalui dua sungai (Kali Opak, dan Kali Kuning);

(3) Dusun Petung, yang masih sangat asri dengan ketinggian 850-900 meter di atas permukaan laut. Penggunaan tanah di Dusun Petung relatif indah, karena hutan mengelilingi wilayah dusun, sehingga udara di dusun ini sangat sejuk. Selain itu, tanah-tanah di dusun ini juga dimanfaatkan untuk menanam sengon, mindi, mahoni, akasia, cengkeh, pisang, sayuran, ketela, tales, dan kopi. Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan tanaman sengon, mindi, mahoni, akasia, cengkeh, pisang, sayuran, ketela, tales, dan kopi. Situasi

bertambah menarik, karena para wisatawan berada di wilayah yang asri dan khas dataran tinggi (ketinggian 850-900 meter);

(4) Dusun Kaliadem, yang adem (Bahasa Jawa) atau dingin/sejuk (Bahasa Indonesia) khas Lereng Merapi. Sebelum erupsi Gunung Merapi di wilayah ini terdapat sumber mata air yang cukup besar, yaitu mata air Bebeng, yang mampu mencukupi kebutuhan hidup masyarakat Dusun Kaliadem, terutama untuk mengairi areal pertanian. Keadaan berubah ketika terjadi erupsi Gunung Merapi tanggal 26 Oktober 2010, di mana semua mata air tertutup material gunung api dan tidak dapat lagi mengeluarkan air. Sejak saat itu, areal tersebut dijadikan hutan, khususnya hutan rakyat. Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan proses terjadinya hutan rakyat. Situasi bertambah menarik, karena para wisatawan berada di wilayah yang sejuk dan khas Lereng Merapi;

(5) Dusun Jambu, yang memiliki agrowisata, khususnya pohon jambu. Keindahan dusun ini semakin lengkap dengan udara yang khas wilayah pegunungan dengan ketinggian antara 850 m sampai dengan 975 m di atas permukaan laut, dengan bentuk permukaan tanah bergelombang, dan kemiringan rata-rata sebesar 8 %, yang mengarah ke Utara-Selatan. Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan tanaman jambu. Situasi bertambah menarik, karena para wisatawan berada di wilayah yang khas Lereng Merapi dengan ketinggian 850 m – 975 m dpl;

(6) Dusun Kopeng, yang jumlah penduduknya sebanyak 154 kepala keluarga. Sebagian besar penduduknya (96 kepala keluarga) telah pindah dari wilayah Dusun Kopeng untuk tinggal di Huntap, sedangkan sisanya (58 kepala keluarga) masih bertempat tinggal di wilayah dusun. Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan masyarakat bertempat tinggal di wilayah Lereng Merapi;

Kedua, kondisi perekonomian pada masing-masing wilayah yang berbeda-beda, yakni: (1) Dusun Pangukrejo, yang memiliki karakter responsif (*responsive*), melalui kesiapan menjawab tantangan situasi terbaru. Masyarakat dusun ini mampu mengusahakan ternak sapi perah, dan mampu menjadi bagian dari aktivitas wisata (*Volcano Tour* atau *Lava Tour*) dengan menyewakan jeep wisata. Di dusun ini paling tidak sudah berkembang 3 (tiga) komunitas Jeep untuk *lava tour*, yakni *Merapi Jeep Community 86*, *Grinata Adventure* dan *Merapi Land Cruiser Community*. Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan sapi perah, melakukan wisata *lava tour*, sekaligus berinteraksi dengan masyarakatnya responsif;

(2) Dusun Pelemsari, yang memiliki karakter optimal dalam memanfaatkan potensi, misalnya dengan memanfaatkan tanah-tanah yang berada di tepi jalan untuk kegiatan ekonomi, seperti: warung makanan dan minuman, untuk melayani wisatawan yang mengikuti *Vulcano Tour* atau *Lava Tour*. Selain itu, ada pula sebagian anggota masyarakat yang tetap berprofesi sebagai petani-peternak, yang

pekerjaannya selain bertani, juga mencari rumput kalanjana untuk makanan ternaknya. Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan karakter masyarakat;

(3) Dusun Petung, yang memiliki karakter fokus pada upaya pemanfaatan potensi, seperti peningkatan citra, aroma dan rasa kopi yang khas Lereng Merapi. Wisatawan dapat menikmati kebun kopi, termasuk mempelajari penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, hingga menikmati secangkir kopi hangat di Lereng Merapi, yang dihidangkan dengan cara yang unik. Selain itu, dusun ini juga memiliki kuliner (makanan dan masakan) yang khas, yang dibuat dari umbi-umbian, seperti: *criping enthik*. Juga tersedia kopi instan, susu jahe instan, krupuk, dan dodol susu. Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan karakter masyarakat;

(4) Dusun Kaliadem, yang memiliki karakter variatif membangun usaha, yaitu meliputi: (a) sektor peternakan sebagai usaha andalan turun temurun, (b) sektor pertanian-hutan khususnya hutan rakyat, (c) sektor galian C sebagai dampak erupsi Gunung Merapi, dan (d) sektor wisata berupa Lava Tour yang memanfaatkan wilayah lereng Merapi sebagai obyek wisata. Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan peternakan, pertanian-hutan, dan galian C;

(5) Dusun Jambu, yang memiliki karakter energik dalam berusaha, melalui penambangan bahan galian C yang langsung

dijual kepada pengumpul, dan usaha ternak sapi perah dengan kepemilikan antara 3 - 4 ekor per peternak. Usaha ternak sapi perah menghidupkan berbagai usaha lainnya, termasuk usaha penyediaan HMT (Hijauan Makanan Ternak). Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan usaha ternak sapi perah;

(6) Dusun Kopeng, yang memiliki karakter adaptif memanfaatkan potensi, melalui penggunaan dan pemanfaatan tanah yang “kental” dengan ciri pertanian, baik yang bersifat *on-farm*, dan *off-farm*, maupun yang bersifat *non-farm*. Sebelum dan setelah erupsi Gunung Merapi ciri pertanian ini terus dipertahankan oleh masyarakat dengan melakukan berbagai upaya adaptif. Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan usaha *on-farm*, *off-farm*, dan *non-farm*;

Ketiga, kondisi sosial masing-masing dusun juga cukup spesifik dan berbeda satu dengan yang lainnya, yakni: (1) Dusun Pangukrejo, yang memiliki karakter tradisional siaga bencana, karena wilayah dusun yang berada di area yang beresiko terkena bencana erupsi Gunung Merapi. Karakter ini telah dikembangkan sejak tahun 1994, mulai dari tingkat RT (Rukun Tetangga). Oleh karena itu, masyarakat dusun memiliki kesiapan bila sewaktu-waktu terjadi erupsi Gunung Merapi, misalnya dalam hal melakukan evakuasi. Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan interaksi sosial dalam masyarakat tradisional, yang siaga dalam menghadapi bencana;

(2) Dusun Pelemsari, yang memiliki karakter tradisional perdesaan, sehingga masyarakat dusun ini lebih menjadikan Huntap sebagai tempat bermalam. Bagi masyarakat dusun ini hidup sebagai masyarakat perdesaan lebih menyenangkan, sehingga banyak anggota masyarakat dusun ini yang membangun interaksi sosialnya di wilayah dusun daripada di Huntap. Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan interaksi sosial dalam masyarakat tradisional, yang khas perdesaan;

(3) Dusun Petung, yang memiliki karakter tradisional aktif, melalui wujud aktivitas peternakan sapi perah yang meliputi pemerahan, pengolahan hingga penyajian susu sapi. Selain itu, ibu-ibu dusun ini yang tergabung dalam kelompok masyarakat “Mekarsari”, membudidayakan umbi-umbian, seperti: *suweg, gadung, ganyong, gembu, uwi*, dan lain-lain. Termasuk umbi *enthik*, yang kandungan karbohidrat dan proteinnya cocok sebagai makanan diet, khususnya bagi pengidap diabetes. Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan interaksi sosial dalam masyarakat tradisional, yang aktif membangun usaha;

(4) Dusun Kaliadem, yang memiliki karakter tradisional religius, melalui pemenuhan kebutuhan interaksi sesama anggota masyarakat dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karakter ini semakin kuat ketika fasilitas kesehatan (Posyandu), peribadatan (mushala), interaksi sosial (gedung pertemuan), informasi (koran dinding) tersedia di Huntap.

Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan interaksi sosial dalam masyarakat tradisional, yang religius;

(5) Dusun Jambu, yang memiliki karakter tradisional dinamis, melalui perubahan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku masyarakat yang merespon erupsi Gunung Merapi. Perubahan terjadi karena adanya peningkatan intensitas interaksi antar anggota masyarakat yang berada di Huntap, yang mengarah pada soliditas sosial menghadapi dinamika alam atau ekologi gunung api. Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan interaksi sosial dalam masyarakat tradisional, yang dinamis;

(6) Dusun Kopeng, yang memiliki karakter tradisional sederhana, melalui kondisi dusun yang nampak sederhana. Bagi masyarakat dusun ini kesederhanaan merupakan karakter hidup mereka, yang mereka cerminkan pada rumah-rumah yang ada di dusun ini yang berupa bangunan sederhana, terdiri dari kayu dan batako. Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan interaksi sosial dalam masyarakat tradisional, yang sederhana;

Keempat, kondisi budaya, yang berada di wilayah:
(1) Dusun Pangukrejo, yang memiliki karakter pelestari kearifan spiritual, yang ditandai dengan dipertahankannya ritual labuhan. Sudah sejak dahulu (sebelum kemerdekaan) dibangun kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dusun ini dengan pihak Kraton Yogyakarta. Seiring berdirinya

Kraton Yogyakarta, dilakukan ritual “labuhan” yang tempat pemberhentiannya terletak di Dusun Pengukrejo. Meskipun pada masa itu dusun ini lebih dikenal dengan nama “Dusun Gumuk Dhuwur”, yang berarti tempat yang tinggi. Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan budaya masyarakat, yang memiliki unsur kearifan spiritual (ritual labuhan);

(2) Dusun Pelemsari, yang memiliki karakter pelestari kearifan historikal, yang ditandai dengan pelestarian petilasan Mbah Maridjan. Petilasan ini merupakan tempat Mbah Maridjan hidup sampai meninggal dunia. Di sebelah selatan petilasan, bisa dijumpai Joglo Hargo Merapi, yang merupakan tempat dimulainya atau diberangkatkannya “ritual labuhan”. Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan budaya masyarakat, yang memiliki unsur kearifan historikal;

(3) Dusun Petung, yang memiliki karakter pelestari kearifan ekologis, yang ditandai dengan tradisi “Dandan Kali” (merawat sungai). Tradisi ini dilaksanakan setiap Jum’at Kliwon pada Bulan Ruwah Tahun Hijriah, sebagai ucapan syukur atas adanya air yang tidak pernah kering meskipun pada musim kemarau. Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan budaya masyarakat, yang memiliki unsur kearifan ekologis;

(4) Dusun Kaliadem, yang memiliki karakter pelestari kearifan kultural, yang ditandai dengan upaya melestarikan seni karawitan. Meskipun saat erupsi Gunung Merapi sanggar

dan peralatan seni karawitan terkubur material gunung api, namun setelah erupsi berakhir masyarakat Dusun Kaliadem kembali menghidupkan seni ini. Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan budaya masyarakat, yang memiliki unsur kearifan kultural (seni karawitan);

(5) Dusun Jambu, yang memiliki karakter pelestari kearifan spiritual, yang ditandai dengan tradisi “Merti Dusun”. Tradisi ini dilaksanakan pada Bulan Maulud, sebagai rasa syukur kepada Tuhan, yang telah berkenan mengirimi utusannya untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan budaya masyarakat, yang memiliki unsur kearifan spiritual (tradisi “Merti Dusun”);

(6) Dusun Kopeng, yang memiliki karakter pelestari kearifan kultural, yang ditandai dengan adanya grup kesenian jathilan yang berdiri sejak tahun 1954, dan eksis hingga hari ini dengan aktivitas mengisi acara kesenian di beberapa tempat (hotel) di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini menarik, karena para wisatawan dapat menikmati, belajar, dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan budaya masyarakat, yang memiliki unsur kearifan kultural (seni jathilan).

Inisiasi pengembangan *ecotourism* merupakan suatu langkah awal, yang didorong oleh adanya kondisi dan potensi dusun-dusun di Lereng Merapi. Pelaksanaan (penerapan) dan pengembangan *ecotourism* di Lereng Merapi memberi

kesempatan pada masyarakat setempat, untuk meningkatkan kemampuannya dalam memanfaatkan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, masyarakat berkesempatan menjadikan ecotourism sebagai strategi penghidupan, baik *livelihood on-farm*, atau *off-farm*, maupun *non-farm*. Oleh karena itu, masyarakat perlu melakukan konsolidasi potensi Lereng Merapi.

BAB IV

KONSOLIDASI POTENSI LERENG MERAPI

Potensi yang “berserak”, baik natural maupun artifisial di Lereng Merapi merupakan modal dasar untuk pengembangan wilayah, yang merupakan bagian upaya menumbuhkan kembali sumber penghidupan masyarakat. Potensi yang dikategorisasi menjadi potensi alam, ekonomi, sosial dan budaya ini perlu dikonsolidasikan agar secara simultan mampu menjadi *trigger* bagi masyarakat untuk mewujudkan *ecotourism*, sebagai strategi penghidupan masyarakat Lereng Merapi.

A. Pangukrejo: Awal Mula *Lava Tour*

1. Kondisi Alam

Dusun Pangukrejo berada di lereng tengah bagian atas dari Gunung Merapi. Dusun ini merupakan bagian dari Desa Umbulharjo, yang berada kurang lebih 2 km di sebelah selatan lokasi rumah Mbah Marijan (almarhum). Secara administratif, dusun ini mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: (1)

di sebelah Utara dengan Dusun Pelemsari; (2) di sebelah Barat dengan Taman Nasional (tanah Kehutanan); (3) di sebelah Selatan dengan Dusun Gondang; dan (4) di sebelah Timur dengan Dusun Petung dan Dusun Kaliadem.

Penggunaan tanah di dusun ini didominasi oleh permukiman, yang perbandingannya dengan pertanian mencapai 75% (permukiman) berbanding 25% (pertanian). Meskipun demikian, masyarakat memanfaatkan areal di antara rumah-rumah yang ada untuk menanam rumput guna makanan ternak, yang didominasi oleh rumput *kalanjana* dan rumput gajah. Sementara itu, pola permukiman masyarakat menyebar dan tidak mengelompok, sedangkan pola pertanian cenderung mengelompok dan berada di sebelah timur dari wilayah Dusun Pangukrejo. Pada permukiman, selain digunakan untuk tempat tinggal, wilayah ini juga dimanfaatkan untuk pondok wisata yang luas wilayahnya kurang lebih 5% dari total jumlah bangunan permukiman. Luas penguasaan kepemilikan tanah cukup beragam, yaitu antara 100 m² hingga 2.000 m².

2. Kondisi Ekonomi

Secara ekonomi masyarakat Dusun Pangukrejo dikenal memiliki karakter responsif menjawab tantangan. Karakter ini nampak pada ketangguhan masyarakat, yang tercermin pada kondisi ekonomi sebelum dan sesudah erupsi Gunung Merapi. Kondisi ekonomi masyarakat sebelum terjadinya erupsi (letusan) Gunung Merapi tahun 2010, didominasi oleh peternakan sapi perah, yang dimulai sejak tahun 1994.

Rata-rata tiap kepala keluarga mempunyai sapi perah, meskipun jumlahnya bervariasi. Namun setelah terjadinya erupsi Gunung Merapi, terjadi perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Peternakan sapi perah berkurang, sehingga beberapa anggota masyarakat terpaksa beralih profesi.

Beberapa anggota masyarakat mencoba berkreasi, dengan menawarkan ojek motor, dan mengembangkan wisata *Volcano Tour*, yang merupakan pengembangan dari wisata *Lava Tour*. Untuk wisata *Volcano Tour* dibutuhkan jeep dan motor, untuk mengantarkan wisatawan menjelajah area *volcano*. Kondisi ini membawa *multiplier effect* berupa hadirnya pemandu wisata dan munculnya warung-warung yang dikelola masyarakat. Rata-rata jumlah kunjungan wisata per hari adalah 50 hingga 60 orang, yang 20%-nya adalah wisatawan asing. Banyaknya wisatawan asing yang datang untuk menikmati *Volcano Tour*, mendorong beberapa kelompok usaha untuk menjajagi kesiapan pemandu wisata dalam berbahasa Inggris. Usaha ini perlu diperjuangkan, karena saat ini hanya ada 1 (satu) orang pemandu wisata yang mampu berbahasa Inggris, meskipun hanya sebatas percakapan dasar.

Saat ini perkumpulan atau paguyuban jeep wisata telah berjumlah 4 (empat) kelompok, yang trayeknya dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: (1) trayek jarak pendek, dengan biaya sewa jeep sebesar Rp. 250.000,-; (2) trayek jarak menengah, dengan biaya sewa jeep sebesar Rp. 350.000,-; dan (3) trayek jarak jauh, dengan biaya sewa jeep sebesar Rp. 450.000,-.



Gb. 2. Usaha ternak sapi perah, di Dusun Pangukrejo



Gb.3. Usaha penyewaan jeep wisata, di Dusun Pangukrejo

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

Ternak sapi perah ditekuni oleh masyarakat, selain usaha *ecotourism* dalam wujud jasa pelayanan sewa untuk kegiatan *Volcano Tour*. Hal tersebut didasari atas perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran. Meskipun pendapatan yang diperoleh dari usaha penyewaan jeep wisata cukup besar, namun biaya perawatan kendaraannya juga cukup tinggi, bahkan tidak jarang berimbang atau bahkan sering kali lebih besar dari pendapatan.

Setiap perolehan pendapatan dari penyewaan jeep wisata harus dialokasikan sebesar 50% untuk perawatan (*future value*), dan 50% sisanya dialokasikan sebagai penghasilan, yang masih harus dikurangi oleh biaya operasional, seperti: biaya bahan bakar minyak, biaya makan, biaya minum, biaya rokok, dan lain-lain, sehingga total pendapatan bersih tidak lebih dari 25 %.

Hal ini berbeda dengan ternak sapi perah, yang penghasilannya mencapai 60% dari perolehan pendapatan. Perolehan pendapatan dari usaha ternak sapi perah hanya harus dikurangi biaya produksi sebesar 40%, yang digunakan untuk membeli konsentrat, sedangkan untuk makanan ternak sehari-hari dapat diperoleh secara gratis dari rumput *kalanjana* yang ada di sekitar tempat tinggal penduduk.

Namun demikian ada batas (*limit*) yang harus dipenuhi oleh peternak sapi perah, agar hasil usaha dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak, yaitu minimal 6 ekor sapi perah. Saat ini rata-rata peternak sapi perah memiliki 2 (dua) hingga 3 (tiga) ekor. Sebagaimana diketahui, tiap ekor sapi perah rata-rata menghasilkan 8 (delapan) liter hingga 10

(sepuluh) liter per hari, dengan harga 1 (satu) liter susu sapi sebesar Rp. 4.000,-.

Bila seorang peternak sapi perah memiliki 6 (enam) ekor sapi perah, maka dapat dihitung sebagai berikut: **Pertama**, ia akan memperoleh pendapatan kotor dalam 1 hari, sebesar: Σ sapi x rerata produksi susu per sapi x harga susu sapi per liter = 6 ekor x 8 liter x Rp. 4.000,- = Rp. 192.000,-. **Kedua**, sedangkan biaya produksi yang ia keluarkan dalam 1 hari, sebesar: 40% dari pendapatan kotor = 40% x Rp. 192.000,- = Rp. 76.800,-. **Ketiga**, dengan demikian ia memperoleh pendapatan bersih dalam 1 hari, sebesar: pendapatan kotor - biaya produksi = Rp. 192.000,- - Rp. 76.800,- = Rp. 115.200,-. **Keempat**, maka dalam 1 bulan ia memperoleh pendapatan bersih, sebesar: Rp. 115.200,- x 30 hari = Rp. 3.456.000,-.

Saat ini 40% masyarakat Dusun Pangukrejo berpenghasilan kurang dari Rp. 3.456.000,- padahal angka tersebut merupakan batas standar hidup layak, sehingga dapatlah dikatakan bahwa 40% masyarakat dusun ini berada dalam kondisi miskin versi lokal. Batasan kemiskinan dalam versi lokal, yang biasa disebut kemiskinan relatif ini perlu mendapat perhatian pemerintah, karena berkaitan dengan martabat kemanusiaan, harga diri, dan rasa percaya diri masyarakat.

3. Kondisi Sosial

Secara sosial masyarakat Dusun Pangukrejo dikenal memiliki karakter tradisional siaga bencana. Karakter ini dibangun dengan memanfaatkan demografi dusun, di mana

penduduk Dusun Pangukrejo berjumlah 728 orang, atau 233 kepala keluarga, dengan 60% di antaranya berpendidikan SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama).

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan ekonomi, namun masyarakat terus berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, setiap anggota masyarakat bekerja sungguh-sungguh, agar memperoleh pendapatan. Akibatnya anak-anak usia SD dan SMP didorong oleh keluarganya untuk bekerja, dengan menawarkan jasa sebagai pemandu wisata, penjaga warung dan lain-lain.

Salah satu pekerjaan yang paling menarik adalah pemandu wisata, yang berpenghasilan rata-rata Rp. 100.000,- per hari. Bagi anggota masyarakat yang pendapatan per harinya belum mencukupi, maka mereka memiliki profesi rangkap, misal sebagai buruh sekaligus sebagai peternak, atau sebagai pegawai negeri sipil atau guru yang juga merangkap sebagai petani, dan lain lain.

Sebagai dusun yang berada di area yang beresiko terkena bencana erupsi Gunung Merapi, maka kondisi sosial yang dikembangkan memiliki nuansa “siaga bencana”. Kondisi ini telah dikembangkan sejak tahun 1994, mulai dari tingkat RT (Rukun Tetangga). Oleh karena itu, masyarakat dusun memiliki kesiapan bila sewaktu-waktu terjadi erupsi Gunung Merapi, misalnya dalam hal melakukan evakuasi. Kondisi ini didukung oleh adanya petunjuk berupa tulisan jalur evakuasi yang dipasang di beberapa tempat, yang dimaksudkan untuk memperlancar arus evakuasi masyarakat.

Oleh karena Dusun Pangukrejo berada di lereng tengah bagian atas dari Gunung Merapi yang rawan longsor, maka masyarakat menanamkan wilayah tersebut dengan berbagai tumbuhan. Salah satu organisasi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat adalah IMBI, yang telah menyumbangkan bibit klengkeng, yang ditanam di wilayah yang kemiringannya cukup besar (terjal). Pola tanam yang digunakan berupa *mixed cropping* (pola tanam campuran). Kebun klengkeng ini terletak disamping masjid, yang dibangun oleh pemerintah Brunai Darussalam.

4. Kondisi Budaya

Secara budaya masyarakat Dusun Pangukrejo dikenal memiliki karakter arif spiritual. Karakter ini nampak dari fakta, bahwa dusun ini sudah ada sejak lama. Oleh karena itu, sudah sejak lama pula dibangun kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dusun ini dengan pihak Kraton Yogyakarta. Sejak berdirinya Kraton Yogyakarta telah dilakukan ritual “labuhan”, yang tempat pemberhentiannya terletak di Dusun Pangukrejo. Meskipun pada masa itu dusun ini lebih dikenal dengan nama “Dusun Gumuk Dhuwur”, yang berarti tempat yang tinggi.



Gb. 4. Batas Dusun Pangukrejo, yang ditandai oleh ucapan “Selamat Datang”



Gb. 5. Bangunan yang terkena erupsi Gunung Merapi di Dusun Pangukrejo

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

Masyarakat Dusun Pangukrejo memiliki kegiatan budaya, yang terus dilestarikan hingga saat ini, yaitu: **Pertama**, pada setiap Bulan Maulid Tahun Hijriah diadakan kegiatan Merti Dusun atau gotong royong membersihkan lingkungan dusun. **Kedua**, pada setiap Bulan Muharam Tahun Hijriah diadakan kegiatan Sedekah Dusun atau acara syukuran masyarakat dusun. **Ketiga**, pada setiap Bulan Dzulhidjah Tahun Hijriah diadakan kegiatan Dandan Kali atau gotong royong membersihkan dan memperbaiki sungai yang melintas di dusun ini.

B. Pelemsari: Wilayah di Antara Dua Sungai

1. Kondisi Alam

Wilayah Dusun Pelemsari berada di antara 2 (dua) aliran sungai, yaitu Kali Opak di bagian Timur, dan Kali Kuning di bagian Barat, dengan posisi membentang dari utara ke selatan di lereng Gunung Merapi. Dusun ini merupakan dusun paling utara dari wilayah Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Sebagai dusun yang terletak paling utara, dusun ini berbatasan langsung dengan Gunung Merapi. Saat ini, Dusun Pelemsari terdiri dari 4 RT (Rukun Tetangga), yaitu: 1 RT di Kampung Pelemsari, 1 RT di Kampung Kinahrejo, dan 2 RT di Kampung Ngrangkah. Dusun Pelemsari merupakan wilayah dengan topografi bergelombang sampai berbukit, sehingga tidak dijumpai daerah datar di wilayah dusun ini.

Batas-batas wilayah dusunnya terdiri dari: (1) di sebelah Utara berbatasan langsung dengan kawah Gunung Merapi,

(2) di sebelah Timur berbatasan dengan Kali Opak dan Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan, (3) di sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Pangukrejo Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan, dan (4) di sebelah Barat berbatasan dengan Kali Kuning dan Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem.

Sebagai bagian dari Dusun Pelemsari, tiga kampung yang ada di dusun ini memiliki potensi *ecotourism* yang baik, seperti: (1) di sebelah barat wilayah Kampung Kinahrejo berbatasan dengan Kali Opak, yang airnya mengalir ke arah Dusun Kaliadem Desa Kepuharjo; (2) di sebelah Timur Kampung Pelemsari berbatasan dengan Kali Kuning; dan (3) Kampung Ngrangkah berada di sebelah selatan dan berbatasan dengan Dusun Pangukrejo.

Jarak dusun ini dengan kaki Gunung Merapi sekitar 4-5 Km, sedangkan dari Dusun Pelemsari ke Pusat Desa Umbulharjo kurang lebih berjarak antara 3- 4 km, yang membutuhkan waktu tempuh dengan kendaraan bermotor sekitar 5-10 menit. Wilayah Dusun Pelemsari dibelah dua oleh jalan aspal yang menghubungkan Desa Umbulharo dengan kaki Gunung Merapi. Di batas dusun sebelah Utara, jalan aspal ini habis dan disambung dengan tangga-tangga naik, untuk kepentingan adat saat ritual “Labuhan”.



Gb.6. Jalan mendaki menuju Gunung Merapi



Gb. 7. Sungai Opak Di Kaki Gunung Merapi

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

Tidak dijumpai jenis penggunaan tanah non pertanian di Dusun Pelemsari, walaupun ada, itu hanyalah bekas-bekas permukiman yang terkena erupsi Gunung Merapi. Penggunaan tanah pertanian yang ada di dusun ini berupa kebun campuran, yang sebagian besar bukan merupakan kebun yang dibudidayakan, melainkan kebun yang tumbuh dengan sendirinya karena suburnya tanah pasca erupsi. Jenis tanaman yang ada dalam kebun campuran yang tidak dibudidayakan (tanaman alam), antara lain: sengon, bambu, dan rumput *kalanjana*. Sementara itu, tanaman yang ada di sela-sela tanaman alami ini, antara lain: nangka, melinjo, pisang, dan pepaya, yang tumbuh di sekitar tanah-tanah bekas permukiman penduduk di masa lalu (sebelum erupsi Gunung Merapi tahun 2010). Masyarakat juga memanfaatkan tanah-tanah yang berada di tepi jalan untuk kegiatan ekonomi, seperti: warung makanan dan minuman. Warung-warung ini berjualan pada saat hari-hari libur untuk melayani wisatawan yang mengikuti *Volcano Tour*.



Gb. 8. Kebun campuran, yang ditanami pisang, pepaya, sengon, nangka, dan rumput Kalanjana



Gb. 9. Pemanfaatan tanah untuk kegiatan ekonomi

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

2. Kondisi Ekonomi

Secara ekonomi masyarakat Dusun Pelemsari dikenal memiliki karakter optimal memanfaatkan potensi. Karakter ini terbangun ketika masyarakat bangkit kembali memperbaiki kondisi ekonominya pasca erupsi Gunung Merapi. Saat terjadinya erupsi, perekonomian masyarakat Dusun Pelemsari mengalami kelumpuhan, karena usaha pertanian dan peternakan serta harta masyarakat musnah terbakar.

Setelah pindah ke Huntap, secara perlahan-lahan masyarakat bangkit kembali, dan membangun kemampuan ekonominya melalui berbagai macam usaha. Selain kembali beternak sapi perah di kandang sapi kelompok yang berada di Huntap, sebagian masyarakat beralih profesi ke bidang jasa pariwisata. Sementara itu, sebagian lainnya memilih tetap tinggal di Huntap, dengan membuka warung kelontong, serta warung gas dan pulsa.

Pada prinsipnya, untuk membangun kembali perekonomian, masyarakat berupaya bekerja apa saja untuk menghidupi keluarganya. Selain mengoperasikan jeep dan sepeda motor di lokasi wisata Merapi (*Volcano Tour*), ada pula yang membuka warung kelontong, makanan dan minuman di lokasi wisata. Bahkan di Kampung Kinahrejo (Dusun Pelemsari bagian “atas”) juga ada yang membuka warung-warung kecil di pinggir-pinggir jalan untuk melayani para wisatawan yang akan mendaki Gunung Merapi, atau mengunjungi petilasan Mbah Maridjan. Warung-warung ini nampak ramai pada hari libur dan musim kunjungan wisata pada bulan-bulan tertentu.



Gb. 10. Warung kelontong di Huntap Karang Kendal



Gb. 11. Warung gas dan pulsa di Huntap Karang Kendal

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

Sebagai salah satu dusun terdampak erupsi Gunung Merapi tahun 2010, Dusun Pelemsari menjadi salah satu tujuan wisata yang disebut dengan Wisata Merapi. Ada pula yang mengistilahkan wisata merapi ini dengan nama *Vulcano Tour*, ada pula yang mengatakan *Lava Tour*. Wisatawan yang datang ke Dusun Pelemsari biasanya ingin mengunjungi Petilasan Mbah Maridjan, yang merupakan tempat Mbah Maridjan hidup sampai meninggal dunia. Di sebelah selatan petilasan, bisa dijumpai Joglo Hargo Merapi, yang merupakan tempat dimulainya atau diberangkatkannya “ritual labuhan”. Di kompleks wisata petilasan juga dijumpai warung yang melayani para wisatawan, ketika mereka membutuhkan makanan kecil, minuman, souvenir, dan keperluan lainnya.

Apabila wisatawan berkenan dari petilasan menyusuri jalan menuju Gunung Merapi ketika dilakukan “ritual labuhan”, maka di ujung utara Desa Pelemsari bisa ditemui objek wisata Puncak Kinahrejo, Kali Opak, dan Batu Tumpeng. Di lokasi ini dapat dijumpai “Batu Prasasti Nama Korban Erupsi Gunung Merapi Tahun 2010”. Untuk menuju objek wisata ini, wisatawan bisa menyewa sepeda motor (ojek) yang bertarif Rp.50.000,-. Selain sepeda motor, wisatawan juga bisa menyewa jeep apabila menginginkan *Vulcano Tour* yang lebih jauh lagi. Tarif untuk menyewa jeep berkisar antara Rp.250.000,- sampai Rp.300.000,- tergantung dari kesepakatan. Jeep ini biasanya digunakan untuk tujuan wisata yang jalannya lebih berat dari pada ke objek wisata di Dusun Pelemsari, seperti misalnya ke objek wisata Kaliadem di Dusun Kepuharjo. Selain itu di areal wisata Dusun Pelemsari juga dapat dijumpai museum

kecil (sederhana) yang memperlihatkan mobil, sepeda motor, gamelan, perabot rumah tangga yang terbakar karena terkena awan panas erupsi Gunung Merapi.



Gb. 12. Pembuatan meubel di Huntap Karang Kendal



Gb. 13. Pembuatan jaje instan, jaje kopi, gula jaje di Huntap Karang Kendal

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

Pada umumnya keahlian masyarakat Dusun Pelemsari adalah sebagai peternak sapi perah, karena sebelum erupsi, mereka rata-rata berternak sapi di Dusun Pelemsari bagian atas (Kampung Kinahrejo). Meskipun demikian ada pula anggota masyarakat di Dusun Pelemsari bagian bawah (huntap) yang memiliki keahlian sebagai pembuat meubel dan pembuat jahe instan. Pembuat meubel melayani pesanan meubel baik oleh masyarakat setempat, masyarakat sekitar, sampai masyarakat yang berasal dari Yogyakarta. Oleh karena pembuat meubel hanya bekerja ketika ada pesanan pembuatan meubel, maka bila tidak ada pesanan, pembuat meubel ini kembali ke keahlian semula sebagai peternak.

Sesudah erupsi, untuk setiap kepala keluarga masyarakat Dusun Pelemsari mendapat bantuan 1 (satu) ekor sapi perah. Berbeda dengan pembuat meubel, pembuat jahe instan beroperasi setiap hari. Pembuatan jahe instan merupakan industri rumah tangga bidang bahan minuman, yang sudah mempunyai pasar tersendiri. Selain dipasarkan ke warung dan toko, produk ini juga dipasarkan ke beberapa hotel di Yogyakarta.

Pengelola jahe instan yang berasal dari Dusun Pelemsari adalah Mursani Asih. Ia adalah menantu Mbah Maridjan (almarhum), dan istri Mas Asih (anak laki-laki Mbah Maridjan). Saat ini Mas Asih bertugas sebagai juru kunci Gunung Merapi, menggantikan ayahnya (Mbah Maridjan) yang menjadi korban erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Meskipun saat ini bahan baku jahe instan ini masih didatangkan dari luar Dusun Pelemsari, tetapi masyarakat Dusun Pelemsari berupaya

sekuat tenaga agar suatu saat nanti bahan baku jahe instan dapat dipenuhi oleh kebun yang ada di dusun ini.

3. Kondisi Sosial

Secara sosial masyarakat Dusun Pelemsari dikenal memiliki karakter tradisional perdesaan. Dusun ini sebelumnya dikenal sebagai Dusun Kinahrejo. Nama Kinahrejo sudah ada sejak Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) VII menjabat sebagai Raja Kasultanan Yogyakarta yang memerintah tahun 1877-1920. Ketika terjadi erupsi Gunung Merapi tanggal 26 Oktober 2010, masyarakat Dusun Pelemsari diungsikan ke tempat-tempat pengungsian. Selanjutnya, dari tempat pengungsian, mereka dipindahkan ke tempat hunian sementara (Huntara), yang berada di Dusun Plosokerep, yang jaraknya 3 km ke arah selatan.

Saat ini, masyarakat Dusun Pelemsari bertempat tinggal di Huntap (Hunian Tetap), yang berada di kampung Karang Kendal, yang secara administratif termasuk dalam wilayah Dusun Balong. Meskipun tinggal di wilayah Dusun Balong, namun administrasi dusun-nya masih tetap berada di Dusun Pelemsari. Masyarakat Dusun Pelemsari yang sekarang tinggal di Huntap Karang Kendal, sebelumnya hidup di tengah alam bebas sebagai masyarakat perdesaan, sedangkan saat ini mereka harus hidup seperti orang perkotaan yang tinggal di perumahan. Oleh karena itu, banyak anggota masyarakat yang akhirnya kembali ke Dusun Pelemsari di Kinahrejo, untuk melihat dan mengolah kebunnya. Dengan demikian bila malam hari, masyarakat tidur di Huntap, tetapi kalau siang hari, mereka mencari nafkah di luar kompleks Huntap.



Gb. 14. Wilayah Dusun Pelemsari yang sudah tidak berpenghuni lagi



Gb. 15. Permukiman masyarakat Dusun Pelemsari di Huntap Karang Kendal

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

Secara keseluruhan, tanah di Dusun Pelemsari dikuasai oleh masyarakat setempat. Batas-batas penguasaan tanah ini jelas sebelum terjadinya erupsi Gunung Merapi. Saat ini, meskipun batas-batas penguasaan tanah sudah tidak jelas, namun masyarakat masih tetap mengenalinya, terutama yang berkaitan dengan batas penguasaan tanah mereka. Di wilayah-wilayah yang sekarang sudah hijau kembali menjadi hutan, batas-batas penguasaan tanahnya sudah tidak jelas. Sementara itu untuk tanah-tanah bekas permukiman, masih kelihatan puing-puing reruntuhannya karena disapu awan panas, batas-batasnya juga masih jelas kelihatan.

Sementara itu, di beberapa tempat dijumpai patok-patok tanda batas pemilikan tanah. Hal ini dijumpai juga di kaki Gunung Merapi. Untuk menata kembali pemilikan tanah oleh masyarakat, saat ini dilakukan konsolidasi tanah. Peserta konsolidasi tanah di Desa Pelemsari berjumlah 167 bidang dan saat ini masih dalam tahap pemberkasan. Tanah-tanah ini berada di Dusun Pelemsari, atau tidak berada di Huntap. Untuk tanah-tanah yang dimiliki masyarakat di Huntap, seluruhnya sudah bersertipikat, yaitu sebanyak 81 bidang tanah, yang dimiliki oleh 81 kepala keluarga.



Gb. 16. Tanah Milik di Kaki Gunung Merapi



Gb. 17. Tanah Milik (di Bekas Rumah Pasca Erupsi) di Gunung Merapi

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

Erupsi Gunung Merapi tahun 2010 tidak selalu dimaknai sebagai bencana yang menyulitkan masyarakat, adakalanya ia dimaknai sebagai berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Setelah terjadinya erupsi Gunung Merapi, beberapa anggota masyarakat telah berubah profesi dari petani-peternak menjadi usahawan jasa pariwisata. Beberapa anggota masyarakat ini membuka warung di lokasi wisata, atau berprofesi sebagai pemandu wisata di lokasi *Vulcano Tour*, dengan mengoperasikan jeep atau sepeda motor trail. Namun demikian ada pula sebagian anggota masyarakat yang tetap berprofesi sebagai petani-peternak, yang pekerjaannya selain bertani, juga mencari rumput kalanjana untuk makanan ternaknya. Ternak para petani-peternak ini berada di kandang kelompok yang terletak di kompleks Huntap.

Kegiatan peribadahan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Dusun Pelemsari dipusatkan di Masjid Al Amin, yang dibangun di lokasi Huntap. Sementara itu, dalam hal pendidikan, sejak sebelum erupsi Gunung Merapi (tahun 2010) hingga saat ini (tinggal di Huntap), masyarakat Dusun Pelemsari tidak mempunyai fasilitas pendidikan. Anak-anak SD (Sekolah Dasar) harus bersekolah ke dusun terdekat, yaitu ke Dusun Pangukrejo. Sementara itu, anak-anak SMP (Sekolah Menengah Pertama) harus bersekolah ke Dusun Plosorejo, dan anak-anak SMA (Sekolah Menengah Atas) serta yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, harus bersekolah di luar Desa Umbulharjo.



Gb.18. Masjid di Huntap Karang Kendal



Gb. 19. Rumah Baca di Huntap Karang Kendal

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

Satu-satunya fasilitas pendidikan yang ada di Huntap adalah “Rumah Baca” yang berfungsi sebagai perpustakaan, yang bisa dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkannya. Sementara itu, fasilitas kesehatan tidak tersedia di dusun ini, meskipun sebelum erupsi Gunung Merapi telah ada sebuah posyandu, tetapi saat ini sudah tidak ada lagi. Masyarakat yang membutuhkan fasilitas kesehatan harus pergi ke puskesmas pembantu di Dusun Karanggeneng, yang berjarak kurang lebih 3 km dari Huntap Karang Kendal.

4. Kondisi Budaya

Secara budaya masyarakat Dusun Pelemsari dikenal memiliki karakter arif historikal. Karakter ini terbangun melalui hubungan yang kuat antara masyarakat Dusun Pelemsari dengan lingkungan vulkanik Gunung Merapi. Sebagian besar masyarakat Dusun Pelemsari percaya, bahwa aktivitas Gunung Merapi dan dampaknya dapat diketahui.

Sebelum meninggalnya Mbah Maridjan (juru kunci Gunung Merapi), sebagian besar masyarakat menyerahkan urusan aktivitas dan dampak Gunung Merapi kepada Mbah Maridjan. Posisi inilah yang menempatkan Mbah Maridjan sebagai tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakatnya.

Dalam budaya masyarakat Dusun Pelemsari, kehadiran Mbah Maridjan dan pandangan-pandangannya sangat mempengaruhi masyarakat, dan dipatuhi oleh masyarakat. Kuatnya rasa hormat masyarakat terhadap Mbah Maridjan, mendorong masyarakat membuat dan menjaga petilasan Mbah Maridjan, yang dibuat untuk mengingat tempat hidup dan meninggalnya beliau.

Salah satu tradisi budaya yang berkaitan dengan Gunung Merapi dan terus menerus diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat dari generasi ke generasi adalah “ritual labuhan”. Ritual ini dilakukan, sebagai penghormatan atas tradisi yang telah ada sejak berdirinya Kraton Yogyakarta. Ketika memperingati hari naik tahta Sri Sultan Hamengkubuwono, maka selalu dilakukan “ritual labuhan” ini. Uniknya, meskipun masyarakat telah bertempat tinggal di Huntap, namun masyarakat selalu menyelenggarakan “ritual labuhan”. Pada saat pelaksanaan ritual, para abdi dalem mengenakan pakaian adat jawa, dan masyarakat menuju ke Kinahrejo, yang tepatnya menuju ke Joglo Hargo Merapi, tempat pemberangkatan sesaji atau gunungan ke kawah Gunung Merapi.



Gb. 20. Tempat Petilasan Mbah Maridjan di Kinahrejo



Gb. 21. Joglo Hargo Merapi tempat ritual labuhan diberangkatkan

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

C. Petung: Embrio Desa Wisata

1. Kondisi Alam

Dusun Petung merupakan salah satu wilayah perdesaan di Lereng Merapi, yang “dibentuk” oleh penggunaan tanah unik. Wilayah ini didominasi areal pertanian yang dikelilingi hutan di sekitarnya, sehingga udara di dusun ini sangat sejuk. Bidang-bidang tanah dimanfaatkan untuk menanam sengon, mindi, mahoni, akasia, cengkeh, pisang, sayuran, ketela, tales, dan kopi. Luas tanaman kopi mencapai 13 Ha, sehingga memberi kontribusi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu masyarakat juga menanam rumput gajah, yang nilai jualnya mencapai Rp. 1 juta per Ha per tahun.

Pada masa lalu wilayah dusun ini banyak ditumbuhi bambu petung, sehingga masyarakat menyebut wilayah ini dengan sebutan Petung. Ketika wilayah ini menjadi dusun, maka nama Petung tetap disematkan, sehingga namanya menjadi Dusun Petung. Sudah sejak lama Dusun Petung menjadi obyek wisata yang dikenal dengan nama “Desa wisata Petung”, yang mudah dijangkau oleh para wisatawan karena hanya berjarak 20 km dari Kota Yogyakarta, atau 5 km dari ibukota Kecamatan Cangkringan. Dusun Petung memiliki keindahan dan suasana perdesaan yang masih sangat asri, dan dengan ketinggian 850-900 meter di atas permukaan laut, maka dusun ini memiliki berbagai daya tarik wisata alam perdesaan khas desa lereng Gunung Merapi.

Wilayah Dusun Petung cukup luas dengan topografi yang bergelombang, sehingga cocok untuk: (1) kegiatan jelajah alam atau *out bond*, (2) kegiatan jelajah desa, dan (3) kegiatan lainnya. Selain itu, kehidupan pertanian yang sehari-hari dipraktekkan oleh masyarakat juga memiliki daya tarik untuk dikembangkan sebagai obyek wisata. Keramahan, tradisi, dan aktivitas pekerjaan masyarakat layak menjadi obyek wisata unggulan.

Dusun Petung memiliki luas wilayah sebesar 124 Ha, yang di dalamnya termasuk 10 Ha berupa tanah kas desa, dan 15 Ha merupakan luas Sungai Opak yang melintasi dusun ini. Jumlah bidang tanah di dusun ini mencapai 340 bidang, yang berstatus hak milik, di mana rata-rata pemilikan tanah sebesar 0,50 Ha per kepala keluarga. Saat ini masyarakat Dusun Petung tinggal di Huntap Pagerjurang, sebagai solusi atas terjadinya erupsi

Gunung Merapi tahun 2010. Luas Huntap 2 Ha yang dihuni oleh 97 kepala keluarga. Sebagian besar (99%) anggota masyarakat dusun ini beragama Islam, sehingga di Huntap didirikan 1 (satu) masjid untuk menampung kegiatan ibadah masyarakat.



Gb. 22. Bambu Petung yang banyak tumbuh dasar memberi nama Dusun Petung



Gb. 23. Keindahan alam di Dusun Petung, yang pernah mendapat predikat sebagai “Desa Printis P4” di era tahun 1990-an

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

2. Kondisi Ekonomi

Secara ekonomi masyarakat Dusun Petung dikenal memiliki karakter fokus pada pemanfaatan potensi. Karakter ini dibangun melalui kondisi ekonomi yang bertumpu pada keberhasilan pertanian dan peternakan. Pertanian berkontribusi pada kondisi ekonomi, melalui berbagai tanaman komersial yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat. Sementara itu, peternakan berkontribusi pada kondisi ekonomi, melalui sapi perah yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat.

Bertumpu pada keberhasilan pertanian dan peternakan inilah, selanjutnya masyarakat mengembangkan pariwisata. Sebagai contoh, ternak sapi perah menjadi daya tarik bagi wisatawan, karena mereka dapat merasakan langsung proses pemerahan, pengolahan hingga penyajian susu sapi. Selain itu, wisatawan juga diajak mencari rumput untuk makan sapi, memberi makan sapi, serta pemerah susu sapi, yang kemudian hasilnya dapat diminum dan dijadikan buah tangan.

Masyarakat memiliki keahlian beternak sapi, yang saat ini jumlahnya telah mencapai 110 ekor, dengan rincian: (1) 40 ekor telah sejak lama dimiliki masyarakat, dan (2) 70 ekor bantuan dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Selain itu beberapa anggota masyarakat ada yang menggeluti usaha pembuatan kaos (sablon kaos). Sementara itu, ada pula yang memiliki usaha penyewaan jeep wisata, yang tarif sewanya antara Rp. 250.000,- hingga Rp. 400.000,-. Berkaitan dengan birokrasi, dari 120 kepala keluarga atau 265 orang penduduk Dusun Petung diketahui, bahwa 5% di antaranya adalah pegawai negeri sipil.



Gb. 24. Usaha persewaan jeep wisata, yang siap mengantar para wisatawan



Gb. 25. Makanan ringan (*snack*) yang dapat menjadi buah tangan wisatawan

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

Keahlian masyarakat bukanlah sesuatu yang ada secara tiba-tiba, melainkan sesuatu yang merupakan respon masyarakat atas situasi dan kondisi lingkungan yang melingkupinya. Sebagai contoh keahlian masyarakat Dusun Petung yang dipengaruhi oleh keindahan alam dusun ini. Jika melihat Dusun Petung dari Gardu Pandang, akan terlihat keindahan Gunung Merapi, yang diselingi keasrian burung elang yang terbang melintas. Keindahan alam lainnya yang berkaitan dengan penggunaan tanah adalah kebun kopi yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat.

Kopi merupakan salah satu komoditas andalan Dusun Petung, yang memiliki aroma dan cita rasa unik karena tumbuh di Lereng Merapi. Sebagaimana diketahui kopi yang ditanam oleh masyarakat merupakan jenis arabica dan robusta, tetapi karena di tanam di Lereng Merapi dengan kondisi tanah yang khas, maka aroma dan cita rasa kopi tergolong unik. Wisatawan dapat menikmati kebun kopi, termasuk mempelajari penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, hingga menikmati secangkir kopi hangat di Lereng Merapi, yang dihidangkan dengan cara yang unik. Selain itu, dusun ini juga memiliki kuliner (makanan dan masakan) yang khas, yang dibuat dari umbi-umbian, seperti: *criping enthik*. Juga tersedia kopi instan, susu jahe instan, krupuk, dan dodol susu.

3. Kondisi Sosial

Secara sosial masyarakat Dusun Petung dikenal memiliki karakter tradisional aktif. Karakter ini dibangun melalui aktivasi segenap potensi masyarakat dalam menggerakkan “kehidupan” (ekonomi, sosial, dan budaya) dalam frame

tradisional. Sebagaimana diketahui Dusun Petung memiliki kelompok masyarakat yang bernama “Mekarsari”, yang merupakan kelompok ibu-ibu yang membudidayakan umbi-umbian, seperti: *suweg*, *gadung*, *ganyong*, *gemb*, *uwi*, dan lain-lain. Umbi-umbian ini terdengar asing bagi sebagian wisatawan, sehingga menjadi sesuatu yang menarik, ketika wisatawan diperkenalkan kembali dengan umbi-umbian tersebut. Selain mengenal umbi-umbian, wisatawan juga dapat berkunjung ke industri pengolahan umbi enthik, yaitu sejenis umbi bagian anakan dari kimpul (*dioscoreaceae*), yang memiliki kandungan karbohidrat dan protein yang tinggi, serta dapat digunakan sebagai makanan diet, khususnya bagi pengidap diabetes. Umbi *enthik* tersebut oleh ibu-ibu Kelompok “Mekarsari” diolah menjadi kripik, sehingga dapat menjadi buah tangan yang khas dari Dusun Petung.

Masyarakat dan pemerintah dusun ingin mengembangkan segenap potensi yang ada di Dusun Petung. Oleh karena itu, aksesibilitas dan fasilitas menjadi sesuatu yang penting bagi mereka. Jalan menuju dusun ini sudah beraspal, yang dilengkapi dengan rambu-rambu yang sangat membantu wisatawan tiba di Dusun Petung. Selain itu, juga tersedia sarana peribadatan berupa masjid dan mushola, serta *homestay* yang berada di rumah penduduk dan gedung pertemuan yang mampu menampung 150 orang wisatawan. Fasilitas lainnya berupa lapangan parkir yang mampu menampung 50 mobil. Masyarakat juga menyediakan Gardu Pandang, yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan untuk menikmati *view* (pemandangan) Gunung Merapi dan sekitarnya.

4. Kondisi Budaya

Secara budaya masyarakat Dusun Petung dikenal memiliki karakterarif ekologis. Karakter ini dibangun oleh masyarakat melalui keteguhan mereka dalam mempertahankan tradisi yang ramah lingkungan. Sebagaimana diketahui masyarakat Dusun Petung memiliki tradisi budaya yang disebut “*Dandan Kali*” (merawat sungai). Tradisi ini dilaksanakan setiap Jum’at Kliwon pada Bulan Ruwah Tahun Hijriah, sebagai ucapan syukur atas adanya air yang tidak pernah kering meski pada musim kemarau.

“*Dandan Kali*” terkait dengan kisah masa lalu, ketika ada dua orang sesepuh desa yaitu Mbah Kertoyadi dan Mbah Kertodikromo yang menanam dua buah pohon besar di dekat sebuah mata air. Tujuan penanaman kedua pohon besar itu adalah untuk menjaga agar mata air yang ada di tempat itu tetap lestari. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua sesepuh tersebut mengadakan syukuran yang hingga kini masih menjadi tradisi. Syukuran *dandan kali* dilakukan dengan penyembelihan kambing jantan di dekat mata air di Utara Desa, yang pelaksanaannya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.

Selain “*Dandan Kali*”, masyarakat Dusun Petung juga masih terus melestarikan budaya dan tradisi lokal khas Dusun Petung. Anak-anak dan remaja diajarkan berbagai jenis tarian seperti: rempak, pegon, candik ayu, dolen dan lain-lain. Masyarakat dusun ini juga masih menggunakan karawitan dan wayang sebagai hiburan, sehingga “memaksa” sebagian masyarakat untuk terus melestarikannya dengan terus menerus berlatih. Pusat kegiatan kesenian ini berada di sanggar seni yang ada di

dusun, memberi kesempatan pada wisatawan untuk menikmati dan mempelajari budaya dan tradisi ini.



Gb. 26. Kondisi alami di sekitar mata air yang pada masa lalu ditemukan oleh Mbah Kertoyadi dan Mbah Kertodikromo



Gb. 27. Mata air yang ditemukan oleh Mbah Kertoyadi dan Mbah Kertodikromo, yang terus dilestarikan hingga kini

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

D. Kaliadem: Dusun di Tepi Taman Nasional

1. Kondisi Alam

Dusun Kaliadem memiliki udara yang dingin atau sejuk sejak dahulu, sehingga pada tahun 1942, atau sebelum Indonesia merdeka, dusun ini dikenal dengan nama “Dusun Kaliadem”, yang sesuai namanya “*adem*” (Bahasa Jawa) memiliki arti “dingin” atau “sejuk” (Bahasa Indonesia). Hal ini merupakan dampak posisi dusun yang berada pada wilayah sejuk di kaki Gunung Merapi. Dusun Kaliadem dipimpin oleh para kepala dusun yang silih berganti dari masa ke masa, yang pada awalnya dipimpin oleh kepala dusun pertama, yaitu Sumarto. Hingga saat ini, secara bergiliran (silih berganti) Dusun Kaliadem telah dipimpin oleh tujuh orang kepala dusun, sedangkan kepala dusun saat ini (kepala dusun ketujuh) telah bertugas sejak tahun 1995.

Dusun Kaliadem memiliki posisi sekitar 25 km ke arah Utara dari Kota Yogyakarta, yang merupakan tempat yang tepat untuk melihat keindahan Gunung Merapi, dan jejak ganasnya saat letusan gunung tersebut pada tahun 2010. Untuk sampai ke wilayah dusun ini relatif mudah, karena adanya jalan (aksesibilitas) yang baik, mudah dijangkau, dan terhubung dengan daerah-daerah lain disekitarnya. Sebagai bagian dari Desa Kepuharjo, dusun ini berada sekitar 7 km ke arah Utara dari ibukota Kecamatan Cangkringan, atau 27 km ke arah Timur Laut dari ibukota Kabupaten Sleman.

Secara administratif Dusun Kaliadem berbatasan: (1) di sebelah Selatan dengan Dusun Petung; (2) di sebelah Timur

dengan Sungai Gendol; (3) di sebelah Barat dengan Sungai opak; dan (4) di sebelah Utara dengan Taman Nasional Gunung Merapi. Sebagai wilayah perbukitan (pegunungan), dusun ini relatif subur karena terdapat banyak mata air yang jernih. Sumber mata air yang cukup besar adalah mata air Bebung, yang mampu mencukupi kebutuhan hidup masyarakat Dusun Kaliadem, terutama untuk mengairi areal pertanian. Keadaan berubah ketika terjadi erupsi Gunung Merapi tanggal 26 Oktober 2010, di mana semua mata air tertutup material gunung api dan tidak dapat lagi mengeluarkan air. Sejak saat itu, Dusun Kaliadem masuk wilayah Kawasan Rawan Bencana III (KRB III), dan harus dikosongkan dari pemukiman. Penggunaan tanah yang disarankan di dusun ini berupa hutan, khususnya hutan rakyat. Selanjutnya masyarakat Dusun Kaliadem yang berjumlah 136 kepala keluarga dipindahkan ke Huntap Pagerjurang. Administrasi dusun tidak berubah atau tetap sebagaimana semula sebelum terjadi erupsi Gunung Merapi tahun 2010.

Luas wilayah Dusun Kaliadem adalah 717.420 m² atau 71,742 Ha, dengan penggunaan tanah berupa: (1) Pekarangan seluas 420.820 m², yang dimanfaatkan untuk pemukiman, serta mendirikan warung dan penginapan; (2) Tegalan seluas 296.600 m², yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman yang tergolong pakan ternak (sapi perah) dan kebun. Setelah erupsi Gunung Merapi tahun 2010 pekarangan dan tegalan yang ada di Dusun Kaliadem rusak parah oleh “terjangan” material gunung api. Kini, setelah Dusun Kaliadem ditetapkan sebagai wilayah KRB III (Kawasan Rawan Bencana III), maka penggunaan dan

pemanfaatan tanahnya hanya untuk pertanian pakan ternak dan hutan rakyat.

2. Kondisi Ekonomi

Secara ekonomi masyarakat Dusun Kaliadem dikenal memiliki karakter variatif membangun usaha. Karakter ini dibangun dengan memanfaatkan situasi yang berubah setelah terjadinya erupsi Gunung Merapi. Sebagaimana diketahui, sebelum terjadinya erupsi Gunung Merapi, sebagian besar masyarakat Dusun Kaliadem mempunyai keahlian andalan berupa berternak sapi perah, yang susunya dijual ke pengepul, yaitu Koperasi Saroni Makmur dan Koperasi UUP Kaliurang. Selain beternak sapi perah, masyarakat dusun ini juga ahli beternak kambing, ayam dan bertani. Keahlian ini sesuai dengan kondisi alam di wilayah dusun, yang cocok ditanami pakan ternak seperti rumput *kalanjana*, rumput gajah, tebon, dan lain-lain.



Gb. 28. Usaha ternak sapi perah yang dikelola oleh masyarakat Dusun Kaliadem



Gb. 29. Hutan Rakyat yang dikelola oleh masyarakat Dusun Kaliadem

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

Setelah erupsi Gunung Merapi tahun 2010, masyarakat Dusun Kaliadem tinggal di Huntap Pagerjuran, yang kondisinya tidak jauh berbeda dengan wilayah Dusun Kaliadem. Sementara itu, wilayah Dusun Kaliadem sudah berubah sejak erupsi Gunung Merapi tersebut, sehingga mengundang hadirnya kepedulian pemerintah daerah setempat, terutama dalam menggerakkan kembali kegiatan perekonomian masyarakat, dan memperluas kembali kesempatan berusaha. Guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat Dusun Kaliadem yang berkeahlian sebagai peternak mendapat bantuan sapi perah. Selain itu, ibu-ibu juga mendapat bantuan dalam mengembangkan industri rumahan, seperti minuman instan (misal: jahe instan, wedang uwuh instan, dan wedang secang

instan), serta makanan khas (misal: bakpia telo ungu, bakpia kacang hijau, dan lain-lain).

Telah menjadi pengetahuan umum (masyarakat luas), bahwa Dusun Kaliadem merupakan salah satu dusun yang mengalami kerusakan parah akibat erupsi Gunung Merapi. Tetapi kondisi ini disikapi dengan tetap bersemangat tinggi untuk menghadapi hari esok yang lebih baik. Masyarakat dusun ini yang mengandalkan hidup dari sektor pertanian, peternakan, galian C, dan wiraswasta (usaha kecil) terus berupaya mengatasi dampak erupsi Gunung Merapi sebatas kemampuannya masing-masing. Salah satu bentuknya adalah yang diikhtiarkan oleh sebagian masyarakat yang berusaha di sektor wisata. Mereka mengembangkan *Lava Tour*, yang menjadikan material erupsi Gunung Merapi sebagai obyek wisata.



Gb. 30. Usaha masyarakat Dusun Kaliadem dalam memanfaatkan limbah sapi perah, dengan mengubahnya menjadi biogas.



Gb. 31. Industri rumah tangga (*home industry*) pembuatan jahe instan, wedang uwuh instan, dan wedang secang instan yang dikelola masyarakat.

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

Saat erupsi Gunung Merapi ada 136 kepala keluarga di Dusun Kaliadem yang kehilangan tempat tinggal. Selain itu masyarakat juga kehilangan fasilitas umum, seperti: masjid, pos ronda, pendopo, jalan dusun, pondok wisata atau penginapan, warung, dan lain-lain. Dengan kata lain, saat itu perekonomian Dusun Kaliadem lumpuh total, terutama sektor wisata. Masyarakat juga kehilangan mata pencaharian di sektor pertanian dan peternakan. Sebanyak 130 ekor sapi, 20 ekor kambing dan 100 ekor ayam mati, yang masih ditambah lagi dengan hancurnya hutan rakyat (kebun kayu) yang terkena awan panas.

Pasca erupsi Gunung Merapi, masyarakat mulai menata kembali kehidupannya, merintis kembali perekonomian

mereka. Setelah tinggal di Huntap Pagerjurang, mereka mulai merintis: **Pertama**, sektor peternakan, yang merupakan usaha andalan turun temurun sejak dulu, bahkan pemerintah dusun telah menetapkan keinginan untuk menjadikan peternakan menjadi soko guru perekonomian masyarakat. Agar masyarakat Dusun Kaliadem dapat bangkit kembali, pemerintah daerah melakukan pemberdayaan masyarakat, dengan menyalurkan bantuan sapi perah sebanyak 82 ekor sapi perah, yang dilengkapi dengan bantuan bagi pembuatan kandang sapi kelompok, sebanyak 2 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 41 ekor sapi perah;

Kedua, sektor pertanian, yang saat ini berupa hutan rakyat, yang tanamannya, antara lain: sengon dan jati, yang disela-selanya ditanami pisang, singkong, dan lain-lain, agar dapat menambah pendapatan ekonomi keluarga. Hutan rakyat relevan dengan kondisi alam di wilayah ini, dan hasil yang diperoleh juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (petani-hutan). Secara konseptual, hutan rakyat memiliki manfaat dalam mengembangkan sosio-ekologi dan sosio-ekonomi,



Gb. 32. Usaha penambangan pasir, kerikil, dan batu (bahan galian C) di wilayah Dusun Kaliadem.



Gb. 33. Usaha penyewaan jeep wisata, untuk mengunjungi obyek wisata lingkungan gunung api.

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

Ketiga, sektor galian C, yang berupa material hasil erupsi Gunung Merapi, seperti pasir gunung dan batu serta kerikil. Bahan galian C cukup banyak di dusun ini, karena Dusun Kaliadem disebelah Timur dilalui Sungai Gendol, dan di sebelah Barat dilalui Sungai Opak. Oleh karena itu, dusun ini dikenal sebagai penyedia pasir dan batu yang terbawa oleh banjir ketika terjadi hujan di puncak Gunung Merapi. Para penambang pasir dengan armada truknya selalu sibuk mengeruk pasir di wilayah ini, meskipun ada bahaya yang menghadang berupa kerusakan lingkungan. Setiap hari ratusan truk mengangkut pasir di alur sungai, sehingga lama-kelamaan pasir pun habis, kemudian penambang mulai mengeruk pinggir-pinggir sungai, sehingga daerah aliran sungai mengalami kerusakan, berupa lubang-lubang besar yang menganga. Pada tanggal 11 November 2014 pernah terjadi hujan pertama di tahun 2014, yang menimbulkan adanya korban jiwa 4 orang penambang pasir dan 2 buah truk yang terkubur pasir yang mengalir dari puncak Gunung Merapi;

Keempat, sektor wisata, yang berupa *Lava Tour*, yang memanfaatkan wilayah lereng Merapi sebagai obyek wisata. Masyarakat menyediakan jasa persewaan jeep wisata, yang siap mengantarkan para wisatawan menjelajah lereng Merapi. Termasuk dalam hal ini sejumlah tempat “peninggalan” awan panas, atau yang biasa disebut oleh masyarakat setempat dengan istilah “*wedus gembel*”. Selain berkeliling melihat tumpukan material, hal yang cukup menarik adalah *bunker* atau tempat perlindungan, yang gagal melindungi 2 (dua) orang yang berlindung di dalamnya, yang suhu di dalam

bunker mencapai 400° Celcius). Belasan meter ke arah timur dari *bunker*, wisatawan dapat melihat sisa-sisa bangunan warung makan dan lain-lain yang diterjang awan panas Gunung Merapi. Misalnya, pendopo besar, gedung BPPT (Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi), mushola, toilet dan pos keamanan, yang telah rata dengan tanah.

3. Kondisi Sosial

Secara sosial masyarakat Dusun Kaliadem dikenal memiliki karakter tradisional religius. Karakter ini dibangun melalui semangat dan ikhtiar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosio-religius, di mana karena sebagian besar masyarakat beragama Islam maka yang dibutuhkan adalah masjid dan kegiatannya. Kesungguhan masyarakat membangun tradisi religius, saat ini diekspresikan dalam berbagai kegiatan Islami di mushala. Uniknya, saat ini mushala tersebut hanya berupa bangunan kecil dari kayu, tetapi dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.



Gb. 34. Posyandu Dusun Kaliadem yang berada di Huntap, yang berfungsi sebagai fasilitas kesehatan dasar bagi masyarakat.



Gb. 35. Mushola yang dilengkapi dengan koran dinding, untuk memenuhi kebutuhan ibadah dan informasi masyarakat Dusun Kaliadem.

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

Sebagian besar penguasaan tanah di Dusun Kaliadem berupa Hak Milik Adat, sedangkan tanah yang ditempati masyarakat di Huntap Pagerjurang yang luasnya rata-rata 100 m² berstatus Hak Milik, yang sifatnya turun temurun, tetapi tidak boleh diperjual-belikan. Pasca erupsi Gunung Merapi tahun 2010, dan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemda Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) bekerja sama dengan Kanwil BPN Propinsi DIY melakukan penataan kembali tanah-tanah masyarakat Dusun Kaliadem.

Kegiatan penataan kembali tanah-tanah masyarakat Dusun Kaliadem bertujuan untuk memberikan akses jalan, agar evakuasi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Program yang dimaksud adalah konsolidasi tanah, yang untuk Dusun Kaliadem terdiri dari 295 bidang yang dapat diikuti-sertakan, tetapi akhirnya yang berpartisipasi. Hal ini disebabkan

pemilik atas 3 (tiga) bidang tanah mengundurkan diri, karena sudah bersertipikat dan posisinya berada dipinggir jalan, sehingga bidang tanah yang diajukan tersebut masih dalam proses sertifikasi di kantor pertanahan. Kegiatan ini pada akhirnya akan memperkuat pemilikan tanah oleh masyarakat Desa Kaliadem, yang akan semakin menguatkan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah.

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Dusun Kaliadem diberikan oleh Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), terutama untuk melayani kebutuhan kesehatan dasar bagi ibu dan anak. Posyandu berada di Huntap, di mana meskipun dokter dan bidan tidak selalu ada, tetapi keberadaan Posyandu sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Upaya pelayanan kesehatan menjadi penting, sebab ia merupakan salah satu variabel dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.



Gb. 36. Suasana permukiman di Huntap bagi masyarakat Dusun Kaliadem.



Gb. 37. Salah satu rumah anggota masyarakat Dusun Kaliadem di Huntap.

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

Keberadaan masyarakat di Huntap memperkuat kohesi sosial antar mereka, karena interaksi yang intens di antara mereka. Hal ini dibangun melalui berbagai kegiatan masyarakat, seperti: (1) pertemuan RT, (2) pertemuan RW, (3) pengamanan lingkungan atau ronda, (4) pengajian anak-anak, (5) pengajian ibu-ibu, dan (6) pengajian bapak-bapak. Beberapa anggota masyarakat mengakui keberadaan mereka di Huntap semakin menyenangkan, karena lingkungan Huntap yang tertata baik, dengan jarak antar rumah yang saling berdekatan. Suasana semakin menyenangkan, karena masyarakat memiliki fasilitas gedung pertemuan, yang berada di tengah-tengah Huntap, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat Dusun Kaliadem. Untuk membantu masyarakat,

agar tidak tertinggal informasi di Huntap juga terdapat tempat membaca koran, yang berada di depan gedung pertemuan. Ada dua harian yang tersedia di tempat baca ini, yaitu Kedaulatan Rakyat (KR Jogja) dan Harian Merapi.

Sementara itu, di lokasi Dusun Kaliadem, masyarakat berupaya membangun sistem peringatan dini, bila terjadi keadaan darurat. Sebagaimana diketahui wilayah dusun ini dilalui oleh Sungai Gendol dan Sungai Opak, yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tempat penggalian pasir, kerikil, dan batu (bahan galian C). Sistem peringatan dini dibangun, terutama untuk merespon musim penghujan yang beresiko mengancam keselamatan para penambang pasir, kerikil, dan batu. Untuk itu masyarakat Dusun Kaliadem bekerjasama dengan Pemerintah Desa Kepuharjo, dan relawan Kepuharjo (seperti: SKSB, Palem, Jajaran Cakra, serta Komunitas Balerante).

4. Kondisi Budaya

Secara budaya masyarakat Dusun Kaliadem dikenal memiliki karakter arif kultural. Karakter ini dibangun melalui berbagai aktivitas masyarakat Dusun Kaliadem di bidang seni dan budaya. Sebelum terjadi erupsi Gunung Merapi aktivitas ini relatif intens, yang diketahui dari adanya sanggar seni jatilan dan karawitan. Setelah terjadi erupsi Gunung Merapi, sanggar dan peralatan seni yang ada di dalamnya terkubur oleh material gunung api. Kondisi mulai membaik setelah masyarakat Kaliadem berada di barak pengungsian. Masyarakat mulai berlatih kembali seni jatilan di barak pengungsian, dengan memanfaatkan beberapa peralatan

pinjaman, yang dana untuk meminjam peralatan tersebut diperoleh dari donatur. Latihan ini akhirnya dipentaskan di barak pengungsian bekerjasama dengan Tim Martogolek.

Lambat laun, setelah tinggal di Huntap, masyarakat Dusun Kaliadem dapat melakukan latihan seni dan budaya dengan lebih intens. Akhirnya mereka mampu melakukan pementasan seni jatilan di Balai Desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman, yang berakhir sukses. Keberhasilan pementasan ini memberi kesan mendalam, dan berhasil menanamkan semangat baru bagi segenap anggota tim seni jatilan Dusun Kaliadem.

E. Jambu: Mengharmonikan Agrowisata Di Sisi Pertambangan Pasir

1. Kondisi Alam

Dusun Jambu dikenal oleh adanya agrowisata khas Lereng Merapi, khususnya tanaman Jambu. Agrowisata ini dikembangkan oleh masyarakat, karena mereka terinspirasi dari nama dusun mereka, yang sejak dahulu bernama “Dusun Jambu. Oleh karena itu, syair lagu yang menyatakan, “Apa arti sebuah nama?” bagi masyarakat tidak berlaku, karena mereka “mendengarkan lagu” yang berarti sebaliknya, “Inilah arti sebuah nama.”

Dusun Jambu yang merupakan bagian dari wilayah Desa Kepuharjo berada pada jarak 4 km arah Utara dari Kantor Desa Kepuharjo, sedangkan Desa Kepuharjo berada pada jarak 7 km arah Utara kota Kecamatan Cangkringan, dan 27 km arah Timur Laut ibukota Kabupaten Sleman. Kawasan ini memiliki

aksesibilitas baik, mudah dijangkau, dan terhubung dengan daerah-daerah lain di sekitarnya oleh jalur transportasi jalan raya.

Sementara itu berdasarkan letaknya, Dusun Jambu berada pada lereng tengah Gunung Merapi bagian atas, yang berada pada ketinggian antara 850 m sampai dengan 975 m di atas permukaan laut, dengan bentuk permukaan tanah bergelombang, dengan kemiringan rata-rata sebesar 8 %, yang mengarah ke Utara-Selatan. Bentuk wilayah Dusun Jambu memanjang arah Utara-Selatan dengan luas wilayah ± 60 ha dengan lebar di bagian selatan ± 1 km dan di bagian utara ± 100 m yang memanjang sejauh 2 km.

Wilayah Dusun Jambu berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut: (1) di sebelah Timur dibatasi oleh Sungai Gendol, yang sekaligus menjadi batas antara Dusun Jambu dengan wilayah Desa Glagaharjo; (2) di sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Kaliadem; (3) di sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Petung, dan (4) di sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Kopeng.

Jumlah bidang tanah di Dusun Jambu mencapai ± 294 bidang, di mana 170 bidang di antaranya (58%) telah bersertipikat, yang antara lain ditempuh melalui kegiatan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) dan konsolidasi tanah. Sementaraitu, Huntap yang sekarang ditempati masyarakat Dusun Jambu merupakan hasil peralihan hak atas tanah. Semula tanah Huntap berstatus sebagai tanah Kas Desa, lalu beralih menjadi tanah hak milik masyarakat Dusun Jambu. Walaupun saat ini masih dalam proses penyelesaian. Masing-masing anggota masyarakat Dusun Jambu yang

tinggal di Huntap mendapatkan tanah seluas 100 m². Huntap terdiri dari 210 unit rumah, yang ditempati oleh 378 orang.



Gb. 38. Rumput gajah yang diusahakan oleh masyarakat, untuk makanan ternak (sapi perah)



Gb. 39. Bibit tanaman yang diusahakan masyarakat, agar suatu saat Dusun Jambu kembali hijau

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

Sebelum terjadi erupsi Gunung Merapi tahun 2010, pola pemukiman penduduk menyebar tidak merata, di mana sebagian besar berada di bagian tengah wilayah dusun. Sementara itu, jenis pertanian yang ada di Dusun Jambu adalah pertanian tanah kering, yang berupa tegalan dan kebun campuran. Saat ini wilayah Dusun Jambu merupakan daerah Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang kondisi fisik wilayahnya sebagian besar tertutup oleh pasir material Gunung Merapi, sedangkan masyarakat Dusun Jambu bermukim di Huntap, yang berada di luar daerah KRB, atau tepatnya di bagian selatan wilayah Dusun Jambu.

Pola penggunaan tanah Dusun Jambu didominasi oleh jenis pertanian tanah kering dan tegalan yang mencapai 75 %, yang dimanfaatkan untuk tanaman keras seperti sengon, mahoni, dan jabon, serta HMT (Hijauan Makanan Ternak), seperti: rumput gajah. Sebagai bentuk antisipasi keadaan darurat Gunung Merapi, saat ini tidak ada anggota masyarakat Dusun Jambu yang bertempat tinggal di daerah KRB. Khusus untuk bahan galian C (pasir, kerikil, dan batu), maka 25% dari luas wilayah dusun ini merupakan areal penambangan.

Dalam rangka rehabilitasi dan peningkatan produktivitas tanah, masyarakat telah melakukan pembibitan tanaman tahunan, seperti: sengon, mahoni, dan buah-buahan, yang kemudian dibudidayakan di tanah pertaniannya. Pada saatnya nanti, Dusun Jambu akan kembali menjadi hijau, dan berfungsi sebagai kawasan resapan air yang bermanfaat bagi kawasan di bawahnya, terutama dalam penyediaan air tanah, yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali banjir.

Saat ini, karena sebagian besar permukaan wilayah Dusun Jambu tertutup material gunung api, maka masyarakat memanfaatkannya sebagai areal penambangan bahan galian C, yang langsung dijual kepada pengumpul. Kegiatan ini juga memberi pendapatan (retribusi) bagi Pemerintah Desa Kepuharjo. Lokasi penambangan berada di alur Sungai Gendol, yang tepatnya berada di sebelah Timur dusun, yang juga merupakan areal pekarangan milik masyarakat. Setiap harinya volume material pasir dan batu yang diambil dari Dusun Jambu antara 150 s/d 200 *truck*, yang selanjutnya diangkut untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, bahkan hingga Provinsi Jawa Tengah.



Gb. 40. Penambangan bahan galian C di Sungai Gendol



Gb. 41. Usaha penyewaan jeep wisata oleh masyarakat Dusun Jambu

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

Pemanfaatan tanah secara optimal dilakukan oleh Ngadirejo yang memanfaatkan tanahnya di daerah KRB untuk usaha ternak sapi perah sebanyak 20 ekor, sehingga ia dapat memperoleh penghasilan harian. Sesungguhnya daerah KRB bukanlah wilayah yang tidak boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, melainkan wilayah yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, dengan memperhatikan aspek kebencanaan.

Berternak sapi perah merupakan salah satu keahlian yang dimiliki oleh masyarakat Dusun Jambu, selain bertani dan jasa pariwisata. Sektor wisata berpeluang berkembang pesat, karena objek wisata gunung api yang tersedia relatif banyak. Sebagai contoh, di tepi Sungai Gendol terdapat sebuah batu yang ukurannya besar dan mempunyai bentuk yang

unik. Apabila diamati secara seksama terlihat menyerupai bentuk kepala seorang yang sudah tua, tetapi beberapa orang melihatnya menyerupai makhluk asing dari ruang angkasa, yang disebut “alien” (Bahasa Inggris).

Sementara itu, ada sebagian masyarakat yang menjelaskan, bahwa batu tersebut merupakan batu yang berpindah atau beralih dari puncak Gunung Merapi ke wilayah Dusun Jambu, sehingga disebut “alihan” (Bahasa Jawa). Perpaduan sebutan antara “alien” dengan “alihan” yang ditujukan pada batu tersebut, akhirnya membuat batu tersebut semakin populer. Batu Alien atau Batu Alihan merupakan salah satu obyek wisata *Lavatour*, yang sering dikunjungi oleh wisatawan pada musim liburan.

2. Kondisi Ekonomi

Secara ekonomi masyarakat Dusun Jambu dikenal memiliki karakter energik dalam berusaha. Karakter ini dibangun melalui ikhtiar yang terus menerus, yang diperlihatkan masyarakat ketika mengatasi dampak erupsi Gunung Merapi. Sebelum erupsi Gunung Merapi tahun 2010, kegiatan ekonomi masyarakat Dusun Jambu didominasi oleh pertanian dalam arti luas, yang meliputi: (1) usaha peternakan sapi perah, (2) usaha pertanian tanah kering yang berupa tegalan dan kebun campuran. Setelah erupsi Gunung Merapi, kegiatan ekonomi masyarakat Dusun Jambu mengalami penyesuaian, terutama disebabkan kuatnya desakan untuk menambang bahan galian C.

Meskipun demikian, saat ini usaha peternakan sapi perah tetap merupakan sektor unggulan Dusun Jambu. Kepemilikan

sapi perah masyarakat Dusun Jambu saat ini antara 3 – 4 ekor, sehingga populasinya kurang lebih sebanyak 200 ekor. Usaha ternak sapi perah didukung oleh adanya kandang kelompok, yang setiap kelompok terdiri dari \pm 20 ekor sapi, yang dimiliki oleh 6 KK (Kepala Keluarga). Satu ekor sapi rata-rata menghasilkan 10 – 15 liter per hari, dengan biaya pemeliharaan untuk setiap 3 ekor sapi sebesar \pm Rp. 70.000,- yang digunakan untuk membeli HMT (Hijauan Makanan Ternak), sedangkan tenaga manusia yang memelihara tidak dihitung sebagai biaya pemeliharaan. Para peternak sapi perah menjual susu sapi mereka ke Koperasi Saroni Makmur dan Koperasi UUP Kaliurang, di mana setiap 1 liter susu sapi harganya Rp. 4.000,-. Pada umumnya seorang peternak sapi perah setiap harinya dapat memperoleh penghasilan sebesar: 3 ekor x 15 liter x Rp. 4.000,- = Rp. 180.000,- - Rp. 70.000,- = Rp. 110.000,-. Selain memberi pendapatan sebesar Rp. 110.000,- per hari, sapi perah juga menghasilkan limbah berupa kotoran sapi, yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kandang.

Profesi ganda yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Jambu, memberi dampak positif bagi ekonomi dusun. Beberapa kepala keluarga ada yang merangkap sebagai buruh sekaligus sebagai peternak, atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) sekaligus petani, atau petani sekaligus penambang. Khusus sebagai penambang bahan galian C, masyarakat Dusun Jambu dapat memperoleh penghasilan rata-rata sebesar Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 150.000,-/orang /hari. Sementara itu, mereka yang berprofesi sebagai petani, memusatkan perhatiannya pada tanaman keras seperti sengon, mahoni,

albasia, serta tanaman buah-buahan, seperti: nangka, alpukat, jambu, pisang dan pepaya. Selain itu, para petani ini juga menanam HMT (Hijauan Makanan Ternak) seperti; rumput gajah, di antara tanaman keras, sehingga tanah dapat dimanfaatkan secara optimal, dan kondisi ekonomi dapat ditingkatkan. Kegiatan ekonomi juga berkembang di Huntap melalui berbagai usaha penyediaan jasa, seperti: membuka warung, jasa angkutan, dan jasa-jasa lainnya.



Gb. 42. Usaha peternakan sapi perah oleh masyarakat Dusun Jambu



Gb. 43. Kandang kelompok untuk menampung sapi perah yang dipelihara masyarakat

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

Berbagai usaha produktif tersebut akhirnya berhasil meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, yang terlihat pada hunian yang bangunannya semakin baik. Pada mulanya masyarakat mendapat tanah di Huntap seluas 100 m², yang di atasnya didirikan bangunan seluas 45 m² (tipe 45), saat ini telah berubah di mana masyarakat telah merenovasi bangunannya dan menambah luas bangunannya, sehingga Huntap semakin nampak asri dan megah.

3. Kondisi Sosial

Secara sosial masyarakat Dusun Jambu memiliki karakter tradisional dinamis. Karakter ini dibangun melalui berbagai

kesepakatan sosial yang berlaku di masyarakat, yang bertujuan merespon dinamika ekologi Gunung Merapi. Salah satu kesepakatan yang berhasil dibangun oleh masyarakat adalah kesepakatan dalam penentuan batas pemilikan tanah.

Sebagaimana diketahui, akibat erupsi Gunung Merapi maka material vulkanik yang berupa pasir dan batu menutup tanah dan batas-batasnya. Namun bagi masyarakat pengembalian batasnya tidaklah masalah, karena mereka sepakat menentukan kembali batas-batas bidang tanahnya dengan melihat tanda-tanda alam yang masih nampak. Keberadaan tanda-tanda alam ini didukung oleh kondisi topografi yang berlereng dan berupa sengkedan, sehingga batas bidang tanahnya masih dapat direkonstruksi.

Setelah erupsi Gunung Merapi, kehidupan sosial masyarakat Dusun Jambu mengalami perubahan, karena perubahan lingkungan permukiman dari yang semula berupa perkampungan dengan rumah penduduk yang menyebar dan tidak merata, menjadi permukiman yang mengelompok dalam satu lokasi yang saling berdekatan. Perubahan terjadi karena adanya peningkatan intensitas interaksi sosial antar anggota masyarakat yang berada di Huntap. Interaksi sosial ini membentuk ulang pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku masyarakat sehingga menjadi lebih solid dalam menghadapi dinamika sosial dan dinamika alam (ekologi Gunung Merapi).

Soliditas sosial Dusun Jambu juga memberi dampak berupa kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana gunung api, yang terlihat dari tidak diabaikannya wilayah Dusun Jambu yang masuk KRB (Kawasan Rawan Bencana), tepatnya KRB

III. Pada wilayah KRB III, Pemerintah melarang masyarakat bertempat tinggal, dan memerintahkan masyarakat untuk bertempat tinggal di tempat aman yang telah disediakan, yaitu Huntap (Hunian Tetap). Namun demikian masyarakat masih diperkenankan melakukan aktivitas sehari-hari, terutama dalam kaitannya dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah, misalnya dengan menggarap tanah pertaniannya secara optimal. Hal inilah yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Jambu, sehingga mereka tidak tinggal atau tidak bertempat tinggal di wilayah KRB, melainkan tinggal atau bertempat tinggal di Huntap yang letaknya relatif jauh dari wilayah KRB.

Kesadaran dan kesiapan menghadapi bencana gunung api juga dimiliki oleh masyarakat Dusun Jambu, yang terlihat dari banyaknya papan pengumuman di lokasi-lokasi strategis. Papan pengumuman itu berisi himbauan untuk selalu siap sedia menghadapi bencana gunung api, dan menerapkan tata sosial tradisional yang menghormati alam, misalnya dengan berperilaku sopan dan menghindari kegaduhan sosial. Sesungguhnya kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana gunung api tidaklah dikonstruksi sekejap mata, melainkan telah dibangun sejak tahun 1990-an hingga saat ini, mulai dari tingkat RT (Rukun Tetangga) hingga tingkat desa.

Adanya soliditas sosial juga nampak dari kemampuan masyarakat dalam membangun jalan dusun sepanjang 1 (satu) kilometer, yang menghabiskan dana sebesar Rp 412.000.000,-. Soliditas juga nampak pada adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) yang dimaksudkan

untuk mengantisipasi bencana. Dalam rangka antisipasi bencana, masyarakat membangun komunitas yang bekerja sepanjang waktu secara bergiliran, dengan memanfaatkan HT (*Handy Talky*) sebagai alat komunikasi, agar masyarakat berkesempatan melakukan evakuasi bila terjadi bencana.

Sebagai sebuah instrumen pengaman sosial, maka soliditas sosial sangat diperlukan oleh masyarakat, terutama untuk saling bantu dengan sebagian masyarakat (40%) yang masih tergolong miskin. Mereka yang tergolong miskin masih hidup di bawah standar, sehingga membutuhkan dukungan sosial dan psiko-sosial dari anggota masyarakat lainnya. Sementara itu, sebagian masyarakat yang tergolong miskin ini mendapat bantuan dari Pemerintah berupa jaminan sosial, seperti: (1) pembagian raskin (beras bagi keluarga miskin), dan (2) santunan jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat).

Kondisi sosial selain berisi interaksi, soliditas, dan kesejahteraan, juga “diwarnai” oleh etos sosial. Terkait dengan etos sosial, maka masyarakat Dusun Jambu perlu mendapat acungan jempol, karena beberapa anggota masyarakat yang berusia lanjut masih memiliki semangat kerja yang tinggi. Etos sosial yang tinggi pulalah yang membuat masyarakat Dusun Jambu mampu merawat dan merenovasi Huntap hingga menjadi tempat tinggal yang nyaman. Sementara itu, Pemerintah terus membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti: pembangunan masjid (yang megah), dan fasilitas kesehatan. Selain itu, Pemerintah juga membangun kandang sapi perah kelompok, sehingga peternak sapi perah semakin bersemangat.

4. Kondisi Budaya

Secara budaya masyarakat Dusun Jambu dikenal memiliki karakter arif spiritual. Karakter ini dibangun melalui tradisi yang menghormati dan berupaya memelihara budaya, yang dalam istilah lokal disebut “*nguri-uri budoyo*”. Budaya yang dipelihara tersebut meliputi: ritual keagamaan, ritual sosial, dan ritual ekologis. Meskipun dapat dikenali sebagai ritual keagamaan, ritual sosial, dan ritual ekologis, tetapi sesungguhnya ketiga ritual ini tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan lainnya. Bahkan lebih tepat bila dikatakan, bahwa tradisi yang ada di masyarakat lebih kental kearifan spiritual atau kearifan keagamaannya. Selanjutnya, kearifan spiritual ini “melahirkan” kearifan sosial dan ekologis.

Sebagai contoh, dalam tradisi “sedekah bumi” atau “sedekah dusun” sesungguhnya terkandung: **Pertama**, ritual keagamaan, ketika masyarakat melakukan tradisi tersebut sebagai bentuk rasa syukur atau ucapan terimakasih kepada Tuhan. **Kedua**, ritual sosial, ketika masyarakat melakukan tradisi tersebut dalam bentuk kenduri sosial, di mana segenap anggota masyarakat hadir untuk saling berinteraksi dalam kebersamaan. **Ketiga**, ritual ekologis, ketika masyarakat melakukan tradisi tersebut dengan tujuan untuk memelihara lingkungan agar tetap lestari, hijau, dan mampu memberi kesejahteraan.

Ada tiga tradisi utama yang dipelihara dari generasi ke generasi di Dusun Jambu, yaitu: Pertama, sedekah dusun atau sedekah bumi, yang dilaksanakan pada Bulan Suro atau Bulan Muharam. Tradisi ini dilaksanakan sebagai rasa syukur kepada

Tuhan yang telah memberi keberkahan pada masyarakat dusun; Kedua, merti dusun, yang dilaksanakan pada Bulan Maulud. Tradisi ini dilaksanakan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, yang telah berkenan mengirim utusannya untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia; Ketiga, dandan kali, yang dilaksanakan pada akhir tahun dalam perhitungan tahun Masehi. Tradisi ini dilaksanakan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, yang telah berkenan memberi air bersih pada masyarakat, sehingga sebagai timbal-baliknya masyarakat akan memelihara sungai atau kali yang menjadi jalan bagi adanya air bersih.

Selain tiga tradisi utama tersebut (sedekah dusun, merti dusun, dan dandan kali), masyarakat juga memelihara kegiatan budaya lainnya, seperti: nyadran, dan kupatan. Kesenian tradisional terus dipertahankan dan dipelihara oleh masyarakat, seperti adanya paguyuban karawitan, yang melibatkan banyak anggota masyarakat Dusun Jambu. Budaya tidak hanya berkaitan dengan seni tradisi, melainkan juga nampak dari bangunan tempat tinggal masa kini, yang menunjukkan apresiasi masyarakat atas tempat tinggalnya.



Gb. 44. Seni karawitan sebagai upaya “nguri-uri budoyo”

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014, yang berasal dari poster yang terdapat di Dusun Jambu



Gb. 45. Tempat tinggal salah seorang anggota masyarakat di Huntap

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

F. Kopeng: Respon Ketiadaan Sawah

1. Kondisi Alam

Dusun Kopeng berada di lereng selatan Gunung Merapi, yang wilayahnya relatif subur, sehingga penggunaan dan pemanfaatan tanah di dusun ini didominasi oleh pertanian. Sebelum dan setelah erupsi Gunung Merapi dominasi pertanian ini terus dipertahankan oleh masyarakat. Pasca erupsi Gunung Merapi masyarakat memanfaatkan tanah yang dimilikinya untuk menanam tanaman keras (misal: sengan), dan tanaman-tanaman tegalan. Sebagaimana diketahui sawah memang tidak ada di Dusun Kopeng, karena sarana, prasarana, dan kondisi geografis wilayah ini tidak memungkinkan untuk itu. Sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungannya yang subur, maka profesi masyarakat di dusun ini bersifat *on-farm*, dan *off-farm*, serta *non-farm*.

2. Kondisi Ekonomi

Secara ekonomi masyarakat Dusun Kopeng dikenal memiliki karakter adaptif memanfaatkan potensi. Karakter ini dibangun melalui keahlian masyarakat dalam menciptakan pekerjaan dan memperoleh pendapatan dari pekerjaannya. Telah menjadi pengetahuan banyak orang, bahwa sebagian masyarakat Dusun Kopeng memiliki keahlian membuat batako. Sementara itu ada sebagian lainnya yang memiliki keahlian berternak sapi perah, bertani, memelihara ikan di kolam, dan jasa pariwisata. Bagi anggota masyarakat yang menekuni pembuatan batako, keahlian ini cukup menarik, karena batako dibuat dengan memanfaatkan material pasir

yang melimpah dari erupsi Gunung Merapi. Untuk setiap satu sak semen setelah ditambah dengan pasir, akan dihasilkan 80 buah batako, dengan harga Rp3.000,- per buah. Pemasaran batako cukup mudah, yaitu cukup diantar ke pemesan, atau diambil sendiri oleh pemesan.



Gb. 46. Rumah sederhana dan pekarangan masyarakat Dusun Kopeng



Gb. 47. Plot rehabilitasi lahan pasca erupsi Gunung Merapi tahun 2010

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

Kondisi ekonomi masyarakat Dusun Kopeng ditandai oleh semangat ekonomi yang tinggi. Beberapa anggota masyarakat ada yang berprofesi ganda, sehingga memberi dampak positif bagi ekonomi dusun. Beberapa anggota masyarakat ada yang merangkap sebagai buruh sekaligus sebagai peternak, atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) sekaligus petani, atau petani sekaligus pembuat batako. Sebelum erupsi Gunung Merapi tahun 2010, kegiatan ekonomi masyarakat Dusun Kopeng lebih banyak berupa kegiatan yang terkait dengan sapi perah, serta tegalan dan kebun campuran. Setelah erupsi Gunung Merapi, kegiatan ekonomi masyarakat Dusun Kopeng mengalami penyesuaian, terutama sebagai bentuk respon atas melimpahnya bahan galian C.

3. Kondisi Sosial

Secara sosial masyarakat Dusun Kopeng dikenal memiliki karakter tradisional sederhana. Karakter ini dibangun melalui sejarah dusun sejak lama, seiring dengan bertumbuhnya masyarakat, yang telah ada sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagaimana dusun lainnya di Desa Kepuharjo, Kepala Dusun Kopeng mendapat tanah bengkok, seluas 1,2 Ha, yang berupa tanah darat atau tanah kering. Sejak dahulu para Kepala Dusun Kopeng menggunakan tanah bengkoknya untuk tegalan, yang ditanami tanaman keras dan tanaman semusim.

Dusun Kopeng berada di lereng selatan Gunung Merapi, dengan jumlah penduduk 154 kepala keluarga. Masyarakat Dusun Kopeng sebagian besar telah pindah dari wilayah

Dusun Kopeng, untuk tinggal di Huntap yang meskipun berada di luar wilayah dusun tetapi jauh dari wilayah KRB (Kawasan Rawan Bencana). Sebanyak 96 kepala keluarga telah tinggal di Huntap, sedangkan sisanya (58 kepala keluarga) masih bertempat tinggal di wilayah dusun. Bidang tanah yang berada di wilayah Dusun Kopeng berjumlah 294 bidang, yang digunakan untuk permukiman dan pertanian. Oleh karena kesadaran hukum masyarakat yang relatif tinggi, dari 294 bidang tanah yang ada, ternyata 205 bidang tanah telah bersertipikat melalui program konsolidasi tanah, selain 89 sertipikat hak atas tanah yang telah ada sebelumnya (sebelum erupsi Gunung Merapi).



Gb. 48. Rumah masyarakat Dusun Kopeng yang relatif sederhana, banyak membutuhkan batako



Gb. 49. Beberapa anggota masyarakat berusaha mengembangkan industri kecil yang memproduksi batako

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

Bagi masyarakat Dusun Kopeng, kesederhanaan merupakan karakter hidup mereka. Oleh karena itu, kondisi sosial dusun ini juga dicirikan oleh kesederhanaan masyarakatnya. Rumah-rumah yang ada di Dusun Kopeng sebagian masih berupa bangunan sederhana, yang berupa rumah kayu dan batako. Meskipun hidup sederhana, masyarakat Dusun Kopeng sangat mengutamakan fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus), sehingga masing-masing rumah sudah memiliki MCK, atau telah tersedia satu MCK untuk setiap satu KK (Kepala Keluarga). Selain itu, setiap kepala keluarga juga memiliki air bersih, yang disalurkan melalui kran air, yang merupakan usaha swadaya masyarakat. Air bersih disalurkan dari mata air di sekitar Sungai Kuning, yang operasionalisasi pembiayaannya dikelola oleh masyarakat.

4. Kondisi Budaya

Secara budaya masyarakat Dusun Kopeng dikenal memiliki karakter arif kultural. Karakter ini dibangun melalui pemaknaan budaya oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui budaya merupakan sisi atau bagian kehidupan yang tak dapat dilepaskan dari masyarakat Dusun Kopeng. Hal ini dikarenakan sejak tahun 1954 masyarakat telah merintis bentuk apresiasi atas budayanya sendiri. Pada tahun tersebut berdiri grup kesenian jatilan, yang terus menerus mengembangkan diri, sehingga eksis di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Grup Jatilan Dusun Kopeng seringkali mengisi acara kesenian di beberapa tempat, terutama yang diperuntukkan bagi wisatawan, misalnya di Hotel Hyaat.



Gb. 50. Lokasi Grup Jatilan Ngestirahayu Kopeng, yang selalu siap melestarikan tradisi kesenian



Gb. 51. Jatilan merupakan salah satu seni dan tradisi lokal yang memperlihatkan semangat juang masyarakat

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

Sege-nap potensi di lereng Merapi perlu dikonsolidasi, agar mampu memberi manfaat optimal bagi masyarakat setempat. Potensi alam, ekonomi, sosial dan budaya merupakan modal dasar untuk pengembangan wilayah, dan menumbuhkan kembali sumber penghidupan masyarakat. Ketika *ecotourism* menjadi jawaban atas kebutuhan ini, maka strategi pengembangan *ecotourism* sangat diperlukan, baik melalui pengembangan kelembagaan, maupun melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya.

BAB V

STRATEGI PENGEMBANGAN *ECOTOURISM*

A. Optimalisasi Hasil Konsolidasi Tanah

Konsolidasi tanah memiliki *output* (hasil) berupa sertipikat hak atas tanah, yang diserahkan kepada peserta pada hari Jumat, 6 Maret 2015, oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (Fery Mursidan Baldan) dengan didampingi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sertipikat hak atas tanah diperoleh masyarakat, melalui mekanisme pendaftaran tanah yang dipadukan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah.

Sertipikat hak atas tanah hasil konsolidasi tanah merupakan alat pembuktian yang kuat, yang mampu memberi jaminan kepastian hukum kepada pemilik tanah (peserta konsolidasi tanah). Hal ini diamanatkan oleh pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga diperlukan: **Pertama**, tersedianya perangkat hukum yang lengkap dan jelas, serta dilaksanakan secara konsisten. Untuk hal ini sejak tahun 1961 telah diberlakukan Peraturan Pemerintah tentang

Pendaftaran Tanah, yang saat itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Sebagai bentuk ikhtiar perbaikan, pada tahun 1997 diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Untuk kepentingan pelaksanaannya diberlakukan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Kedua, terselenggaranya pendaftaran tanah yang efektif. Untuk hal ini kantor pertanahan telah menerapkan pendaftaran tanah yang relatif cepat, sederhana, dan berbiaya murah. Selain itu, kantor pertanahan juga telah memadukan kegiatan pendaftaran tanah dengan berbagai kegiatan pertanahan lainnya, misalnya memadukan kegiatan pendaftaran tanah dengan kegiatan konsolidasi tanah.

Ketika *output* konsolidasi tanah berupa sertifikat hak atas tanah, maka pemegangnya mendapat jaminan kepastian objek, jaminan kepastian hak atas tanah, dan jaminan kepastian subjek. Sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat atas pemilikan suatu bidang tanah, yang sekaligus bermakna bahwa sertifikat hak atas tanah bukanlah alat bukti yang mutlak. Banyak pihak yang memperoleh manfaat dari adanya sertifikat hak atas tanah, yaitu: **Pertama**, manfaat sertifikat hak atas tanah (pendaftaran tanah) bagi pemerintah, antara lain: (1) Terwujudnya tertib pertanahan, khususnya tertib administrasi pertanahan, sehingga memperlancar berbagai kegiatan yang

berbasis tanah; (2) Mencegah terjadinya konflik pertanahan, khususnya yang disebabkan oleh konflik kepentingan untuk memperebutkan tanah, misalnya penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara liar atau ilegal, serta sengketa batas kepemilikan tanah.

Kedua, manfaat sertipikat hak atas tanah bagi pemilik tanah (pemegang sertipikat hak atas tanah), yaitu: (1) secara psikologis memberikan rasa aman, karena adanya jaminan kepastian hukum atas objek, hak atas tanah, dan subjek; (2) memudahkan terjadinya peralihan hak atas tanah, ketika pemilik tanah berkepentingan untuk mengalihkan tanahnya kepada pihak lain; (3) berkesempatan memperoleh taksiran harga tanah yang lebih tinggi, karena hak atas tanahnya telah memiliki jaminan kepastian hukum; (4) berkesempatan memperoleh tambahan modal usaha, karena pihak bank atau pemberi kredit memperoleh jaminan pengembalian hutang yang kuat, saat sebidang tanah bersertipikat diagunkan; (5) berkesempatan memperoleh kepastian atas taksiran besaran pajak (misal: pajak bumi dan bangunan) yang harus dibayarkan, karena bidang tanah tersebut memiliki jaminan kepastian objek; dan (6) berkesempatan memiliki bukti otentik, karena sertipikat hak atas tanah merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dalam arti bahwa hakim terikat dengan data/informasi yang disebutkan dalam sertipikat hak atas tanah, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.

Selain berupa sertipikat hak atas tanah, konsolidasi tanah terutama memberi *output* berupa kawasan yang tertata

baik. Sebagaimana diketahui konsolidasi tanah di Lereng Merapi menghasilkan kawasan yang tertata baik, sehingga berpeluang membentuk harmoni sosio-spasial dan dapat mensejahterakan masyarakat. Bila muncul keadaan darurat bencana (erupsi Gunung Merapi), penataan kawasan pasca konsolidasi tanah ini mampu mendukung evakuasi anggota masyarakat secara cepat, sehingga keselamatan masyarakat dapat secara optimal diupayakan. Evakuasi lebih mudah dan lebih cepat dilaksanakan, karena adanya jalur-jalur evakuasi berupa jalan desa yang lebih lebar dari sebelumnya. Jalan desa yang diperlebar merupakan hasil STUP (Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan) yang dikontribusikan oleh peserta konsolidasi tanah, untuk kepentingan bersama.

Pada akhirnya, sertipikat hak atas tanah dan kawasan Lereng Merapi yang tertata baik membuka peluang bagi dilaksanakannya *ecotourism*. Untuk mendukung peran *ecotourism* sebagai strategi penghidupan masyarakat, maka berbagai potensi di Lereng Merapi perlu dikonsolidasi dalam bingkai kelembagaan. Hal ini penting, agar pengelolaan, pengaturan, dan koordinasi dapat dilakukan secara optimal, sehingga segenap potensi dapat berdayaguna dan berhasil guna. Oleh sebab itu, pengembangan kelembagaan perlu dilakukan, baik pengembangan kelembagaan oleh masyarakat, maupun pengembangan kelembagaan oleh pemerintah desa.

B. Pengembangan Kelembagaan

Kelembagaan merupakan salah satu aspek pokok yang menjadi landasan dalam pengembangan wilayah, selain aspek

politik, hukum dan aspek teknis. Aspek kelembagaan berperan dalam pengaturan dan pengelolaan sebuah wilayah yang akan dikembangkan. Dalam konteks Lereng Merapi, perlu dilakukan pengembangan kelembagaan yang mampu mengelola *ecotourism*, khususnya mengelola kawasan pariwisata berbasis sumberdaya alami, yang mampu memberi kontribusi pada kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Karena adanya kelembagaan, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan *land use planning*, yang dibangun berdasarkan dialog antar *stakeholder*, yang berisi negosiasi dan keputusan untuk mewujudkan keberlanjutan penggunaan tanah di wilayah pedesaan.

Dalam upaya mewujudkan *ecotourism* sebagai strategi penghidupan, paling tidak melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yang meliputi warga masyarakat, negara atau pemerintah serta sektor swasta dan dunia usaha. Masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengupayakan keterlibatan masyarakat agar berpartisipasi aktif di dalamnya. Sektor swasta dan dunia usaha berperan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus menggerakkan roda perekonomian, sedangkan institusi negara atau pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif (Sumarto, 2004).

Berdasarkan pandangan tersebut, maka pengembangan kelembagaan masyarakat di Lereng Merapi mutlak

diperlukan. Kelembagaan inilah yang akan berperan dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, sekaligus mengartikulasikannya pada pemangku kepentingan lainnya, yakni pemerintah dan pelaku usaha. Dalam konteks ini maka relevan, ketika pengembangan kelembagaan difokuskan pada: **Pertama**, pengembangan kelembagaan oleh masyarakat di lingkungan warga masyarakat, yang merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan, pemberdayaan masyarakat memiliki perspektif lebih luas. Pearse dan Stiefel (dalam Kartasasmita, 1996) menyatakan, bahwa menghormati kebhinekaan, kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuatan dan peningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatif. Pemberdayaan berarti pula sebagai pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*), sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.

Dengan demikian pengembangan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan *ecotourism* perlu dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak dijadikan sebagai objek pembangunan belaka, tetapi menjadi subjek yang ikut menentukan keberhasilan sebuah program pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat diberi kewenangan dan otoritas untuk merencanakan dan menentukan pilihan-pilihan secara aktif dalam proses yang dijalankan, termasuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pemanfaatan hasil (Sutaryono, 2008).

Pengembangan kelembagaan oleh masyarakat dimaksudkan untuk turut mewujudkan *ecotourism* di Lereng Merapi, karena ia dapat dilakukan melalui berbagai tahapan, baik mengembangkan kelembagaan yang sudah ada, maupun membentuk lembaga baru. Ada tahapan penting dalam pengembangan kelembagaan yang perlu diperhatikan, antara lain: (1) tahap identifikasi dan pemetaan potensi sumberdaya yang menunjang *ecotourism*; (2) tahap identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan yang terkait erat dengan potensi sumberdaya; (3) tahap konsolidasi potensi sumberdaya dan pemangku kepentingan; (4) tahap klasifikasi potensi berdasarkan jenis sumberdaya; (5) tahap pembentukan kelompok masyarakat berdasarkan potensi wisata yang memungkinkan untuk dikembangkan; (6) tahap membangun jejaring antar kelompok untuk kepentingan agenda wisata di lereng Merapi; dan (7) tahap melakukan kerjasama antar kelompok, baik berhubungan dengan jalur kunjungan, informasi potensi, dan kolaborasi paket-paket wisata.

Tahapan-tahapan tersebut hanya dapat dilakukan ketika, masyarakat di kawasan *ecotourism* telah saling percaya satu sama lain, dan mempunyai semangat untuk saling mendukung dan bekerjasama. Apabila hal ini telah terwujud, maka selanjutnya secara formal dapat dibentuk kelompok atau komunitas wisata berdasarkan objek wisata yang dikelola oleh kelompok atau komunitas tersebut. Sebagai contoh, kelompok yang sudah eksis adalah komunitas jeep, motor, dan pemandu wisata *lava tour*, kelompok seni, kelompok ternak, dan

kelompok industri rumah tangga. Apabila berbagai kelompok ini sudah terbentuk dan mampu membangun jejaring, maka secara formal dapat dikukuhkan menjadi desa wisata.

Kedua, pengembangan kelembagaan oleh pemerintah desa, yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini membawa harapan baru bagi pemerintah desa dan masyarakatnya, karena berdasarkan undang-undang ini desa dipandang sebagai sebuah entitas, yang mampu memandirikan diri dengan mengembangkan aset-asetnya sebagai sumber penghidupan. Dalam konteks ini desa dianggap mampu melakukan pengelolaan kebijakan, perencanaan keuangan, dan melakukan pelayanan dasar bagi warga masyarakat dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan dan kemandirian. Agar desa mampu memainkan peran dalam mempercepat kesejahteraan dan kemandirian, maka pembentukan dan atau pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan mutlak diperlukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan, bahwa ada beberapa hal yang bersifat strategis yang dapat dilakukan oleh desa. Dalam hal ini terdapat dua agenda strategis yang berhubungan dengan upaya pengembangan kawasan *ecotourism*, yakni rencana investasi dan pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes ini diorientasikan untuk menempatkan usaha desa sebagai badan usaha yang hasilnya dapat digunakan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir.

Keberadaan BUMDes tidak dapat disamakan dengan badan usaha lain seperti PT, CV ataupun koperasi, tetapi sebagai badan usaha yang berfungsi membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa melalui pelayanan jasa, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya (Suharyanto & Hastowiyono, 2014). Walaupun diakui, bahwa pengembangan kelembagaan BUMDes sebagai basis ekonomi warga desa masih mengalami banyak kendala, seperti: (1) adanya ketidakpahaman tentang BUMDes; (2) adanya pemilihan unit usaha yang tidak tepat; (3) sulitnya pembentukan kepengurusan; (4) sulitnya kelembagaan BUMDes; (5) adanya pengelolaan yang belum profesional; (6) adanya keterlibatan para pemangku kepentingan; (7) lemahnya regulasi; dan (8) kurangnya dukungan pemerintah desa dan supra desa.

Berkenaan dengan berbagai kendala tersebut, ada beberapa tahapan penting yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Desa dan warga masyarakat untuk mengembangkan BUMDes, terutama dalam mewujudkan pelaksanaan *ecotourism*, yakni: (1) perlunya sosialisasi tentang BUMDes; (2) perlunya menyusun struktur BUMDes dan *job description*-nya; (3) perlunya memilih pengelola yang berasal dari masyarakat

setempat dan mampu menjalankan usaha; (4) perlunya menentukan jenis usaha, dan pembentukan unit usahanya; (5) perlunya menyusun pedoman kerja BUMDes; (6) perlunya menyusun bentuk dan aturan kerjasama dengan pihak lain; (7) perlunya menyusun rencana usaha; (8) perlunya melakukan sosialisasi keberadaan BUMDes; (8) perlunya menjalankan usaha BUMDes, dan (9) perlunya melakukan monitoring dan evaluasi.

Kelembagaan BUMDes dapat berperan dalam mendorong, dan menginisiasi agenda-agenda usaha bagi pelaksanaan *ecotourism*. Lembaga ini juga dapat berperan dalam menata potensi dan aset desa, khususnya tanah kas desa. Sebagaimana diketahui, tanah kas desa dapat didisain untuk menjadi pusat-pusat kegiatan dalam rangka *ecotourism* dan dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Agar BUMDes dapat berperan optimal dalam menggerakkan perekonomian warga masyarakat untuk mendukung terwujudnya *ecotourism* di lereng Merapi, maka pengelolaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip, sebagai berikut: (1) kooperatif, ketika semua komponen yang terlibat dalam BUMDes mengutamakan kerjasama dalam pengembangan usaha; (2) partisipatif, ketika semua komponen yang terlibat bersedia untuk berkontribusi dan memberikan dukungan bagi kemajuan dan keberlanjutan usaha; (3) emansipatif, ketika semua komponen yang terlibat diperlakukan sama tanpa kecuali; (4) transparan, ketika hal-hal yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat diketahui oleh masyarakat secara terbuka; (5) akuntabel,

ketika pengelolaan BUMDes dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan (6) *sustainable*, ketika kegiatan usaha BUMDes dilakukan secara berkelanjutan (Suharyanto & Hastowiyono, 2014):

Oleh karena itu, pengembangan BUMDes sebagai lembaga usaha desa dalam mendukung pelaksanaan *ecotourism* yang dilakukan oleh pemerintah desa, perlu mendapatkan dukungan dan kerja keras dari semua pemangku kepentingan. Sebagai gerakan ekonomi masyarakat yang baru, dukungan dari pemerintah yang berupa kebijakan, modal (finansial), pendampingan, dan perlindungan dalam menjalankan usaha sangatlah diperlukan.

C. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya

Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada pada kawasan pengembangan *ecotourism* lereng Merapi perlu dilakukan secara bersama-sama, baik oleh warga masyarakat, kelembagaan masyarakat maupun oleh BUMDes dan Pemerintah Desa. Dalam hal ini sumberdaya yang ada dibedakan menjadi sumberdaya alam, ekonomi, sosial dan budaya. Secara sepiantas pemanfaatan sumberdaya dapat diuraikan, sebagai berikut: **Pertama**, pemanfaatan sumberdaya alam, terutama kondisi alam di Lereng Merapi, yang dioptimalisasi dengan menggunakan strategi pengembangan berbasis kesadaran masyarakat. Erupsi Gunung Merapi tahun 2010 yang selama ini dipandang sebagai bencana, secara evolutif maknanya digeser menjadi “berkah”. Adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, ketika generasi saat ini dapat mempertahankan hidupnya dan

bangkit membangun masa depan. Pengungsian dan evakuasi merupakan proses biasa, yang merupakan konsekuensi logis saat terjadi erupsi Gunung Merapi.

Oleh karena itu, kesiapan mengatasi dampak erupsi Gunung Merapi menjadi “*trademark*” masyarakat di Lereng Merapi. Kesiapan ini juga mendorong masyarakat untuk memberdayakan dirinya sendiri, sehingga mereka mampu memanfaatkan seluruh potensi dan kondisi alam yang ada di sekitarnya. Berbekal semangat kemandirian yang dimilikinya, masyarakat di Lereng Merapi merancang berbagai kegiatan yang dapat mengoptimalkan manfaat kondisi alam di wilayahnya.

Secara dinamis, progresif, dan berkelanjutan masyarakat membangun pertanian yang lebih baik, usaha (business) yang lebih baik, dan akhirnya hidup yang lebih baik. Teknik produksi (pemanfaatan kondisi alam) dan pemasaran diadopsi oleh masyarakat agar kondisi alam dapat semakin lestari, semakin menarik, dan semakin menghasilkan pendapatan yang tinggi. Perilaku masyarakat lambat laun juga berubah semakin relevan dengan optimalisasi pemanfaatan kondisi alam, misalnya dengan meningkatkan kemampuan dalam mengakses informasi penting yang relevan.

Strategi pengembangan bagi optimalisasi pemanfaatan kondisi alam, yang telah dilakukan oleh masyarakat, antara lain: (1) masyarakat Dusun Pangukrejo, yang wilayahnya berada di lereng tengah bagian atas dari Gunung Merapi, memiliki strategi berupa penanaman berbagai tumbuhan, seperti: klengkeng. Strategi ini relevan, karena kondisi alam di

wilayah ini membutuhkan tutupan permukaan tanah, untuk mencegah terjadinya longsor;

(2) masyarakat Dusun Pelemsari, yang wilayahnya di antara dua sungai, memiliki strategi berupa pengembangan kebun campuran, baik yang alami (tumbuh dengan sendirinya) maupun yang dibudidayakan (ditanami tanaman tertentu oleh masyarakat). Kebun campuran ini berisi beberapa tanaman, seperti: sengan, bambu, rumput kalanjana, nangka, melinjo, pisang, dan papaya. Strategi ini relevan, karena kondisi alam di wilayah ini membutuhkan upaya yang mampu menjaga kualitas sungai;

(3) masyarakat Dusun Petung, yang berada di salah satu wilayah perdesaan di Lereng Merapi, memiliki strategi berupa pelestarian dan pengembangan hutan yang dipadukan dengan penanaman tanaman-tanaman lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti: sengan, mindi, mahoni, akasia, cengkeh, pisang, sayuran, ketela, tales, dan kopi. Strategi ini relevan, karena kondisi alam di wilayah ini membutuhkan upaya yang mampu melestarikan karakter perdesaan, yang dipenuhi berbagai tanaman;

(4) masyarakat Dusun Kaliadem, yang wilayahnya memiliki udara yang dingin atau sejuk sejak dahulu, memiliki strategi berupa pelestarian dan pengembangan hutan, khususnya hutan rakyat, untuk memulihkan kondisi air tanah. Strategi ini relevan, karena kondisi alam di wilayah ini membutuhkan tutupan permukaan tanah yang berupa hutan;

(5) masyarakat Dusun Jambu, yang wilayahnya sejak lama dikenal dengan agrowisata khas Lereng Merapi, khususnya

tanaman Jambu, memiliki strategi pengembangan dan perluasan pohon jambu yang menjadi “tanda” eksistensi dusun ini. Strategi ini relevan, karena kondisi alam di wilayah ini membutuhkan tutupan permukaan tanah, yang berupa berbagai tanaman, antara lain jambu;

(6) masyarakat Dusun Kopeng, yang wilayahnya relatif subur, memiliki strategi mengembangkan pertanian di wilayahnya, yang terutama didukung oleh keberadaan 58 kepala keluarga di areal pertanian. Strategi ini relevan, karena kondisi alam di wilayah ini membutuhkan tutupan permukaan tanah, yang berupa berbagai tanaman;

Oleh karena adanya kegiatan kehutanan, pertanian, dan peternakan di Lereng Merapi, maka terbuka peluang bagi pengembangan agroforest, yang penerapannya dapat berupa agrisilvikultur, agrosilvopastura, dan silvopastura. Kurnianto (2008:161) mengungkapkan, bahwa: (a) Agrisilvikultur, adalah kombinasi antara elemen kehutanan dengan elemen pertanian. (b) Agrosilvopastura, adalah kombinasi antara elemen pertanian dengan elemen kehutanan dan peternakan. (c) Silvopastura, adalah kombinasi antara elemen kehutanan dengan peternakan

Optimalisasi pemanfaatan kondisi alam dan sekaligus pelestariannya oleh masyarakat, akan menjadikan kegiatan di Lereng Merapi menjadi berkelanjutan. Begitu pula jika yang dikelola adalah kegiatan wisata di Lereng Merapi, maka kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan wisata berkelanjutan, yang memiliki karakteristik dapat memenuhi kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang,

serta tidak merusak alam dan budaya masyarakat setempat. Pariwisata berkelanjutan pada prinsipnya merupakan kegiatan pariwisata yang aktivitasnya tetap memperhatikan keseimbangan alam, lingkungan, budaya, dan ekonomi. Penyelenggaraannya haruslah dapat memberikan keuntungan secara ekonomi bagi seluruh pihak, yaitu masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (UNESCO, 2009:14).

Ketika optimalisasi pemanfaatan kondisi alam Lereng Merapi akan dilaksanakan, maka beberapa kabupaten yang berbatasan perlu melakukan koordinasi. Sutaryono (2007:91) pernah mengingatkan, bahwa kerjasama antar pemerintah kabupaten yang wilayahnya saling berbatasan sangat diperlukan, agar tidak terjadi NIMBY (*Not In My Back Yard*) syndrome. Gejala NIMBY syndrome oleh Yunus (dalam Sutaryono, 2007:91) dimaknai, sebagai suatu gejala munculnya dampak negatif pada wilayah (terhadap lingkungan biotik, abiotik, sosial, kultural, ekonomi, dan politik), akibat proses dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh wilayah lain.

Kedua, optimalisasi sumberdaya ekonomi, yang dilakukan dengan strategi pengembangan berbasis keberdayaan, untuk menysasar kemiskinan, melalui berbagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, strategi ini juga dikenali sebagai upaya pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*). Untuk itu perlu dilakukan strategi yang secara keseluruhan disebut Strategi Trisula (*Three-pronged Strategy*), yang terdiri dari: (1) menggalakkan peluang (*promoting*

opportunity), (2) memfasilitasi pemberdayaan (*facilitating empowerment*), dan (3) meningkatkan jaminan sosial (*enhancing security*).

Berbasis keberdayaan yang diikhtiarkan masyarakat di Lereng Merapi, maka strategi yang diterapkan juga meliputi proses memberikan daya (*empowerment*) atau kekuatan (*strengthening*) kepada masyarakat itu sendiri. Dengan proses ini akan dapat diperoleh kemampuan masyarakat dalam membangun dan memperbaiki kondisi ekonominya. Untuk itu kesehatan secara fisik dan mental merupakan prasyarat utama, selain prasyarat pendidikan dan nilai-nilai intrinsik yang menjadi sumber keberdayaan, seperti sifat-sifat: (1) kekeluargaan, (2) kegotong-royongan, dan (3) keragaman atau kebhinekaan.

Strategi pengembangan berbasis keberdayaan masyarakat di Lereng Merapi, memungkinkan mereka mampu bertahan (*survive*) dan mampu mengembangkan diri untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, masyarakat harus berupaya terus menerus meningkatkan harkat dan martabatnya, agar mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Konsekuensinya, anggota masyarakat yang tergolong miskin tidak boleh ditinggalkan dalam segenap proses menuju keberdayaan dan kemandirian. Golongan ini justru harus didorong untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan proses secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Sesungguhnya bagi seluruh masyarakat Lereng Merapi (baik golongan miskin maupun tidak miskin) perlu diperhatikan strategi *livelihood* yang mereka pilih, yang berupa

strategi *on-farm*, *off-farm*, dan *non-farm*. Aristiono Nugroho, dkk. (2011:10) menyatakan, bahwa: (1) strategi *on-farm*, yaitu strategi *livelihood* yang berbasis pada berbagai aktivitas di tanah pertanian; (2) strategi *off-farm*, yaitu strategi *livelihood* yang berbasis pada berbagai aktivitas di luar tanah pertanian, namun masih berkaitan dengan pertanian; (3) strategi *non-farm*, yaitu strategi *livelihood* yang berbasis pada berbagai aktivitas yang tidak berkaitan dengan pertanian.

Berbekal pilihan strategi *livelihood*-nya, masyarakat Lereng Merapi melakukan segenap ikhtiar, dengan bertumpu pada pengembangan keberdayaan. Walaupun untuk itu segenap ikhtiar harus berada pada jalur yang selalu memberi kesempatan dan kemampuan kepada anggota masyarakat yang tergolong miskin, agar mereka mampu dan berani bersuara (*voice*), serta mampu dan berani memilih (*choice*) beberapa alternatif solusi. Untuk itu, masyarakat di Lereng Merapi perlu melakukan proses terencana guna meningkatkan kemanfaatan kondisi ekonominya. Hal ini didasarkan pada pemahaman, bahwa kondisi tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan dalam pemanfaatan, sehingga membutuhkan optimalisasi pemanfaatan.

Strategi pengembangan bagi optimalisasi sumberdaya ekonomi, yang telah dilakukan oleh masyarakat, antara lain: (1) masyarakat Dusun Pangukrejo, yang berkarakter responsif, memiliki strategi berupa pengembangan ternak sapi perah, dan aktivitas wisata (*Volcano Tour* atau *Lava Tour*) dengan menyewakan jeep wisata. Sebagaimana diketahui strategi ini relevan, karena memiliki potensi pendapatan yang relatif

tinggi, sehingga dapat berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;

(2) masyarakat Dusun Pelemsari, yang berkarakter optimal dalam memanfaatkan potensi, memiliki strategi berupa pemanfaatan tanah-tanah yang berada di tepi jalan untuk kegiatan ekonomi, seperti: warung makanan dan minuman, untuk melayani wisatawan yang mengikuti *Vulcano Tour* atau *Lava Tour*. Strategi ini masih dilengkapi dengan pertanian dan peternakan yang terus dikembangkan oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui strategi ini relevan, karena para wisatawan membutuhkan makanan dan minuman saat berkunjung ke Dusun Pelemsari, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat;

(3) masyarakat Dusun Petung, yang berkarakter fokus pada upaya pemanfaatan potensi, memiliki strategi berupa pengembangan dan peningkatan citra, aroma dan rasa kopi yang khas Lereng Merapi. Strategi ini masih dilengkapi dengan pengembangan makanan dan masakan, yang dibuat dari umbi-umbian, seperti: *criping enthik*. Sebagaimana diketahui strategi ini relevan, karena saat ini ada kecenderungan para wisatawan tertarik pada makanan tradisional (umbi-umbian);

(4) masyarakat Dusun Kaliadem, yang berkarakter variatif membangun usaha, memiliki strategi berupa pengembangan empat sektor utama, yang meliputi sektor peternakan, sektor pertanian-hutan, sektor galian C, dan sektor wisata. Keberadaan sektor-sektor ini sesungguhnya dapat dipandang sebagai strategi yang lengkap, karena dengan menggunakan perspektif *livelihood* terlihat adanya *livelihood* yang bersifat *on-farm*, *off-*

farm, dan *non-farm*. Selain relevan, strategi yang dijalankan ini juga menarik, karena para wisatawan dapat melihat dan belajar tentang strategi yang lengkap dalam perspektif *livelihood*;

(5) masyarakat Dusun Jambu, yang berkarakter energik dalam berusaha, memiliki strategi berupa pengembangan galian C dan peternakan. Strategi ini dipilih untuk mengimbangi semangat masyarakat dalam menanam pohon jambu, sehingga peternakan dan galian C tidak terabaikan. Sebagaimana diketahui strategi yang dipilih ini relevan, karena peternakan memiliki potensi untuk dikembangkan, sedangkan galian C harus masuk dalam strategi agar dapat dikelola secara baik dan berkelanjutan.

(6) masyarakat Dusun Kopeng, yang berkarakter adaptif memanfaatkan potensi, memiliki strategi pengembangan pertanian. Strategi ini dipilih, karena masyarakat memiliki kemampuan bertani cukup baik, dan kondisi alam di dusun ini memungkinkan untuk itu. Sebagaimana diketahui strategi ini juga relevan, karena banyak wilayah yang telah kehilangan potensi pertaniannya, sehingga kompetitor di sektor ini cenderung menurun. Akibatnya, terbuka peluang pasar yang relatif luas bagi produk pertanian dari dusun ini.

Berbagai strategi yang telah ditetapkan atau dipilih ini, telah memperlihatkan semangat *ecotourism* dari dusun-dusun di Lereng Merapi, yang berpartisipasi dalam konsolidasi tanah. S.P. Hadi (2007) menjelaskan, bahwa prinsip-prinsip *ecotourism* adalah meminimalisir dampak, menumbuhkan kesadaran lingkungan dan budaya, memberi pengalaman positif pada wisatawan (*visitors*) maupun penerima

(*hosts*), serta memberikan manfaat dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka strategi pengembangan bagi optimalisasi pemanfaatan kondisi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di Lereng Merapi relevan dengan peluang *ecotourism*. Optimalisasi ini berpeluang: (1) Meminimalisir dampak, karena peningkatan pendapatan disertai dengan upaya pelestarian lingkungan dan budaya. (2) Menumbuhkan kesadaran lingkungan dan budaya, karena lingkungan dan budaya merupakan “barang dagangan” yang harus dijaga kelestariannya. (3) Memberi pengalaman positif pada wisatawan maupun penerima, karena interaksi keduanya dalam frame pelestarian lingkungan dan budaya. (4) Memberikan manfaat dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal, karena aktor utama dalam *ecotourism* adalah masyarakat lokal atau masyarakat setempat.



Gb. 52. Kandang sapi perah masyarakat Dusun Pelemsari di Huntap Karang Kendal yang akan diperluas.



GB. 53. Kotoran sapi di dekat kandang sapi perah masyarakat Dusun Pelemsari di Huntap Karang Kendal yang akan diperluas pemasarannya

Sumber: Dokumen PPPM-STPN, 2014

Peluang optimalisasi kondisi ekonomi yang menerapkan prinsip *ecotourism*, sebagaimana yang dijelaskan oleh S.P. Hadi, akhirnya bermuara pada pilihan strategi *livelihood* masyarakat. Apapun pilihan strategi *livelihood*-nya selalu ada potensi kendala di dalamnya, tetapi masyarakat tetap berkesempatan untuk mengatasinya. Nugroho, dkk. (2011:163) menyatakan, bahwa: (1) strategi *on-farm* masyarakat desa terkendala oleh luas tanah yang terbatas dan ketidak-pastian penggarapan tanah, (2) strategi *off-farm* masyarakat desa terkendala oleh daya beli petani dan masyarakat yang relatif rendah, dan (3) strategi *non-farm* masyarakat desa terkendala oleh permodalan yang tidak memadai.

Ketiga, pemanfaatan sumberdaya sosial, yang dilakukan dengan strategi pengembangan berbasis fasilitasi. Strategi ini menitikberatkan upaya pengembangannya pada penyediaan ruang gerak yang lebih luas bagi segenap elemen di masyarakat, terutama dalam turut serta mengambil keputusan penting, dan mengawasi pelaksanaan optimalisasi manfaat kondisi alam, kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi budaya di Lereng Merapi. Ruang gerak ini membuka kesempatan bagi optimalisasi manfaat kondisi sosial di Lereng Merapi, karena relevan dengan sifat tanggungjawab (*accountability*) yang dipahami masyarakat. Sifat tanggung-gugat yang terdapat pada optimalisasi pemanfaatan kondisi sosial Lereng Merapi, pada akhirnya memberi kesempatan kepada anggota masyarakat yang tergolong miskin untuk melakukan kontrol.

Sesungguhnya upaya kontrol diperlukan agar optimalisasi pemanfaatan kondisi sosial Lereng Merapi mampu menguatkan masyarakat (*strengthening community*) dalam menghadapi dinamika kehidupannya. Oleh karena itu, tidak boleh terbersit sedikitpun keinginan untuk secara *instant* memperbaiki kondisi sosial, karena yang paling memungkinkan adalah perubahan secara bertahap kondisi sosial yang ada menuju ke arah yang lebih baik. Meskipun tetap harus diakui, bahwa perubahan evolutif kondisi sosial seringkali memiliki kendala berupa lemahnya komitmen *stakeholders*. Kendala ini berpotensi memunculkan kesulitan berikutnya, yaitu rendahnya kepedulian terhadap fenomena kemiskinan dan keterbelakangan.

Kepedulian masyarakat terhadap fenomena kemiskinan dan keterbelakangan perlu ditingkatkan dengan mendorong masyarakat untuk bersinergi-sosial memanfaatkan sumberdaya. Janvry dan Sadoulet (dalam Bernstein, 2008:90) menjelaskan, bahwa: (1) ketika hak pemanfaatan sumberdaya hanya dibatasi kepada sekelompok pengguna tertentu; (2) atas sekumpulan sumberdaya tertentu lewat pengakuan informal hak komunitas atau lewat penamaan komunitas formal; (3) maka pengelolaan rasional sumberdaya milik bersama (*common property resources*) menjadi bisa dilakukan; dan (4) jika kerjasama di antara anggota komunitas bisa dicapai.

Sumberdaya milik bersama yang nampak di Lereng Merapi meliputi: kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya, yang membutuhkan sinergi-sosial agar bermanfaat optimal. Sudah saatnya cara pandang masyarakat yang meremehkan kondisi alam, ekonomi, sosial dan budaya di Lereng Merapi diubah, dengan menggunakan kultur yang tidak mudah menyerah, sehingga siap melakukan optimalisasi pemanfaatan. Pemahaman yang utuh tentang pentingnya optimalisasi, memberi kesempatan bagi hadirnya program yang terkait dengan perbaikan ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) atau penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*), yang muaranya berupa peningkatan pendapatan (*income generating*).

Salah satu hal konkret yang terkait dengan strategi pengembangan bagi perbaikan kondisi sosial di Lereng Merapi yang mampu mengoptimalisasi kondisi alam, ekonomi dan budaya, berupa inventarisasi pemikiran, sikap, tindakan,

dan perilaku masyarakat. Upaya ini diperlukan, karena bersingungan dengan kemampuan masyarakat memanfaatkan kondisi Lereng Merapi. Kemampuan yang antara lain meliputi kewirausahaan dan keterampilan manajerial-sederhana, berguna untuk melakukan penyesuaian antara pengelolaan komersial dengan kondisi Lereng Merapi.

Selain itu, ketenaga-kerjaan juga merupakan hal penting bagi masyarakat di Lereng Merapi, karena berkaitan dengan upaya optimalisasi pemanfaatan kondisi sosial. Untuk itu perlu diperhatikan pendapat GKI tentang ketenaga-kerjaan. GKI (Griffin, Khan, and Ickowitz) merupakan sebutan untuk tiga orang tokoh agraria internasional, yaitu: (1) Keith Griffin; (2) Azizur Rahman Khan; dan (3) Amy Ickowitz. GKI (dalam Bernstein, 2008:337) menyatakan, bahwa dilihat dari perspektif pemilik tanah, tenaga kerja seringkali langka. Hal ini menimbulkan sistem kontrol tenaga kerja yang kompleks. Konsentrasi kepemilikan tanah adalah bagian penting dari sistem kontrol tenaga kerja, tetapi ini hanya salah satu komponen saja, dan dalam beberapa kasus bukanlah komponen yang penting.

Ketenaga-kerjaan yang sering langka di bidang pertanian sebagaimana diungkapkan oleh GKI tidak terjadi di Lereng Merapi, karena di wilayah ini tenaga kerja masih mencukupi. Tetapi penjelasan GKI perlu mendapat perhatian, sebab ketika sebagian tenaga kerja pertanian “ditarik” ke sektor pariwisata, maka yang dikhawatirkan GKI berpeluang terjadi. Namun demikian sektor pariwisata, yang dalam hal ini *ecotourism*, tetap layak dikembangkan, karena penurunan jumlah tenaga kerja pertanian dapat dicarikan solusi,

seperti: membuka peluang bagi tenaga kerja dari wilayah di sekitar Lereng Merapi. Dengan demikian *ecotourism* dapat dikembangkan seiring kemajuan pertanian, dan berbarengan dengan kesiapan masyarakat mengelola Lereng Merapi secara komersial-ekologis.

Ketika masyarakat melakukan penyesuaian antara pengelolaan komersial dengan kondisi Lereng Merapi, maka aspek wisata mendapat perhatian khusus, terutama untuk memberi kesan baik pada para wisatawan. Masyarakat Lereng Merapi saat melaksanakan tradisi sosial dan ikhtiar komersial, wajib memperhatikan hal-hal yang dapat membuat wisatawan betah dan ingin terus kembali berwisata di Lereng Merapi, yang meliputi: (1) Berupaya memberi pelayanan yang baik kepada wisatawan, berupa kesan sopan dan etis dalam pelayanan; (2) Menjaga keindahan serta kelestarian alam dan budaya sebagai aset wisata (UNESCO, 2009:10).

Berbekal segenap kemampuannya, maka strategi pemanfaatan sumberdaya sosial, yang telah dilakukan oleh masyarakat, antara lain: (1) masyarakat Dusun Pangukrejo, yang berkarakter tradisional siaga bencana, memiliki strategi berupa pengembangan kemampuan evakuasi masyarakat secara mandiri bila terjadi bencana erupsi Gunung Merapi. Strategi ini relevan, karena kemampuan evakuasi sangat diperlukan bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Selain relevan, strategi ini memiliki prospek jangka panjang berupa kesiapan menghadapi bencana, dan kegiatannya juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi salah satu objek wisata;

(2) masyarakat Dusun Pelemsari, yang berkarakter tradisional perdesaan, memiliki strategi berupa pengembangan kelestarian alam perdesaan, karena lebih menyenangkan dan lebih nyaman dalam membangun interaksi sosial. Strategi ini relevan, karena saat ini ada kecenderungan perubahan desa menjadi “kota” di banyak wilayah atau daerah, sehingga strategi ini tepat, sebab jumlah kompetitornya relatif kecil. Ketika suasana perdesaan berhasil dikembangkan, maka kondisi alamnya menjadi lebih asri dan nyaman, dan kondisi ekonomi masyarakat pun dapat meningkat;

(3) masyarakat Dusun Petung, yang berkarakter tradisional aktif, memiliki strategi berupa aktivasi segenap elemen masyarakat dalam memperbaiki mutu hidup secara bersama. Strategi ini relevan, karena aktivasi elemen masyarakat akan menghasilkan partisipasi. Sementara itu dalam dinamika sosial pada saat ini, partisipasi merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu kegiatan. Bila kegiatan *ecotourism* ingin berjalan lancar, maka tidak ada pilihan lain selain mendorong hadirnya partisipasi masyarakat setempat (Lereng Merapi);

(4) masyarakat Dusun Kaliadem, yang memiliki karakter tradisional religius, memiliki strategi berupa penguatan interaksi dengan Tuhan Yang Maha Esa, melalui beberapa ritual yang diyakininya. Strategi ini relevan, karena sesuai dengan keyakinan yang ada di masyarakat. Selain itu, keyakinan ini juga menarik bagi para wisatawan, terutama ketika keyakinan itu diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang dapat dilihat, didengar, dan disaksikan. Daya tarik inilah yang membentuk relevansi strategi ini dengan kepentingan masyarakat di masa

kini dan di masa mendatang (prospektif);

(5) masyarakat Dusun Jambu, yang memiliki karakter tradisional dinamis, memiliki strategi berupa pengembangan sikap siap menghadapi berbagai perubahan yang terkait dengan dinamika Gunung Merapi. Strategi ini relevan, karena situasi serta kondisi alam, ekonomi, dan sosial di Lereng Merapi berubah-ubah, sehingga membutuhkan respon yang memadai pada setiap perubahannya. Selain relevan, strategi ini juga akan menghasilkan kegiatan yang berbeda-beda, yang menarik untuk disajikan (dijelaskan) kepada para wisatawan;

(6) masyarakat Dusun Kopeng, yang memiliki karakter tradisional sederhana, memiliki strategi berupa mempertahankan gaya hidup sederhana yang selama ini menjadi pilihan sosialnya. Strategi ini relevan, karena sesuai dengan style (gaya hidup) masyarakat setempat. Selain relevan, strategi yang akan menghasilkan kegiatan atau tampilan tertentu (dalam nuansa kesederhanaan) ini, layak dipromosikan sebagai salah satu objek wisata, sebab saat ini kesederhanaan merupakan hal menarik bagi para wisatawan.

Strategi pengembangan bagi optimalisasi pemanfaatan kondisi sosial, yang telah dilakukan oleh masyarakat tidaklah berdiri sendiri, karena strategi ini dijalankan seraya memperhatikan strategi pengembangan bagi optimalisasi pemanfaatan kondisi alam, ekonomi, dan budaya. Landasan pikirnya adalah etika lingkungan, yang meskipun tidak diutarakan secara verbal oleh masyarakat, tetapi “dilisankan” dengan perbuatan atau tindakan. A.S. Keraf (2001) mengungkapkan, bahwa ada sembilan prinsip dalam etika

lingkungan, yaitu: (1) hormat terhadap alam, atau *respect for nature*; (2) bertanggungjawab pada alam, atau *responsibility for natur*; (3) memiliki solidaritas kosmis; (4) peduli kepada alam, atau *caring for natur*; (5) tidak merugikan, atau *no harm*; (6) hidup selaras dengan alam, atau *living harmony with natur*; (7) menghargai keadilan; (8) menghormati demokrasi; (9) menjunjung tinggi integritas.

Etika lingkungan yang menjadi unsur penting dalam *ecotourism* yang memanfaatkan kondisi sosial Lereng Merapi, wajib memperhatikan lapisan sosial yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Hal ini penting, karena pada akhirnya setiap lapisan sosial di masyarakat desa membutuhkan penanganan dan pemberdayaan yang berbeda. Wiradi dan Makali (dalam Wiradi, 2009:111-112) membagi masyarakat desa dalam empat lapisan, sebagai berikut: **Lapisan-1**, terdiri dari penduduk yang memiliki rumah, tanah pekarangan, dan tanah sawah. **Lapisan-2**, terdiri dari penduduk, yang memiliki rumah, dan tanah pekarangan, tetapi tidak memiliki tanah sawah. **Lapisan-3**, terdiri dari penduduk yang hanya memiliki rumah, tetapi rumah mereka didirikan di atas tanah pekarangan orang lain. **Lapisan-4**, terdiri dari penduduk yang tidak memiliki rumah, serta tidak memiliki tanah pekarangan dan tanah sawah.

Lapisan-lapisan sosial di masyarakat desa sebagaimana yang diutarakan oleh Wiradi dan Makali, semakin menunjukkan bahwa optimalisasi kondisi sosial tidak dapat berdiri sendiri. Optimalisasi kondisi sosial membutuhkan harmoni dengan optimalisasi kondisi alam, lapisan-lapisan

sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan kondisi alam, khususnya dengan tanah (pekarangan dan sawah). Pemberdayaan terhadap lapisan sosial yang ada di masyarakat, perlu memperhatikan kondisi penguasaan dan pemilikan tanahnya.

Keempat, optimalisasi sumberdaya budaya, yang dilakukan dengan strategi berupa peningkatan kualitas budaya, baik dalam arti semakin dekat dengan akar tradisinya, maupun dalam arti semakin banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Strategi ini bersumber pada kesiapan masyarakat meningkatkan kualitas pemahamannya atas budaya setempat, dan keterkaitan budaya tersebut dengan suasana hidup kekinian. Suasana hidup kekinian yang dikerangkai dalam budaya lokal (Lereng Merapi) berpeluang meningkatkan kemampuan masyarakat secara kolektif, dan sekaligus membuka peluang membangun jejaring dan kemitraan dengan pihak lain.

Dengan demikian budaya lokal juga lekat dengan kemampuan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Kemampuan ini berpeluang dimiliki, karena sesungguhnya budaya lokal memiliki substansi yang identik dengan etos, semangat, dan motivasi kerja yang tinggi. Nugroho, dkk. (2013:105) menyatakan, bahwa seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan hidup lebih sejahtera, sebagian masyarakat desa meninggalkan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang dogmatik, irasional, dan konsumtif; menjadi lebih rasional, memiliki etos kerja yang tinggi, disiplin terhadap waktu, hemat, kompetitif, bekerja

keras, produktif, mandiri, dan kreatif; yang dikenal dengan sebutan “modern” dalam artian yang positif.

Sudah selayaknya masyarakat Lereng Merapi membangun etos, semangat, dan motivasi kerja dalam frame budaya lokal. Hal ini dikarenakan budaya lokal bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang dinamis, yang mampu merespon dinamika kekinian. Pengetahuan tentang peluang dan efektivitas kerja menjadi ciri budaya lokal, yang dibangun melalui aksesibilitas informasi. Efektivitas kerja juga “memaksa” budaya lokal memiliki unsur akuntabilitas dalam versinya sendiri. Situasi ini juga mendorong suatu kegiatan agar mampu memanfaatkan kondisi alam, sosial, dan ekonomi secara terbuka terhadap publik, terutama ketika memperlihatkan aspek efisiensi dan transparansi. Budaya lokal yang didukung oleh masyarakat lokal, pada gilirannya membutuhkan kemampuan masyarakat dalam mengorganisir diri, memobilisir sumberdaya, bekerja sama, dan menyelesaikan berbagai masalah lokal secara budaya.

Ketika masyarakat berhasil membangun organisasi lokal, dan mengaktifkannya untuk menyelesaikan beberapa masalah lokal, maka saat itulah terwujud keberdayaan dan kemandirian. Dengan kata lain, keberdayaan dan kemandirian masyarakat Lereng Merapi dapat diwujudkan melalui budaya lokal yang mampu mengakomodir aksesibilitas informasi, partisipasi, akuntabilitas, dan organisasi lokal. Nugroho, dkk. (2013: 187) menjelaskan bahwa masyarakat desa memiliki konsep *guyub*, yang secara kasat mata nampak pada interaksi sosial; sedangkan yang tidak kasat mata nampak pada

semangat solidaritas. Bagi masyarakat desa konsep guyub merupakan sesuatu yang penting dan dapat bertahan lama, karena konsep ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Keberpihakan kepada masyarakat Lereng Merapi juga menjadi inti konsepsi budaya lokal, yang dibangun melalui pendelegasian wewenang yang lebih luas pada masyarakat Lereng Merapi, untuk mengelola kegiatan yang sesuai kapasitasnya. Kewenangan yang dimiliki juga mendorong masyarakat, untuk fokus pada budaya lokal yang memperhatikan optimalisasi pemanfaatan kondisi alam, ekonomi, dan sosial. Semangat untuk fokus pada budaya lokal yang banyak diminati masyarakat Lereng Merapi, mendesak mereka untuk berpartisipasi dalam berbagi peran mempertahankan tradisi yang telah ada. Dengan demikian masyarakat selalu ikutserta dalam suatu kegiatan budaya lokal, dan mengambil manfaat dari kegiatan tersebut.

Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan budaya lokal, baik yang terkait dengan profesinya maupun yang tidak terkait dengan profesinya menunjukkan, bahwa telah terjadinya interaksi antar anggota masyarakat di Lereng Merapi. Oleh karena itu, diperlukan stimulus yang kuat dalam berbagai format perubahan, termasuk *exogenous change* di Lereng Merapi. Hal ini penting agar keikutsertaan atau partisipasi menjadi budaya lokal tersendiri bagi masyarakat di Lereng Merapi.

Budaya lokal tetap harus dipertahankan, sehebat apapun *ecotourism* digerakkan, dijalankan, dan dilaksanakan di Lereng Merapi. *Ecotourism* di Lereng Merapi harus

tetap memperhatikan: Pertama, nilai-nilai adat istiadat, norma, dan agama yang berlaku di Lereng Merapi. Kedua, kelestarian budaya dan lingkungan di Lereng Merapi. Ketiga, keberlanjutan kegiatan usaha pariwisata sehingga dapat meningkatkan perekonomian (UNESCO, 2009:13)

Berbekal segenap kemampuannya, maka strategi optimalisasi sumberdaya budaya, yang telah dilakukan oleh masyarakat, antara lain: (1) masyarakat Dusun Pangukrejo, yang berkarakter pelestari kearifan spiritual, memiliki strategi pengembangan berupa upaya mempertahankan ritual “labuhan” yang tempat pemberhentiannya terletak di Dusun Pangukrejo. Strategi ini relevan, karena sesuai dengan keyakinan masyarakat setempat, sehingga berpotensi untuk dilestarikan dari generasi ke generasi;

(2) masyarakat Dusun Pelemsari, yang berkarakter pelestari kearifan historikal, memiliki strategi pengembangan berupa pelestarian situs-situs bersejarah, seperti petilasan Mbah Maridjan yang merupakan tempat Mbah Maridjan hidup sampai meninggal dunia, dan Joglo Hargo Merapi yang merupakan tempat diberangkatkannya “ritual labuhan”. Strategi ini relevan, karena memiliki koneksi dengan strategi Dusun Pangukrejo yang ingin melestarikan ritual labuhan, sedangkan tempat pemberangkatan ritual labuhan berada di dusun ini (Dusun Pelemsari);

(3) masyarakat Dusun Petung, yang berkarakter pelestari kearifan ekologis, memiliki strategi pengembangan berupa pelestarian tradisi “Dandan Kali” pada setiap Jum’at Kliwon pada Bulan Ruwah Tahun Hijriah. Strategi ini relevan, karena

berkaitan dengan kepentingan ekologis masyarakat setempat. Selain relevan, strategi ini juga prospektif, sebab lingkungan yang bersih dan terawat, serta proses perawatannya dapat dijadikan sebagai salah satu obyek wisata dalam bingkai *ecotourism*.

(4) masyarakat Dusun Kaliadem, yang berkarakter pelestari kearifan kultural, memiliki strategi pengembangan berupa pelestarian seni karawitan. Strategi ini relevan, karena seni karawitan saat ini kurang digemari generasi muda. Perhatian yang tinggi atas seni karawitan akan dapat “memaksa” generasi muda untuk menekuni kembali seni ini. Ketika seni karawitan dikemas dan dikelola dengan baik, melalui paduan tradisi dan modernitas, maka ia berpotensi menjadi salah satu objek wisata yang menarik.

(5) masyarakat Dusun Jambu, yang berkarakter pelestari kearifan spiritual, memiliki strategi pengembangan berupa pelestarian tradisi “Merti Dusun”, yang dilaksanakan pada Bulan Maulud. Strategi ini relevan, karena berkaitan dengan upaya menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban dusun. Selain relevan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban dusun juga memiliki potensi untuk dipromosikan kepada para wisatawan. Kebersihan, keindahan, dan ketertiban dalam kemas kota telah banyak ditawarkan wilayah lain kepada para wisatawan, sehingga kebersihan, keindahan, dan ketertiban dalam kemas dusun (desa) memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.

(6) masyarakat Dusun Kopeng, yang berkarakter pelestari kearifan kultural, memiliki strategi pengembangan berupa pelestarian seni jatilan. Strategi ini relevan, karena seni

jatilan memerlukan perhatian khusus. Saat ini seni jatilan yang “beredar” di beberapa wilayah terlalu sarat dengan unsur komersialnya, sehingga dibutuhkan seni jatilan yang sarat dengan unsur seni, yaitu seni jatilan yang memiliki alur cerita yang indah dan ditarikan secara dramatik.

Strategi pengembangan bagi optimalisasi pemanfaatan kondisi budaya, yang dilakukan oleh masyarakat di Lereng Merapi berpeluang memajukan pariwisata di daerah tersebut, yang sekaligus memiliki manfaat: (1) memperkenalkan kebudayaan dan wilayah Lereng Merapi; (2) melestarikan alam dan lingkungan; (3) meningkatkan kebanggaan atas wilayah Lereng Merapi; (4) meningkatkan kecintaan untuk menjaga budaya yang berkembang di Lereng Merapi; (5) menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan kesejahteraan; (6) menciptakan hubungan yang baik antar suku dan antar bangsa (UNESCO, 2009:13).

Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan segenap potensi yang dimiliki, baik potensi alam, ekonomi, sosial dan budaya yang ada di Lereng Merapi merupakan suatu keharusan. Hal ini dimaksudkan, agar seluruh potensi tersebut mampu melahirkan sumber-sumber penghidupan bagi masyarakat. Selanjutnya seluruh pemanfaatan potensi akan secara simultan dan terintegrasi berada dalam sebuah sistem pariwisata, yang oleh masyarakat Lereng Merapi diwujudkan dalam bentuk *ecotourism*.

Sebagai contoh dapat diperhatikan pelaksanaan *ecotourism* di Sanur, Bali, yang berupa wisata *mangrove*.

Mangrove Information Center, Sanur, Bali (dalam UNESCO, 2009:23) menjelaskan, bahwa wisata dilaksanakan di kawasan hutan *mangrove* (bakau). Bentuk kegiatannya berupa *tracking*, mengamati burung, naik sampan, dan menanam bakau. Para wisatawan juga ditawarkan untuk mengadopsi bakau, agar timbul ikatan emosional antara wisatawan dengan tanaman bakau dan wilayah hutan bakau. Untuk menjamin keberhasilan *ecotourism* yang dilaksanakan, pihak MIC (*Mangrove Information Center*) Sanur, Bali, giat melakukan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya bakau bagi kawasan pesisir, dan mengadakan pelatihan bagi pelajar, mahasiswa, guru, dan anggota lembaga swadaya masyarakat.

Apabila di Bali dikembangkan *ecotourism* pada kawasan hutan *mangrove*, maka *ecotourism* lain yang layak dikembangkan di lereng Merapi adalah *ecotourism resort* ramah lingkungan. *Bajo Komodo Ecolodge* di Labuhan Bajo, Manggarai Barat, Flores (dalam UNESCO, 2009:21) merupakan *resort* ramah lingkungan, yang menawarkan produk dan jasa wisata, berupa: (1) penyediaan air panas dengan pemanfaatan pemanas tenaga surya; (2) penggunaan air limbah dapur dan kamar mandi, untuk mengairi kebun dengan memanfaatkan alat pengolah limbah sederhana; (3) penyediaan restoran yang dilengkapi dengan perpustakaan mini, tempat para wisatawan makan dan bersantai sambil membaca; (4) penyediaan *view* yang indah berupa laut dan kebun, sehingga tidak memerlukan AC untuk menyejukkan ruangan; (5) penyediaan wisata penjelajahan lingkungan, seperti pengamatan burung, dan *tracking* di hutan; serta (6) penyediaan informasi tentang

kondisi alam dan budaya masyarakat setempat.

Berkaca dari contoh-contoh tersebut (*MIC Sanur dan Bajo Komodo Ecolodge*), maka *ecotourism* Lereng Merapi yang mendasarkan pada eksotisme dan kesejukan Lereng Merapi, *lava tour*, agrowisata, keramahan masyarakat pedesaan yang dipadu dengan tradisi dan budaya yang khas, merupakan sebuah keniscayaan bagi solusi yang menghidupkan sumber-sumber penghidupan masyarakat pasca bencana. Walaupun demikian tetap harus diperhatikan pesan N. Ramly (2007) yang menyatakan, bahwa kualitas lingkungan dalam arti luas meliputi sumberdaya alam dan buatan, yang memiliki hubungan kompleks dengan berbagai aktivitas. Uniknya, ketika hubungan ini melibatkan berbagai aktivitas, ternyata ia dapat menimbulkan dampak positif dan dan dampak negatif.

Sebaliknya, menurut Kurnianto (2008:83) pembangunan alternatif berorientasi pada usaha menghilangkan marginalisasi masyarakat, dan justru memperkuat sektor yang dikelola masyarakat. Pada aras ini, maka pembangunan yang berbasis masyarakat (*community based development*) relevan untuk diimplementasikan. Pembangunan berbasis masyarakat bermuara pada upaya pelayanan manusia (*community based human services*), sehingga ia sekaligus merupakan antitesis atas pembangunan yang dibimbing oleh negara (*state-led development*), dan bukan pula pembangunan yang digerakkan oleh pasar (*market driven development*).

Collier, Soentoro, Wiradi, dan Makali (dalam Wiradi, 2009:47) menyatakan, bahwa kemampuan daya serap (*absortive capacity*) dari sawah-sawah para petani di Jawa yang

setiap kali harus mempekerjakan tambahan satu orang untuk menggarapnya, dewasa ini telah mencapai batas kejenuhan. Apabila para petani tidak mau lagi menghormati kewajiban sosialnya yang tradisional (yaitu: saling berbagi), maka suatu proses involusi pertanian desa (*agricultural involution*) akan mencapai titik batas akhirnya (yaitu: beralih menjadi non pertanian).

Keinginan untuk mencegah involusi pertanian dapat disalurkan pada kegiatan *ecotourism* di Lereng Merapi, karena kegiatan ini justru mengandalkan pertanian yang hadir dalam konteks kondisi alam, sosial, ekonomi, dan budaya. *Ecotourism* yang layak dikembangkan adalah *ecotourism* yang dikelola oleh masyarakat setempat (lokal), sehingga sumberdaya manusia dan sumberdaya alam setempat dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Dengan demikian masyarakat setempat mendapat peran yang memadai, dan tidak sekedar sebagai pelengkap kegiatan (marjinal).

BAB VI

PENUTUP

A. Konsolidasi Tanah Sebagai Respon

Konsolidasi tanah merupakan respon atas rusaknya infrastruktur pertanahan, dan sekaligus untuk melakukan penataan pertanahan pasca bencana erupsi, baik penataan bidang-bidang tanah maupun penataan kawasan. Respon ini bukanlah respon “emosional”, melainkan respon yang telah melalui “lorong” pemikiran panjang, sekaligus memperhitungkan aspek keadilan, kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan kegiatan. Konsolidasi tanah selalu berkaitan dengan perbaikan kualitas lingkungan, karena pada akhirnya ia membangun keteraturan dalam hal penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Ketika konsolidasi tanah dilaksanakan secara cermat dan sesuai dengan prosedur yang semestinya, maka dampak negatif kegiatan ini dapat direduksi seminimal mungkin. Sebaliknya, dampak positifnya didorong agar semakin besar, sehingga masyarakat di Lereng Merapi dapat ikhlas dan senang

hati menerima kegiatan konsolidasi tanah. Sebagaimana diketahui, kegiatan konsolidasi tanah di Desa Kepuharjo dan Desa Umbulharjo diawali dengan adanya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09/KEP-34.400/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Penunjukan Lokasi Kegiatan Sertifikasi Konsolidasi Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014. Keputusan inilah yang menjadi dasar tugas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam menetapkan Desa Kepuharjo dan Desa Umbulharjo sebagai lokasi konsolidasi tanah.

Setelah melalui proses yang membutuhkan dana dan tenaga, akhirnya konsolidasi tanah di Lereng Merapi berhasil dilakukan, dengan cakupan: (1) Dusun Pengukrejo, Desa Umbulharjo, sebanyak 486 bidang. (2) Dusun Pelemsari, Desa Umbulharjo, sebanyak 167 bidang. (3) Dusun Petung, Desa Kepuharjo, sebanyak 325 bidang. (4) Dusun Kaliadem, Desa Kepuharjo, sebanyak 301 bidang. (5) Dusun Jambu, Desa Kepuharjo, sebanyak 230 bidang. (6) Dusun Kopeng, Desa Kepuharjo, sebanyak 203 bidang.

Jumat, 6 Maret 2015, akhirnya peserta konsolidasi tanah di Lereng Merapi memperoleh sertifikat hak atas tanah, yang diserahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di dampingi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Fery Mursidan Baldan, mengungkapkan bahwa konsolidasi tanah di Lereng Merapi dapat menjadi

contoh dalam menangani daerah bencana.

Sebelum menyerahkan sertifikat hak atas tanah pada peserta konsolidasi tanah di Lereng Merapi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sempat menghadiri acara Dies Natalis Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang ke-22. Saat orasi ilmiah di hadapan Sidang Senat Terbuka, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengingatkan, agar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional terus berkontribusi bagi kemajuan bidang pertanahan. Salah satu kontribusinya telah ditunjukkan melalui keterlibatannya secara aktif dalam konsolidasi tanah di lereng Merapi, baik melalui penyuluhan dan sosialisasi bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, serta pendataan dan pemberkasan, hingga penyusunan profil dusun yang diorientasikan untuk pengembangan *ecotourism*.

B. *Ecotourism* Sebagai Solusi

Kemajuan bidang pertanahan ditandai oleh responsivitas BPN-RI dalam membantu masyarakat di bidang pertanahan, sebagaimana konsolidasi tanah di Lereng Merapi. Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa konsolidasi tanah merupakan “titik awal” untuk membangun kawasan, dan sekaligus basis penghidupan bagi masyarakat. Oleh karena sumberdaya yang ada di Lereng Merapi (wilayah konsolidasi tanah) mampu mendukung kegiatan pariwisata, maka hal paling rasional (logis) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, adalah dengan melaksanakan

ecotourism di Lereng Merapi pasca konsolidasi tanah. Sebagai sebuah konsep yang berbasis kesadaran, maka *ecotourism* berada pada ranah pembangunan alternatif, karena sulit membayangkan konsep ini dilaksanakan secara *top-down*. Pembangunan yang bersifat *top-down* tidak memberi ruang partisipasi yang cukup bagi masyarakat, sebab pembangunan tipe ini lebih banyak memperlihatkan mobilisasi masyarakat.

Oleh karena *ecotourism* merupakan bagian dari pembangunan alternatif, maka tepatlah kiranya ketika ia diletakkan sebagai langkah lanjutan, setelah konsolidasi tanah berhasil dilakukan di Lereng Merapi. Sebagai bagian dari kegiatan wisata, maka *ecotourism* bermanfaat dalam hal: **Pertama**, meningkatkan pendapatan masyarakat di Lereng Merapi, membuka kesempatan kerja, mendorong munculnya kegiatan-kegiatan penunjang, dan kegiatan sampingan lainnya. **Kedua**, memperkenalkan dan mendayagunakan potensi lingkungan di Lereng Merapi, yang meliputi: kondisi alam, sosial, ekonomi, dan budaya.

Ecotourism memiliki peluang menjadi solusi atas menurunnya kemampuan tanah (sawah) yang ada di Lereng Merapi dalam memanfaatkan tenaga kerja. Semangat saling berbagi yang merupakan kewajiban sosial tradisional masyarakat Lereng Merapi mendorong dan mendukung dilaksanakannya *ecotourism*. Selain itu, sebagai salah satu solusi atas kondisi alam dan budaya yang membutuhkan pelestarian, maka *ecotourism* telah dilaksanakan di beberapa tempat. Hal ini tentu saja layak dicontoh oleh berbagai pihak yang berwenang atau *stake holders ecotourism* di lereng Merapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, Shaza Amorita Zerlinda. 2014. Pelaksanaan Perlindungan Lahan Milik Warga: Studi Kasus Desa Kepuharjo, Tunjungtirta, Ngenep, Kabupaten Malang. *Skripsi* Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Baiquni. 2007. *Strategi Penghidupan Di Masa Krisis*. Ideas Media. Yogyakarta.
- Bernstein, Henry *et al.* 2008. *Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21*. Yogyakarta: STPN Press.
- Gunawan, M.P. *et al.* 2000. *Agenda 21 Sektoral: Agenda Pariwisata Untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan*. Jakarta: UNDP dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Hadi, S.P. 2007. *Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism)*. Makalah pada Seminar Sosialisasi Sadar Wisata dengan tema “Edukasi Sadar Wisata Bagi Masyarakat.” Semarang.
- Horjan, Oleg. 2011. *Developing Land Consolidation Concept and Strategy in the Republic of Moldova*. Moldova: State Agrarian University of Moldova.

- Kartasasmitha, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Keraf, A.S. 2001. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kurnianto, Imam Rudi. 2008. "Pengembangan Ekowisata (*Ecotourism*) di Kawasan Waduk Cacaban Kabupaten Tegal." *Tesis*. Semarang: Program Studi Lingkungan. Universitas Diponegoro.
- Lerman, Zvi and Dragos Cimpoiu. 2006. *Land Consolidation as a Factor for Successful Development of Agriculture in Moldova*. Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem.
- Mitchell, David. 2011. *Assessing and Responding to Land Tenure Issues in Disaster Risk Management*. Rome: FAO.
- Nugroho, Aristiono et al. 2011. *Ngandangan Kontemporer: Implikasi Sosial Landreform Lokal*. Yogyakarta: STPN Press.
- Nugroho, Aristiono et al. 2013. *Resonansi Landreform Lokal: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar*. Yogyakarta: STPN Press.
- Nugroho, Aristiono et al. 2014. *Tanah Hutan Rakyat: Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong*. Yogyakarta: STPN Press.
- Pemerintah Kabupaten Sleman. 2013. *Kawasan Rawan Bencana Gunung api Merapi*. <http://jdih.slemankab.go.id>
- Ramly, N. 2007. *Pariwisata Berwawasan Lingkungan*. Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta.

- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2009. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir, Teori Sosial Posmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Sitorus, Oloan. 2014. *Konsolidasi Tanah di Kawasan Rawan Bencana III Merapi: Mengintroduksi Implementasi Yang Berbasis Ekoturisme di Kecamatan Cangkringan, Sleman*. Makalah disampaikan pada Diskusi Bulanan dan Sosialisasi Konsolidasi di Merapi. Yogyakarta, PPPM-STPN, 4 Maret 2014.
- Suharyanto & Hastowiyono, 2014. *Pelebagaan BUM Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sutaryono. 2007. *Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah*. Yogyakarta: TuguJogja Grafika.
- Sutaryono. 2008. *Pemberdayaan Setengah Hati: Subordinasi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan*. Yogyakarta: STPN Press & Lapera Pustaka Utama.
- Sutaryono. 2013. *Kontestasi dan Marjinalisasi Petani: Realitas Petani Negeri Agraris*. Sidoarjo: Zifatama.
- Takai, Katsuaki. 2005. *Character of Land Readjustment Project in Japan*. Paper on International Seminar on Urban Planning and Land Readjustment for Sustainable Urban Development, March 5th, 2005, Yogyakarta.
- UNESCO. 2009. *Ekowisata: Panduan Dasar Pelaksanaan*. UNESCO Office, Jakarta

- Wahyunto & Wasito, 2013. “Lintasan Sejarah Erupsi Gunung Merapi”, dalam *Pengembangan Pertanian Berbasis Inovasi Di Wilayah Bencana Erupsi Gunung Merapi*. Jakarta: Balitbang Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Wikipedia. 2015. “Gunung Merapi.” http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Merapi, diakses pada 17-02-2015
- Wiradi, Gunawan *et al.* 2009. *Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris*. Yogyakarta: STPN.
- WWF Indonesia dan Departemen Kebudayaan & Pariwisata. 2009. *Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Departemen Kebudayaan & Pariwisata.

